



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO



RKPD 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BONE BOLANGO

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2016



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.4 Sistematisasi RKPD	7
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	10
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	10
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi	11
2.1.2 Luas Wilayah	11
2.1.3 Batas Wilayah	12
2.1.4 Topografi	13
2.1.5 Penggunaan Lahan	17
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	17
2.1.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	18
2.1.8 Ketenagakerjaan	20
2.2 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	22
2.3 Struktur Eekonomi Daerah	24
2.3.1 Inflasi	25
2.3.2 PDRB Perkapita	25
2.3.3 Permasalahan Daerah	26
2.3.4 Angka Kemiskinan	27
2.4 Kesejahteraan sosial dan Layanan Umum	29
2.4.1 Pendidikan	29
2.4.2 Kesehatan	33

2.4.3	Pertanahan	34
2.4.4	Ketenagakerjaan	36
2.5	Aspek Pelayanan Umum	37
2.5.1	Fokus Layanan Urusan Wajib	37
2.6	Aspek Daya aing Daerah	64
2.6.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	65
2.6.2	Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	72
2.7	Evaluasi Sasaran- sasaran Pembangunan RPJMD	77
2.8	Permasalahan Daerah	90
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan	93
3.1	Kondisi Ekonomi Daerah	93
3.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	100
3.2.1	Tantangan Perekonomian Daerah	100
3.2.2	Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017	101
3.3	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	104
3.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	106
3.4.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	107
3.4.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	108
3.4.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	108
3.4.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	114
3.4.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	120
Bab IV	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2017	123
4.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	123
4.2	Prioritas Pembangunan 2017	129
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	150
Bab VI	Penutup	164

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango	12
Tabel	2.2.	Ketinggian Daerah Kabupaten Bone Bolango Dari Permukaan Laut	14
Tabel	2.3.	Nama – Nama Sungai Besar dan Kecil di Kabupaten Bone Bolango	16
Tabel	2.4.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	17
Tabel	2.5.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	18
Tabel	2.6	Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	19
Tabel	2.7	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode 2010-2015	20
Tabel	2.8	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bone Bolango	21
Tabel	2.9	Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango	21
Tabel	2.10	Pengukuran Kinerja Indikator PDRB Perkapita Tahun 2015	22
Tabel	2.11	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2015	23
Tabel	2.12	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010/2015 Atas Dasar Harga Berlaku (%)	24
Tabel	2.13	PDRB Perkapita Kabupaten Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha (Rp) Tahun 2011-2015	25
Tabel	2.14	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015	31
Tabel	2.15	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	31
Tabel	2.16	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	32

Tabel	2.17	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	33
Tabel	2.18	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	34
Tabel	2.19	Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	34
Tabel	2.20	Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	36
Tabel	2.21	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	36
Tabel	2.22	Capaian Kinerja APM, APK dan APS	37
Tabel	2.23	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid/Guru TK /Raudatul Atfhal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Tahun 2014/2015	39
Tabel	2.24	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid/Guru Sekolah Dasar Negeri (SD) Menurut Kecamatan 2014/2015	39
Tabel	2.25	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan 2014/2015	40
Tabel	2.26	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Menurut Kecamatan 2014/2015	41
Tabel	2.27	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Menurut Kecamatan	41
Tabel	2.28	Angka Putus Sekolah Tahun 2011 – 2015	42
Tabel	2.29	Jumlah Guru Yang Telah Memiliki Ijazah S1	42
Tabel	2.30	Jumlah Fasilitas Kesehatan di kabupaten Bone Bolango	46
Tabel	2.31	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Yankes di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	46
Tabel	2.32	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Rinci per Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	47
Tabel	2.33	Perkembangan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012-2015	48

Tabel	2.34	Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012-2015	48
Tabel	2.35	Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008-2014	49
Tabel	2.36	Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	49
Tabel	2.37	Jumlah Pasar, Toko dan Kios Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	50
Table	2.38	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango, 2015	51
Tabel	2.39	Luas Lahan Sawah di Kabupaten Bone Bolango	52
Tabel	2.40	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, 2014-2015	52
Tabel	2.41	Data Produksi Perikanan Tangka Di Kabupaten Bo Bolango Tahun 2011-2015	53
Tabel	2.42	Data Produksi Peralatan Tangkap (Dalam Ton) Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	54
Tabel	2.43	Produksi Perikanan Laut yang dijual di TPI menurut jenis Ikan DiKabupaten Bone Bolango Tahun 2013-2015	54
Tabel	2.44	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut Berdasarkan Ke Pemilikan Sarana Penangkap Ikan 2011-2015	54
Tabel	2.45	Perkembangan Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	56
Tabel	2.46	Produksi Hasil Hutan Non HPH Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	56
Tabel	2.47	Luas Lahan Kritis, Reboisasi dan Penghijauan Di Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2015	56
Tabel	2.48	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, 2015	57
Tabel	2.49	Populasi Ternak (Ekor) menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Di Kabupaten Bone BolangoTahun 2015	57
Tabel	2.50	Populasi Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	58

Tabel	2.51	Jumlah Ternak sapi yang dipotong di RPH dan diluar RPH dan dilaporkan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013-2015	59
Tabel	2.52	Potensi Pertambangan Non Logam di Kabupaten Bone Bolango	60
Tabel	2.53	Potensi Pertambangan Logam di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	60
Tabel	2.54	Perkembangan Potensi Sumber Energi di Kabupaten Bone Bolango	61
Tabel	2.55	Daftar Obyek Daya Tarik Wisata di Propinsi Gorontalo	62
Tabel	2.56	Jenis Sarana Wisata, Seni dan Budaya di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015	62
Tabel	2.57	Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Setiap Obyek Wisata di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	63
Tabel	2.58	Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	63
Tabel	2.59	Jumlah Pasar, Toko dan Kios Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	64
Tabel	2.60	PDRB Harga Berlaku dan Sumbangan Terhadap Perekonomian Provinsi Gorontalo	65
Tabel	2.61	PDRB Harga Konstan dan Sumbangan Terhadap Perekonomian Provinsi Gorontalo	65
Tabel	2.62	PDRB Deflator Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo serta Perbandingannya	66
Tabel	2.63	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo	67
Tabel	2.64	Peran Ekonomi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango	68
Tabel	2.65	Peran Ekonomi Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo	69
Tabel	2.66	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Propinsi Gorontalo	70
Tabel	2.67	Analisis Sektor Basis dan Daya Saing	71

Tabel	2.68	Status Ruas Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango	73
Tabel	2.69	Klasifikasi Permukaan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango	73
Tabel	2.70	Kondisi Jalan di Kabupaten Bone Bolango	73
Tabel	2.71	Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango Tahun 2013 - 2014	74
Tabel	2.72	Penyediaan Energi Listrik Tahun 2012-2015 dan Target Tahun 2015	75
Tabel	2.73	Jaringan Listrik dan Lamu Jalan Tahun 2012-2015 di Kabupaten Bone Bolango	75
Tabel	2.74	Bantuan Rumah Bagi Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango	76
Tabel	2.75	Perkembangan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bone Bolango	76
Tabel	2.76	Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	78
Tabel	2.77	Angka Putus Sekolah Tahun 2014/2015	83
Tabel	2.78	Jumlah Guru yang Telah Memiliki Ijazah S1	84
Tabel	2.79	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014	85
Tabel	2.80	Presentase Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan Pemerintah	87
Tabel	2.81	Jumlah Kelahiran dan Angka Eksploitasi Sosial Ekonomi Anak Tahun 2013 dan Tahun 2014	88
Tabel	2.82	Pengukuran Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2015	88
Tabel	2.83	Pengukuran Kinerja Indikator PDRB Perkapita	89
Tabel	3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d	94

		2015	
Tabel	3.2	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2015	95
Tabel	3.3	Perbandingan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015	95
Tabel	3.4	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015 atas Dasar Harga Berlaku (%)	97
Tabel	3.5	Agregat Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bone Bolango Periode 2011-2015	98
Tabel	3.6	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Periode 2010-2015	99
Tabel	3.7	Perbandingan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2015	102
Tabel	3.8	Perkembangan dan Prospek Makro Ekonomi Tahun 2017 Kabupaten Bone Bolango	103
Tabel	3.9	Ringkasan Struktur APBD Kabupaten Bone Bolango Realisasi 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017	107
Tabel	3.9	Ringkasan Struktur APBD Kabupaten Bone Bolango Realisasi 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017	107
Tabel	3.10	Realisasi 2015-2016 dan Proyeksi 2017 Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango	109
Tabel	3.11	Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 s/d Tahun 2017	114
Tabel	3.12	Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s/d 2017	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1.	Struktur Umur Penduduk Kab. Bone Bolango	19
Grafik	2.2.	Tingkat Pengangguran dan Partisipasi Angkatan Kerja	21
Grafik	2.3.	Perbandingan PDRB Perkapita (jutaan rupiah)	22
Grafik	2.4.	Gini Ratio Kab. Bone Bolango 2011-2015	26
Grafik	2.5.	Trend Kemiskinan Tahun 2011-2015	27
Grafik	2.6	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2011-2015	29
Grafik	2.7	Angka Melek Huruf Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2015	30
Grafik	2.8	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2015	30
Grafik	2.9	Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2015	43
Grafik	2.10	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bone Bolango, 2012-2015	45
Grafik	2.11	Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007-2015	49
Grafik	2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo	64
Grafik	2.13	Perkembangan Kinerja Bidang Perumahan di Kabupaten Bone Bolango	76
Grafik	2.14	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2011-2015	82
Grafik	3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2015	96

Grafik	3.2	Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	99
Grafik	3.2	Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Hubungan Keterkaitan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6
Gambar	2.1	Peta Wilayah Kabupaten Bone Bolango	11
Gambar	2.2	Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango	14
Gambar	2.3	Peta Daerah Aliran sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango	15
Gambar	2.4	Peta Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango	59
Gambar	4.1	Visi dan Karakter Utama Visi Daerah dalam Rancangan RPJMD 2016 - 2021	125
Gambar	4.2	Dimensi Pembangunan dan Sasaran Utama Pembangunan Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021	129
Gambar	4.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021	138
Gambar	4.4	Konektivitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 dengan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 Dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021	139
Gambar	4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	142

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Prioritas dan rencana kerja pembangunan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rencana anggaran tahun 2017. RKPD tahun 2017 menjadi acuan bagi Satuan Kerja Kepemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017.

Penyusunan RKPD tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan politik diantaranya dilakukan dengan memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses komunikasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD merupakan satu kesatuan dari sistim perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 mengacu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango 2005-2025 serta diselaraskan dan dilakukan dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional serta kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta arah kebijakan program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Mengingat bahwa saat ini RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 sementara dalam proses perancangan ,maka penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah periode 5 (lima) tahun ketiga yang termuat dalam RPJPD 2005-2025.

Arahan prioritas utama pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada RPJMD 2015-2020 yang diamanahkan dalam RPJPD 2005-2025 adalah percepatan pembangunan wilayah melalui pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan untuk mewujudkan masyarakat maju dan bermartabat menuju Bone Bolango Cemerlang. Arah utama kebijakan pembangunan pada tahapan ketiga tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan, peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintah menuju pemerintahan bersih dan beribawa, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin bermutu, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, masyarakat, pengembangan produk unggulan daerah, percepatan pengembangan infrastruktur dasar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, percepatan penataan, pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan, pengembangan kawasan strategis, serta pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan formal penyusunan RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017, didasarkan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

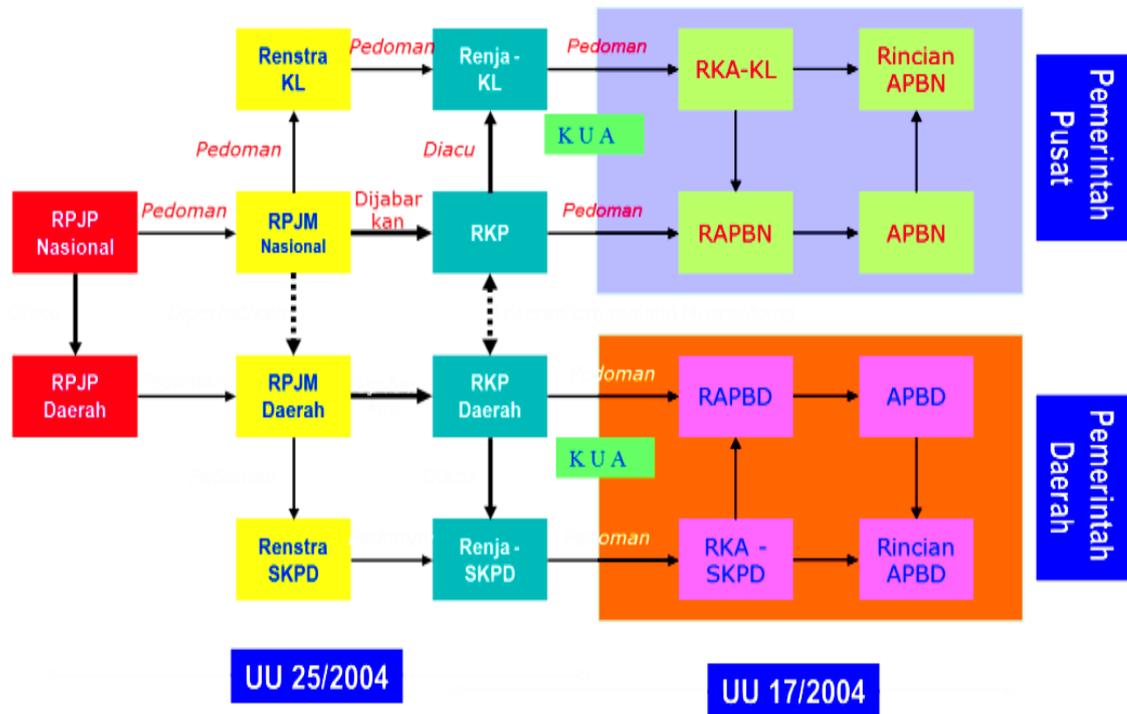
21. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2030;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk

keterkaitan yang bersifat hirarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1

Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Secara rinci keterkaitan RKPD 2017 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yakni sebagai berikut :

- RKPD 2017 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD 2017 disusun dengan berpedoman pada arahan RPJM Daerah ketiga (2016-2021).
- RKPD 2017 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tiap SKPD Kabupaten Bone Bolango.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 ini harus memiliki sinkronisasi dengan dokumen RKP Tahun 2017, RKPD Propinsi Tahun 2017 dan RPJM Daerah ketiga (2015-2020). Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2030.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RTRW nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab ini mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2017 berdasarkan pada RPJMD ketiga (2016-2021) dalam RPJPD Kab. Bone Bolango tahun 2005-2025.

4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2017

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan prioritas utama pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada RPJMD ketiga 2016-2021.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017

BAB VI. PENUTUP.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH

Evaluasi hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program yang didasarkan pada RKPD tahun lalu dan hasil evaluasi atas kinerja akhir masa Jabatan Bupati merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dimaksud dilakukan untuk menilai pencapaian kinerja terhadap apa yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh pada tahun lalu dan tahun berjalan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun rencana 2017.

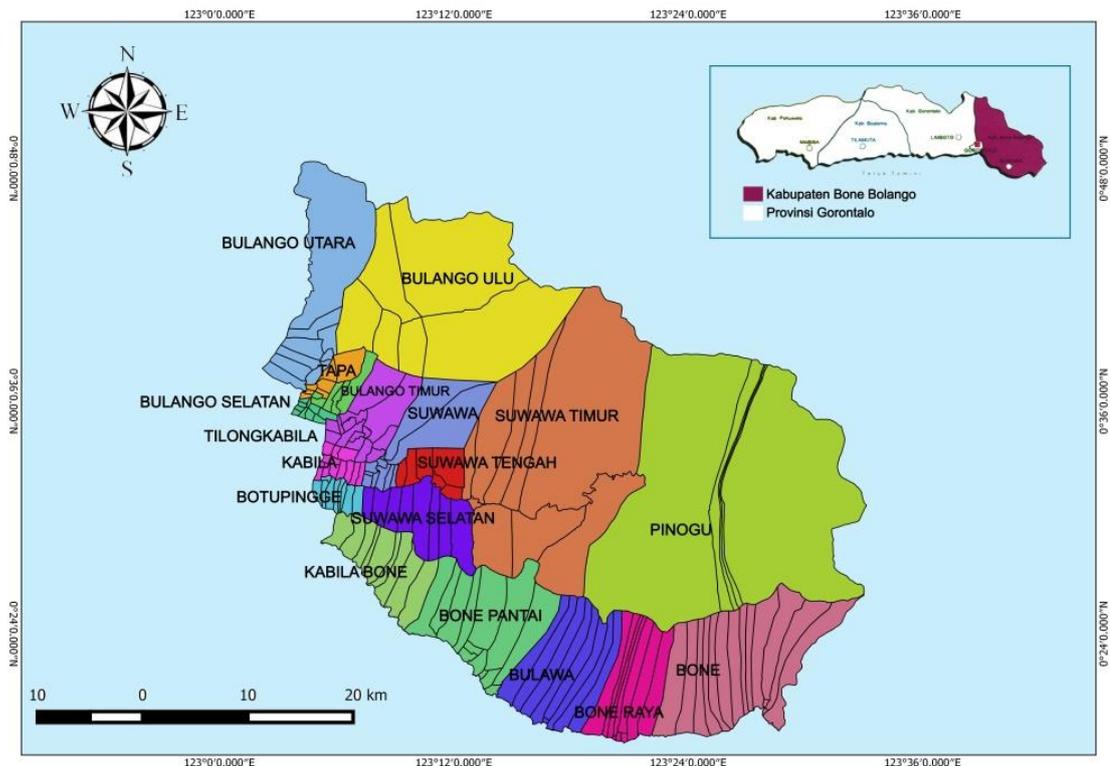
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang saat pembentukan hanya memiliki tiga daerah. Atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB). Komite ini berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km² dan luas lautan sebesar 392,68 Km² dengan panjang pantai 61 Km. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah 16,24% dari luas Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Bone Bolango



Sumber : RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011.

2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Bone Bolango memiliki 18 kecamatan, 160 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Pinogu (361,40 Km²) dan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Bulango Selatan (9,87 Km²). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Bone (14 desa), sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Bulango Timur serta kecamatan yang mempunyai 5 kelurahan adalah Kecamatan Kabila. Untuk lebih jelas mengenai pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE
1.	Tapa	7	64,41	3,25
2.	Bulango Utara	9	176,1	8,87
3.	Bulango Selatan	10	9,87	0,50
4.	Bulango Timur	5	10,82	0,55
5.	Bulango Ulu	6	78,41	3,95
6.	Kabila	12	193,45	9,75
7.	Botupingge	9	47,11	2,37
8.	Tilongkabila	14	79,74	4,02
9.	Suwawa	10	33,51	1,69
10.	Suwawa Selatan	8	184,09	9,28
11.	Suwawa Timur	9	127,80	6,44
12.	Suwawa Tengah	6	64,70	3,26
13.	Kabila Bone	9	143,51	7,23
14.	Bonepantai	13	161,82	8,15
15.	Bulawa	9	111,01	5,59
16.	Bone Raya	10	64,12	3,23
17.	Bone	14	72,71	3,66
18.	Pinogu	5	361,40	18,21
JUMLAH		165	1984,58	100

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

2.1.3 Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Bone Bolango terletak antara 0°24' – 1°01' Lintang Utara dan 21°59'-123°32' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bone Bolango pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara serta Kota Timur Kota Gorontalo.

Secara ekonomi wilayah Bone Bolango sangat berdekatan dengan wilayah Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berdampak penting bagi perkembangan wilayah Bone Bolango. Dengan aksesibilitas yang

tinggi tersebut, pengaruh pembangunan di wilayah Kota Gorontalo memiliki pengaruh langsung bagi mobilitas ekonomi di Kabupaten Bone Bolango.

Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kawasan penyangga (buffer area) ekosistem lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga (buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkar dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

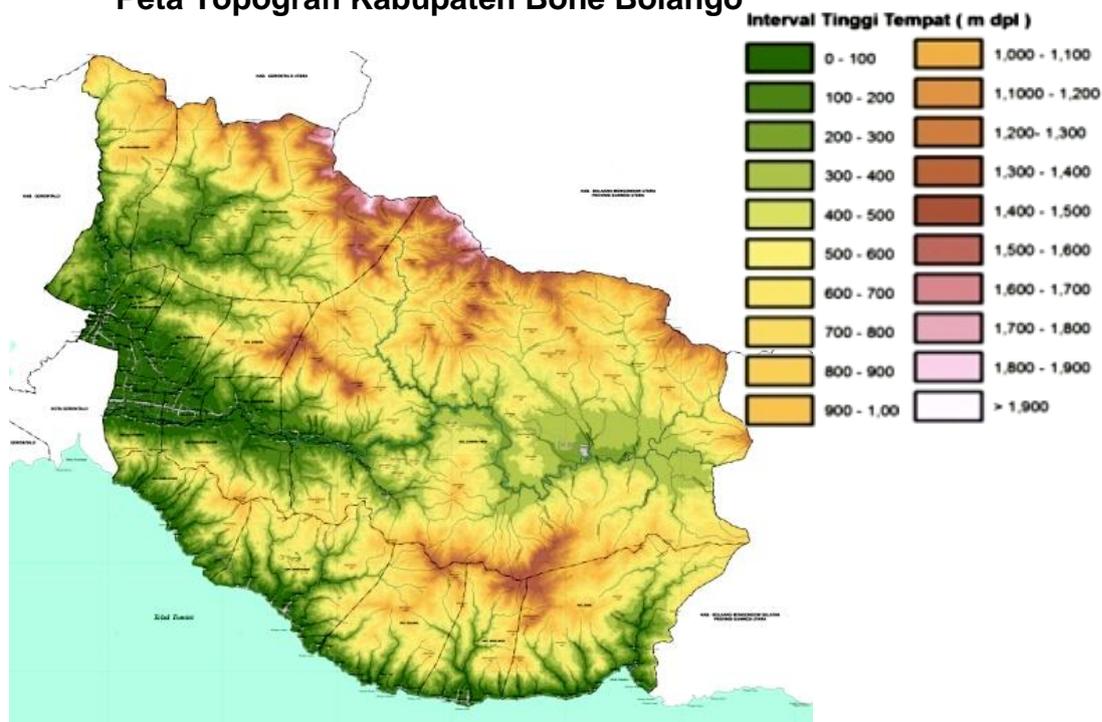
2.1.4 Topografi

Sebagian besar wilayah Bone Bolango merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan) dengan kondisi topografi yang terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- a. Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- b. Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- c. Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Gambar: 2.2

Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango



Tabel 2.2
Ketinggian Daerah Kabupaten Bone Bolango
dari Permukaan Laut

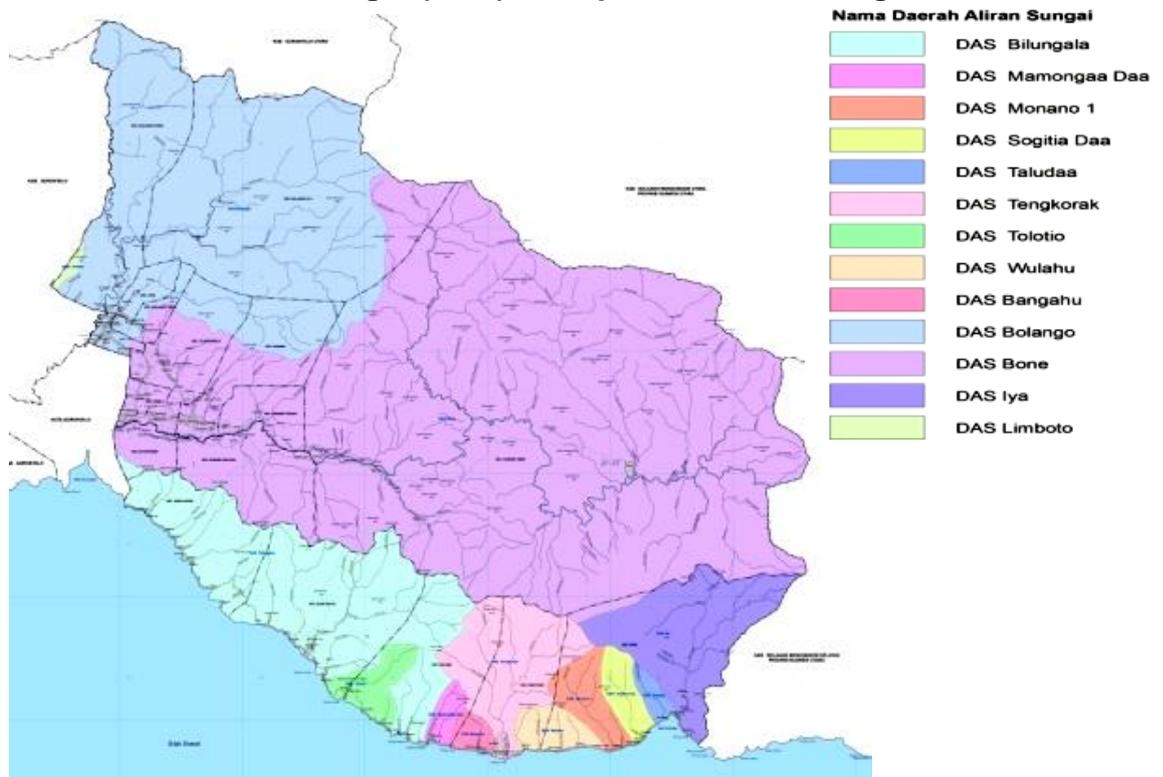
KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT	LUAS (Ha)
25 – 100 meter	14,41
100 – 500 meter	48,65
500 – 1000 meter	27,85
> 1000 meter	9,09

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi, skala 1:250.000, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1997) formasi geologi Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) formasi, yaitu: aluvium endapan pantai (Qal), aluvium endapan danau (Qvl), Molasa Selebes (Qts), Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv), Diorit Bone (Tmb), Batuan Gunung Api Bilungala (Tmbv), dan Anggota Batugamping Formasi Tapadaka (Tmtl).

Wilayah Bone Bolango dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang melalui wilayah ini adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) ini adalah \pm 265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Kedua DAS ini bermuara pada satu tempat yaitu Teluk Tomini/Teluk Gorontalo. Di samping itu juga ditemukan banyak DAS-DAS kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan di pinggiran kawasan pantai.

Gambar : 2.3
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango



Sumber : RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Tabel 2.3
Nama-Nama Sungai Besar dan Kecil
Di Kabupaten Bone Bolango

NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	KECAMATAN YANG DILALUI
Bone	90,00	Suwawa, Botupingge, Kabila
Bolango	40,00	Tapa, Bulango, Tilongkabila
Tambo	3,50	Kabila Bone
Inengo	10,25	Kabila Bone
Kiki	5,00	Kabila Bone
Molotabu	5,50	Kabila Bone
Aladi	5,00	Kabila Bone
Bututonuo	7,25	Kabila Bone
Oluhuta	3,75	Kabila Bone
Olele	4,00	Bone Pantai
Tolotio	6,25	Bone Pantai
Butalo	11,50	Bone Pantai
Bilungala	15,00	Bone Pantai
Tongokiki	6,50	Bone Pantai
Tongodaa	2,75	Bone Pantai
Uabanga	7,75	Bone Pantai, Bone Raya
Tombulilato	20,00	Bone Raya
Ombulo	3,50	Bone Raya
Mamunga Daa	7,00	Bone Raya
Mopuya Daa	5,00	Bone Raya
Mopuya Kiki	3,50	Bone Raya
Tapambudu	3,25	Bone Raya, Bone
Monano	9,50	Bone
Topidaa	3,50	Bone
SogitaDaa	6,50	Bone
Sogita Kiki	5,50	Bone
Taludaa	18,00	Bone

Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia, Tahun 199

2.1.5 Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	LUAS (Ha)
		2015
1.	Hutan	
	1. Taman Nasional	104.740
	2. Hutan Lindung	15.930
	3. Hutan produksi tetap	824
	4. Hutan produksi terbatas	18.824
2.	Hutan Basah	
	1. Sawah yang diolah	2.044
	2. Sawah yang belum diolah	-
	3. Tambak	-
	4. Kolam dan Danau	74
	5. Rawa-rawa yang ditanami	4
3.	Lahan Kering	
	1. Tegalan	7.169
	2. Ladang/huma	6.444
	3. Lahan kering sementara tidak diusahakan	6.444
	4. Perkebunan	15.758
	5. Penggembalaan/ padang rumput	2.936
4.	Bangunan dan lain-lain	
	1. Pekarangan/tanah untuk bangunan	487
	2. Taman Nasional	7.355
	3. Hutan Lindung	9376
	Total	198.431

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

(*) Data masih sementara dalam pengolahan dan perampungan

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana mengacu pada perda No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, penduduk pertengahan tahun 2015 Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar 158.550 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 79.589 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 78.961 jiwa.

Penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 yang tersebar di 18 kecamatan berjumlah 151.094 jiwa. Kecamatan Kabila dengan Luas daerah 193,45 Km dan ditempati oleh 23.634 penduduk, merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat apabila dibandingkan dengan 17 kecamatan lainnya. Sex ratio atau angka perbandingan antar jenis kelamin penduduk tahun 2015 sebesar 101. Artinya bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Tabel. 2.5.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

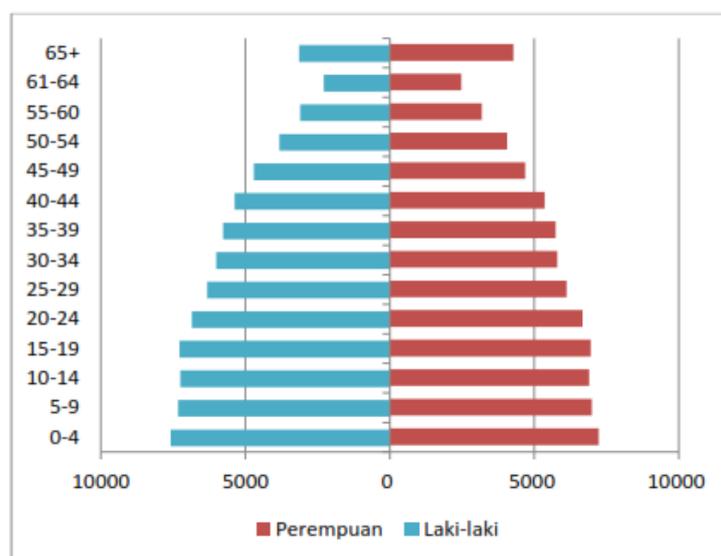
KECAMATAN	LUAS		PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (ORANG/KM)
	KM	%	JUMLAH	%	
1. Tapa	64,41	3,25	7956	5,02	124
2. Bulango Utara	176,1	8,87	7825	4,94	45
3. Bulango Selatan	9,87	0,5	10429	6,58	1 057
4. Bulango Timur	10,82	0,55	5549	3,5	513
5. Bulango Ulu	78,41	3,95	3918	2,47	50
6. Kabila	193,45	9,75	23634	14,91	123
7. Botupingge	47,11	2,37	6448	4,07	137
8. Tilongkabila	79,74	4,02	18242	11,51	229
9. Suwawa	33,51	1,69	12572	7,93	376
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28	5200	3,28	29
11. Suwawa Timur	127,8	6,44	5245	3,31	42
12. Suwawa Tengah	64,7	3,26	6221	3,92	97
13. Pinogu	406,78	18,21	2006	1,27	6
14. Bonepantai	161,82	8,15	10 867	6,85	68
15. Kabila Bone	143,51	7,23	11281	7,12	79
16. Bone raya	64,12	3,23	6648	4,19	104
17. Bone	72,71	3,66	9372	5,91	129
18. Bulawa	111,01	5,59	5137	3,24	47
Bone Bolango		100	158550	100	80

Tabel. 2.6.
Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	PENDUDUK			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO
1. Tapa	3928	4028	7956	0,98
2. Bulango Utara	3948	3877	7825	1,02
3. Bulango Selatan	5187	5242	10429	0,99
4. Bulango Timur	2731	2818	5549	0,97
5. Bulango Ulu	2014	1904	3918	1,06
6. Kabila	11668	11966	23634	0,98
7. Botupingge	3275	3173	6448	1,03
8. Tilongkabila	9024	9218	18242	0,98
9. Suwawa	6297	6275	12572	1
10. Suwawa Selatan	2644	2556	5200	1,03
11. Suwawa Timur	2681	2564	5245	1,05
12. Suwawa Tengah	3138	3083	6221	1,02
13. Pinogu	1029	977	2006	1,05
14. Bonepantai	5512	5355	10867	1,03
15. Kabila Bone	5776	5505	11281	1,05
16. Bone raya	3354	3294	6648	1,02
17. Bone	4753	4619	9372	1,03
18. Bulawa	2630	2507	5137	1,05
Kab. Bone Bolango	79589	78961	157624	1,01

Sumber data: KDA Bone Bolango 2015

Grafik 2.1.
Struktur Umur Penduduk Kab. Bone Bolango
Tahun 2015



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 (Pertengahan Tahun/Juni)
 Source : The Result of Indonesia Population Projection 2010-2035 (mid year/June)

2.1.8 Ketenagakerjaan

Walaupun sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Bone Bolango, namun persentase penduduk yang bekerja di sektor tersebut kian menurun. Diduga hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan sehingga masyarakat beralih ke sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, pertambangan, bangunan, transportasi dan lainnya.

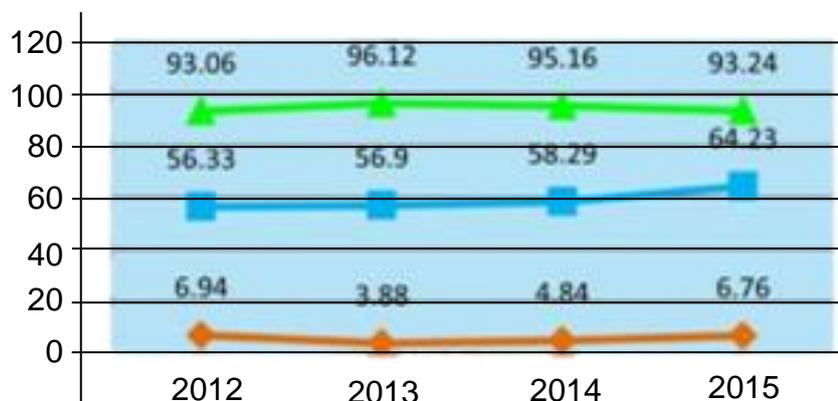
Dalam empat tahun terakhir TPAK Kabupaten Bone Bolango di atas 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Bone Bolango merupakan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Di tahun 2015, dari 100 orang usia kerja, 64 orang di antaranya tergolong angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi).

Tabel 2.7
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha
Periode 2010-2015

Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja Per Tahun (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	28,43	27,25	28,74	31,64	25,26
2. Industri Pengolahan	7,09	3,52	3,97	4,21	5,29
3. Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan Hotel	13,30	16,54	16,59	15,75	29,47
4. Jasa kemasyarakatan	24,81	25,47	25,93	22,59	21,81
5. Lainnya (pertambangan, listrik, gas, air, bangunan, transportasi dan keuangan)	26,37	27,22	24,77	25,81	28,37
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran dan Patisipasi Angkatan Kerja



Tabel. 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Bone Bolango

Jenis Keg Utama	2013	2014	2015
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	56 252	59 913	66 015
2. Penganggur	2 268	3 044	4 783
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Ruta, dan Lainnya)	44 321	45 056	39432
Jumlah	102 841	108 013	110 230

Tabel. 2.9.
Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bone Bolango

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	40 224	19 689	59 913
2. Penganggur	1 849	1 195	3 044
II. Bukan Angkatan Kerja			
1 Sekolah	3 854	5 018	9 872
2 Mengurus Rumah Tangga	1 636	25 617	27 253
3 Lainnya	5 100	2 831	7 931
Jumlah/ Total	53 663	54 350	108 013
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,77	44,92	64,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,97	11,89	6,76

2.2 Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator peningkatan pendapatan masyarakat diperoleh dari data PDRB perkapita kabupaten Bone Bolango yang dirilis oleh BPS Bone Bolango. PDRB perkapita adalah PDRB atas harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan untuk konsumsi yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa, yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

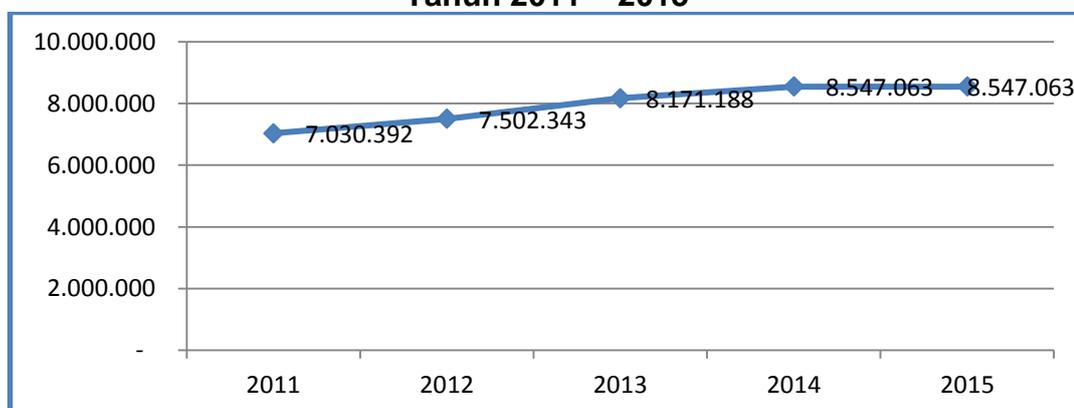
Tabel 2.10
Pengukuran Kinerja Indikator PDRB Perkapita
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Kinerja
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan	PDRB Perkapita	Rp. 8.300.000	Rp. 8.547.063	102,9%

Sumber data : BPS Bone Bolango

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa target peningkatan pendapatan perkapita tahun 2015 sebesar Rp. 8.300.000 dengan realisasi Rp. 8.547.063 dengan kinerja pencapaian sebesar 102,9% dengan kategori **Sangat Baik**.

Grafik 2.3.
Perbandingan PDRB Perkapita (jutaan rupiah)
Tahun 2011 – 2015



Sumber data : BPS Bone Bolango

Tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang cukup sebagaimana grafik diatas berada di tahun 2014, dimana kenaikan pendapatan perkapitanya hanya sebesar Rp. 375.875 dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2013 sebesar Rp. 668.845.

Tabel. 2.11.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2015

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,77	6,39	6,91	5,83
B	Pertambangan dan Penggalian	1,73	0,72	0,7	-0,21
C	Industri Pengolahan	7,28	7,65	6,29	5,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,6	7,94	8,87	0,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,7	13,2	11,92	6,92
F	Konstruksi	6,88	11,6	15,96	9,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Seneada Motor	8	9,53	10,18	8,36
H	Transportasi dan Pergudangan	5,6	7	5,98	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1,17	5,31	9,13	9,79
J	Informasi dan Komunikasi	5,41	5,54	7,28	7,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26,7	4,22	6,75	11,97
L	Real Estat	5,45	5,86	3,24	4,56
M,N	Jasa Perusahaan	14,7	15,6	9,7	7,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	6,15	4,9	4,07
P	Jasa Pendidikan	17,8	13,3	8,98	7,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,5	9,95	6,08	8,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,6	8,32	6,09	4,02
Produk Domestik Regional Bruto		7,47	7,63	7,72	6,52

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.3 Struktur Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Bone Bolango masih didominasi dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sumbangan kategori tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone Bolango. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan kategori Industri Pengolahan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Tabel. 2.12
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2010 – 2015 atas Dasar Harga Berlaku (%)

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,8	36,06	35,33	35,66	35,7
B	Pertambangan dan Penggalian	2,42	2,32	2,18	2,02	1,9
C	Industri Pengolahan	6,09	6,03	6,02	6,22	6,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,85	9,88	10,38	11,24	11,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,21	11,23	11,66	11,98	12,32
H	Transportasi dan Pergudangan	1,2	1,16	1,15	1,11	1,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,04	1,02	1,01	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	1,99	1,88	1,83	1,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,66	2,03	2	1,97	2,04
L	Real Estat	2,8	2,83	2,8	2,63	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	13,87	13,73	13,33	12,46	11,7
P	Jasa Pendidikan	3,97	4,47	4,78	4,66	4,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,6	4,91	5,11	4,9	4,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,2	2,15	2,2	2,13	2,07
Produk	Domestik Regional Bruto (PDRB)	100	100	100	100	100

2.3.1 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menjabarkan tingkat stabilitasi ekonomi pada strategi daerah. Inflasi di Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Tahun 2012 Inflasi Kabupaten Bone Bolango 4,5%, tahun 2013 sebesar 6%, tahun 2014 mencapai 7% serta tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 5% - 7% dan 5%. Pada tahun 2017 inflasi diproyeksi pada angka 5% - 7%, akan tetapi pergerakan inflasi tersebut masih akan berada dalam kisaran dibawah dua digit. Prediksi tersebut didasarkan pada asumsi kemungkinan naiknya harga BBM dan pengurangan subsidi BBM sehingga akan memicu pergerakan harga pada komoditas-komoditas pokok lainnya.

2.3.2 PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita, PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Pada tahun 2015, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Bone Bolango mencapai 20,49 juta Rupiah perkapita pertahun, hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bone Bolango rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 20,49 juta rupiah selama tahun 2015. Pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2015 mencapai 5,08 persen dibandingkan tahun 2014, sedikit mengami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014 (6,20 persen).

Tabel 2.13.
PDRB Perkapita Kab. Bone Bolango Menurut Lapangan Usaha (Rp)
Tahun 2011 – 2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1.939,08	2.175,27	2.424,75	2.768,30	3.137,78
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	1.838,62	1.975,88	2.126,54	2.290,61	2.439,87

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	13.401,17	14.820,66	16.276,65	18.321,70	20.486,13
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	12.706,89	13.462,15	14.274,89	15.160,16	15.929,59
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,32	5,94	6,04	6,2	5,08
Jumlah Penduduk (Jiwa)	144.695	146.773	148.971	151.094	153.166
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,52	1,44	1,5	1,43	1,37

*) Angka Sementara

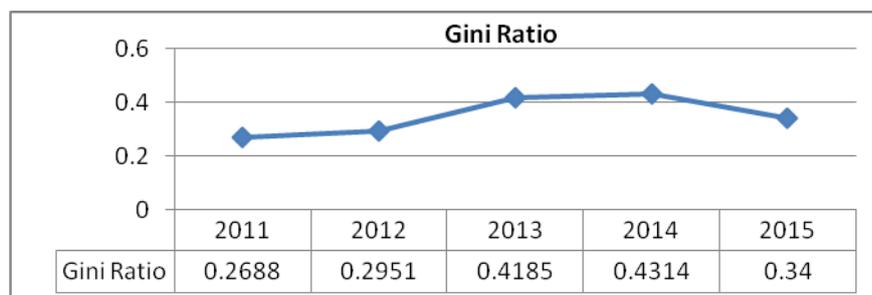
**) Angka Sangat Sementara

Sumber BPS Kab. Bone Bolango

2.3.3 Indeks Gini/Tingkat Kemerataan

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (World Bank) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, antara $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Gambaran koefisien gini atau Gini Ratio di Kabupaten Bone Bolango, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Grafik 2.4.
Gini Ratio Kabupaten Bone Bolango 2011-2015

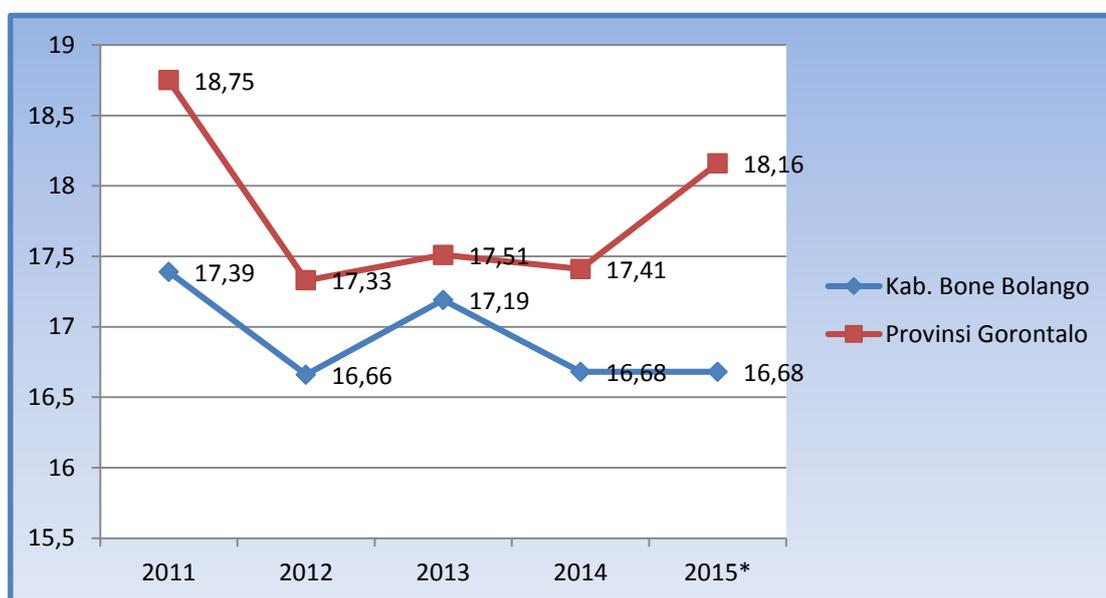


Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2011 dan 2012 kondisi gini ratio Kabupaten Bone Bolango berada pada angka < 40 yang berarti memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 angka gini ratio > 40 yang berarti memiliki tingkat ketimpangan yang sedang yaitu 0.4314. Pada tahun 2015 angka gini ratio kembali menurun dan berada < 40 yakni 0.34 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

2.3.4 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Grafik 2.5
Trend Kemiskinan Tahun 2011-2015



Sumber data :BPS Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa trend penurunan angka kemiskinan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 cenderung positif, namun di tahun 2013 angka kemiskinan naik menjadi 17,19% atau meningkat sebesar 0,53%. Angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 16,68% atau menurun sebesar 0,97% dan pada tahun 2015 angka kemiskinan meningkat menjadi 16,68 atau sebesar 0,24%.

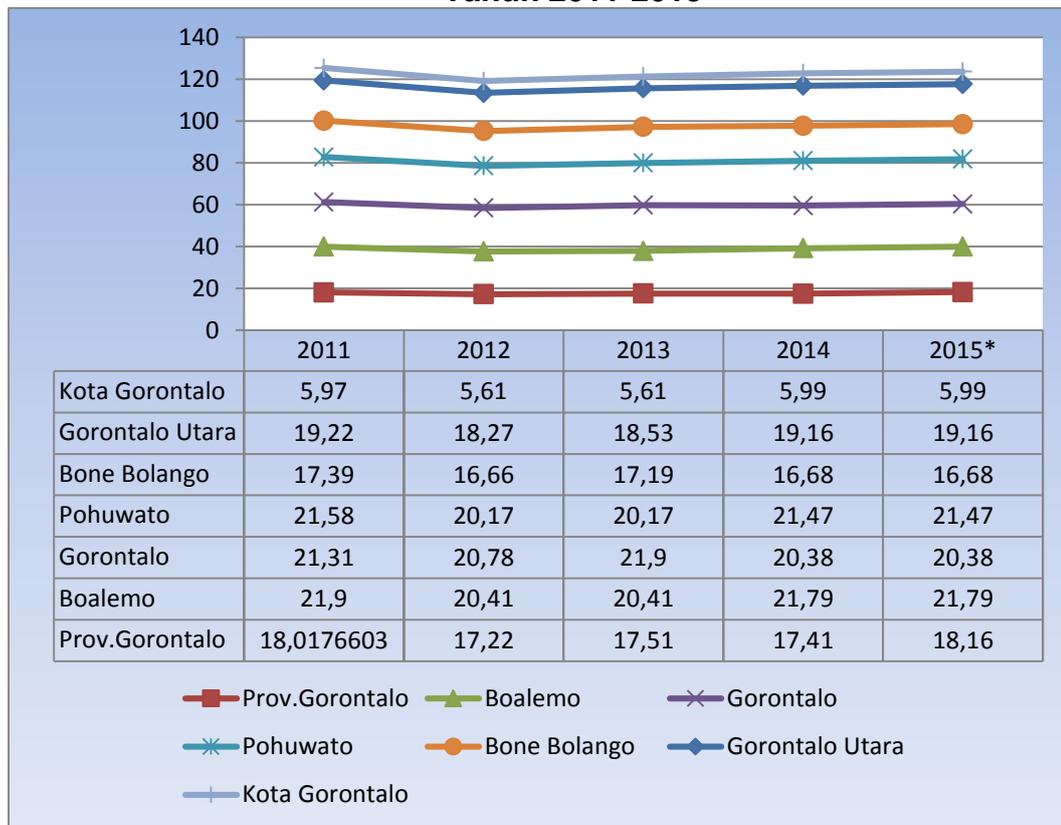
Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan

non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Angka kemiskinan ditargetkan pada tahun 2015 ditargetkan turun sejumlah 0,24% atau menjadi 16,44% dari proporsi penduduk miskin sebesar 16,68% pada tahun 2015.

Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2015 tersebut tidak sesuai target dengan meningkatnya angka garis kemiskinan yang pada setiap tahun mengalami kenaikan akibat faktor-faktor eksternal seperti inflasi pada komoditas bahan makanan dan komponen konsumsi masyarakat lainnya. Menurut data Bank Indonesia, faktor kenaikan bahan bakar minyak dan gas elpiji serta keterbatasan supply beberapa komoditas bahan makanan pokok adalah pemicu utama terjadinya inflasi yang berdampak pada kenaikan angka garis kemiskinan. Selain laju inflasi faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan dikarenakan program yang direncanakan tidak tepat sasaran (berdasarkan hasil temuan BPK)

Beberapa program yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (JAMKESPRA) disamping JAMKESMAS, bantuan RASKIN, bantuan Rumah Layak Huni, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin, bantuan usaha mikro, kecil dan menengah, bantuan ternak dan redistribusi ternak, bantuan benih, pupuk dan alat mesin pertanian, bantuan benih, pakan serta sarana prasarana perikanan, bantuan bagi korban bencana, bantuan usaha perempuan, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program SKPD.

Grafik 2.6.
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kota
Tahun 2011-2015



Sumber data : BPS Bone Bolango

Dilihat dari kemampuan daerah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk Bone Bolango menunjukkan kecenderungan yang positif. Target yang ditetapkan pada akhir tahun 2015 yang diharapkan dibawah 16,44% belum dapat dicapai atau cenderung naik 0,24% menjadi 16,68%. Berdasarkan hasil kajian BPS Kabupaten Bone Bolango, bertambahnya jumlah pengangguran tersebut utamanya disebabkan terjadinya penambahan jumlah penduduk usia kerja yang baru menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA/SMK dan Madrasah Aliyah namun belum terserap oleh dunia usaha.

2.4 Kesejahteraan Sosial dan Layanan Umum

2.4.1 Pendidikan

Beberapa aspek utama yang menjadi parameter utama mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat yakni aspek pendidikan, aspek kesehatan, kepemilikan asset lahan serta kesempatan kerja masyarakat yang dapat menjamin penghidupan masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*

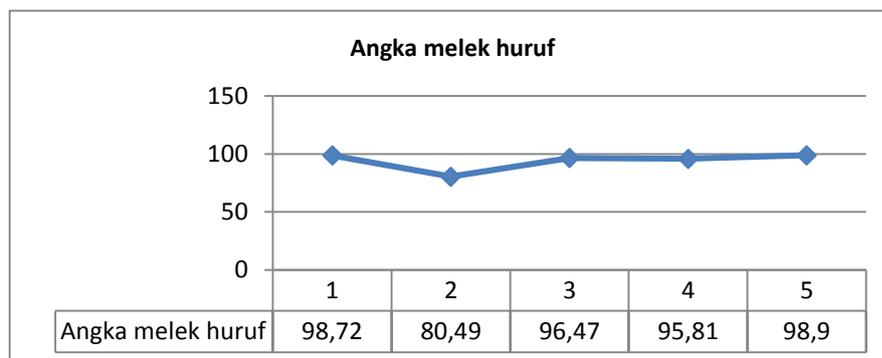
livelihood). Beberapa capaian kinerja pendidikan di Kabupaten Bone Bolango dalam lima tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf penduduk berumur 10 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 relatif sama dengan indeks pendidikan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, pada penduduk berumur 15 tahun keatas, ada 98,9 persen orang yang sudah dapat membaca dan menulis latin. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 yaitu 7,34 tahun atau dengan kata lain sebagian besar penduduk Bone Bolango hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Wajib Belajar 9 Tahun belum tercapai dengan baik.

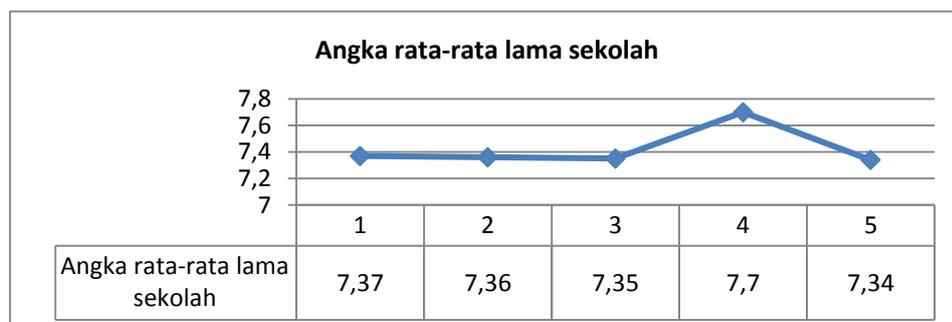
Grafik 2.7.

Angka Melek Huruf Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015



Grafik 2.8.

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kab. Bone Bolango Tahun 2011-2015



2. Angka Partisipasi Kasar

Tingkat partisipasi pendidikan untuk pada semua jenjang pendidikan terus mengalami perbaikan walaupun pada jenjang pendidikan SMP dan SMA masih berada dibawah 100%. Artinya masih cukup besar jumlah anak usia sekolah SMP dan SMA yang belum dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

APK (%)	2011	2012	2013	2014	2015
APK SD	113,29	102,97	100,62	89,22	102,45
APK SMP	73,29	93,35	79,53	74,8	81,45
APK SMA	48,68	68,63	48,91	61,62	70,5

3. Angka Partisipasi Murni

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah **untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah**. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **tabel 2.15** berikut ini.

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

APM	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,27	97,96	96,95	75,70	87,23
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	40,84	50,39	69,66	54,31	52,31

APM	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	30,71	52,76	35,29	51,40	47,62

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi maka euforia akan nampak jelas sekali.

Jika keberhasilan didefinisikan sebagai pencapaian tingkat kelulusan tertinggi (100%), maka setiap sekolah yang mampu mencapai nilai kelulusan 100% bisa dikatakan sebagai sekolah yang berhasil. Logikanya untuk bisa dikatakan sebagai sekolah yang berhasil maka sekolah harus mencapai tingkat kelulusan 100%, jika sebaliknya apabila sekolah tidak mampu mencapai angka kelulusan 100% maka sekolah bersangkutan dikatakan tidak berhasil. Angka Kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada **tabel 2.16** berikut ini.

Tabel 2.16
Angka Pendidikan yang Ditamatkan menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	95,4	100	105,83	100	103
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,45	100	98,8	100	10
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	93,68	99,73	98,8	99,8	98,61

2.4.2 Kesehatan

Beberapa capaian kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Bone Bolango selama lima tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Keadaan saat lahir merupakan faktor penting yang berhubungan signifikan dengan kelangsungan hidup bayi, faktor waktu pemberian ASI pertama kali merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi.

Tabel 2.17.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

Angka kelangsungan hidup bayi	2011	2012	2013	2014	2015
	-16,5	-6,1	-13,8	-13	-13

2. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Harapan hidup berbeda dengan lama hidup.

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya,

di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Tabel 2.18.
Angka Usia Harapan Hidup
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

Angka usia harapan hidup	2011	2012	2013	2014	2015
	70,81	70,81	70,86	70,91	70,96

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.

Pada anak yang memiliki status *gizi buruk* biasanya akan terganggunya pertumbuhan tubuh secara fisik contohnya anak akan beresiko tumbuh kecil (kerdil). Kemudian dalam perkembangan mental anak beresiko mengalami gangguan kontrol emosi dan perasaan.

Banyak faktor yang bisa mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang seimbang, bisa juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna.

Tabel 2.19.
Angka Usia Harapan Hidup
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

Persentase balita gizi buruk	2011	2012	2013	2014	2015
	0,8	0,4	0,4	0,4	0,39

2.4.3 Pertanian

Lahan memiliki arti lebih luas dari pada makna tanah, mengingat tanah hanya merupakan salah satu aspek dari lahan. Dalam hal pemanfaatan lahan, polanya lebih dekat ke arah pendayagunaan dan sekaligus pengaturan fungsi ketatalaksanaan lahan.

Pengertian lahan disini adalah pemanfaatan lahan khususnya sawah dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi sekarang lahan pertanian banyak yang beralih fungsi mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan dalam perkembangan ekonomi (eksternal) serta berlakunya sistem warisan keluarga (internal). Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian dan sekaligus mengurangi pendapatan petani.

Salah satu fenomena yang cukup intens terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah adanya alih fungsi (konversi) lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor nonpertanian akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan.

Luas lahan pertanian di Indonesia semakin lama mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beralihnya kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun pertokoan. Kepemilikan lahan per keluarga tergolong terendah didunia, terutama sawah dan perkebunan.

Lahan pertanian merupakan komponen utama yang diperlukan dalam membangun suatu usaha pertanian. Lahan pertanian yang dimiliki juga harus dalam skala yang luas. Sama halnya dengan ke-enam sub sector usaha pertanian yang mengalami penurunan dalam selang waktu 10 tahun, Data dari BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (2003-2013) juga menunjukkan luas lahan pertanian di Indonesia tetap tidak mengalami peningkatan yaitu 25 juta hectare dari program pemerintah yang mengusahakan lahan pertanian baru seluas 100.000 hectare setiap tahunnya. Masalah luas kepemilikan lahan yang sempit menyulitkan para petani untuk menyangga kehidupan keluarganya. Tipologi skala usaha petani di Indonesia masih kecil sebesar 70% dengan kepemilikan lahan dibawah setengah hektare. Inilah penyebab petani Indonesia enggan keluar dari garis kemiskinan. Pada kenyataannya petani banyak petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh modal dengan cara kredit, terutama petani yang hanya memiliki lahan yang sempit terpaksa menyewakan tanahnya dan mereka memilih menjadi buruh tani

Penyebab utama kemiskinan petani adalah karena kepemilikan lahan yang relatif sempit, atau biasa disebut sebagai petani gurem. Data BPS menunjukkan, rumah tangga petani gurem tahun 2013 sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau

sebesar 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan. Rata-rata mereka memiliki lahan di bawah 0,25 ha. Kondisi kepemilikan lahan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.20.
Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

Persentase penduduk yang memiliki lahan (%)	2011	2012	2013	2014	2015
	NA	NA	NA	0,1	0,1

2.3.5 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 2.21.
Rasio Penduduk yang Bekerja
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

Rasio penduduk yang bekerja	2011	2012	2013	2014	2015
	63,79	56,33	56,9	58,29	NA

2.5 Aspek Pelayanan Umum

2.5.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Beberapa indikator perkembangan kinerja pendidikan lainnya di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, demikian pula untuk APS SMP/MTs;
- Kondisi ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, akan tetapi untuk SMP/MTs mengalami penurunan;
- Meningkatnya kualitas bangunan sekolah serta tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai dapat mewujudkan suasana yang nyaman bagi siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar;
- Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum pendidikan karakter melalui pelaksanaan workshop guru dalam rangka pemantapan pendidikan karakter;
- Meningkatnya layanan pendidikan luar sekolah setara SD, SMP, dan SMA dengan terlaksananya pembelajaran paket A, paket B, dan paket C;
- Meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, melalui workshop dan pembinaan guru lewat forum KKG/MGMP.

Untuk capaian indikator kinerja bidang pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja APM, APK dan APS

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014	Capaian Kinerja 2015
ANGKA PARTISIPASI MURNI						
1	SD/MI/Paket A	95,34 %	97,96 %	96,52 %	79,82%	99,19%

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013	Capaian Kinerja 2014	Capaian Kinerja 2015
2.	SMP/MTs/Paket B	40,84 %	50,39 %	49,65 %	55,11%	78,60%
3.	SMA/MA/Paket C	30,31 %	52,76 %	47,52 %	52,13%	59,48%
ANGKA PARTISIPASI KASAR						
1.	SD/MI/Paket A	114,6 %	102,97 %	100,62 %	91,44 %	107,75 %
2.	SMP/MTs/Paket B	73,29 %	93,35 %	79,53 %	75,91 %	86,16%
3.	SMA/MA/Paket C	48,69 %	93,35 %	47,91 %	62,49 %	86,63%
ANGKA PUTUS SEKOLAH						
1.	SD/MI/Paket A	0,9	1,3	0,40 %	0,37%	0,18%
2.	SMP/MTs/Paket B	0,56 %	1,6 %	0,57 %	0,79%	0,41%
3.	SMA/MA/Paket C	0,69 %	0,52 %	0,89 %	0%	0,17%
ANGKA KELULUSAN						
1.	SD/MI/Paket A	95,4 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	SMP/MTs/Paket B	99,45 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	SMA/MA/Paket C	93,68 %	99,73 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

Banyaknya sekolah yang menampung siswa TK sederajat sebanyak 302 sekolah Sedangkan jumlah sekolah yang dipakai untuk belajar siswa SD sederajat sebanyak 140 sekolah. Jumlah sekolah yang dipakai untuk belajar siswa SMP sederajat sebanyak 44 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah yang dipakai untuk belajar siswa SMA sederajat sebanyak 21 sekolah

Jumlah murid yang masih belajar di tingkat TK sederajat di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 berjumlah 7 844 murid yang diajar oleh 398 orang guru. Sedangkan di tingkat SD sederajat, sejumlah 18,804 murid diajar oleh 1,410 guru, ditingkat SMP sederajat jumlah murid

mencapai 7,523 siswa dengan jumlah pengajar 747 guru, dan pada tingkat SMA sederajat jumlah murid mencapai 6184 siswa dengan diajar oleh 617 orang guru

Tabel 2.23.
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid - Guru TK /Raudhatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) Tahun 2014/2015

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Tapa	10	130	147	277	3	32	35	7
Bulango Utara	9	156	163	319	0	42	42	7
Bulango Selatan	7	140	137	277	1	27	28	9
Bulango Timur	4	62	59	121	4	10	14	8
Bulango Ulu	7	82	92	174	0	15	15	11
Kabila	14	256	293	549	0	46	46	11
Botupingge	7	131	99	230	0	20	20	11
Tilongkabila	12	225	214	439	0	37	37	11
Suwawa	11	180	191	371	1	34	35	10
Suwawa Selatan	5	61	68	129	0	12	12	10
Suwawa Timur	4	59	63	122	0	6	6	20
Suwawa Tengah	5	69	72	141	0	14	14	10
Pinogu	2	25	34	59	0	2	2	29
Bone Pantai	13	160	169	329	0	39	39	8
Kabila Bone	8	128	115	243	8	14	22	11
Bone Raya	4	33	39	72	0	7	7	10
Bone	8	148	151	299	0	22	22	13
Bulawa	7	101	77	178	0	19	19	9
Jumlah	137	2 146	2 183	4 329	17	398	415	10

Tabel 2.24.
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar Negeri (SD) Menurut Kecamatan 2014/2015

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Tapa	8	486	488	1 408	15	59	74	13
Bulango Utara	8	503	416	919	20	60	80	11
Bulango Selatan	7	539	467	1 006	9	70	79	13
Bulango Timur	4	265	207	472	8	31	39	12
Bulango Ulu	6	308	286	594	24	28	52	11
Kabila	15	1 385	1 351	2 736	20	150	170	16
Botupingge	4	351	300	651	8	37	45	14

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
Tilongkabila	9	836	836	1 672	17	84	101	17
Suwawa	8	714	694	1 408	13	65	78	18
Suwawa Selatan	5	370	346	716	14	32	46	16
Suwawa Timur	4	387	310	697	7	34	41	17
Suwawa Tengah	6	379	346	725	11	38	49	15
Pinogu	2	173	136	309	6	12	18	17
Bone Pantai	13	750	813	1 563	31	89	120	13
Kabila Bone	11	701	514	1 315	27	56	83	16
Bone Raya	5	402	378	780	10	36	46	17
Bone	9	661	652	1 313	13	64	77	17
Bulawa	5	357	338	695	9	40	49	14
Jumlah	129	9 567	8 978	18 545	262	985	1 247	15

Tabel. 2.25.
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan 2014/2015

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1. Tapa	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulango Utara	3	148	154	302	13	28	41	7
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bulango Timur	2	394	360	754	9	53	62	12
5. Bulango Ulu	3	102	114	216	6	21	27	8
6. Kabila	2	380	450	830	11	47	58	14
7. Botupingge	1	122	156	278	7	21	28	10
8. Tilongkabila	2	257	219	476	7	37	44	11
9. Suwawa	3	384	407	791	18	62	80	10
10. Suwawa Selatan	2	57	40	97	9	9	18	5
11. Suwawa Timur	2	91	93	184	6	17	23	8
12. Suwawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pinogu	1	52	63	115	9	4	13	9
14. Bone Pantai*)	3	281	257	538	12	19	31	17
15. Kabila Bone	3	193	234	427	14	23	37	12
16. Bone Raya	1	196	194	390	3	9	12	33
17. Bone	3	210	242	452	6	19	25	18
18. Bulawa	1	89	129	218	5	10	15	15
Jumlah	32	2 956	3 112	6 068	135	379	514	12

Tabel 2.26.
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Menurut Kecamatan 2014/2015

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1. Tapa	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulango Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bulango Timur	1	236	321	557	12	28	40	14
5. Bulango Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kabila	1	353	593	946	17	36	53	18
7. Botupingge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tilongkabila	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Suwawa	2	332	380	712	20	29	49	14
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Suwawa Timur	1	60	54	114	6	11	17	7
12. Suwawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pinogu	1	8	5	13	1	0	1	13
14. Bone Pantai	1	225	281	506	13	15	28	18
15. Kabila Bone	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bone Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bone	1	120	145	265	7	8	15	17
18. Bulawa	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	8	1334	1779	3113	76	127	203	15

Tabel. 2.27.
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Menurut Kecamatan

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1. Tapa	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bulango Utara	1	210	222	432	16	24	40	11
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bulango Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bulango Ulu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kabila	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Botupingge	1	200	205	405	13	25	38	11
8. Tilongkabila	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Suwawa	1	518	404	922	17	40	57	16
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Suwawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID			GURU			RASIO MURID-GURU
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
12. Suwawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Pinogu	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bonepantai	1	87	64	151	7	13	20	8
15. Kabila Bone	1	13	17	30	9	6	15	2
16. Bone Raya	1	116	152	268	6	10	16	17
17. Bone	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bulawa	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	6	1144	1064	2208	68	118	186	12

Tabel 2.28.
Angka Putus Sekolah tahun 2011 - 2015

ANGKA PUTUS SEKOLAH	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,3	0,4	0	2,44	0,18
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,6	0,49	0,38	0,79	0,14
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,52	0,61	0,94	1,82	0,17

Capaian kinerja peningkatan mutu tenaga pendidik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29.
Jumlah Guru yang telah memiliki Izajah S1

Jenjang sekolah	Jumlah guru yang memiliki ijazah s1 thn 2014	Jumlah guru yang memiliki ijazah s1 thn 2015	Persen
SD/MI	699	788	1,12
SLTP/MTs	133	538	4,04
SMA/MA	325	419	1,28
Jumlah	1.157	1.745	1,50

Berdasarkan data diatas diperoleh ada kenaikan guru yang memiliki kompetensi S1 dan bersertifikasi pada tahun 2015 berjumlah 1.745 orang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.157 orang.

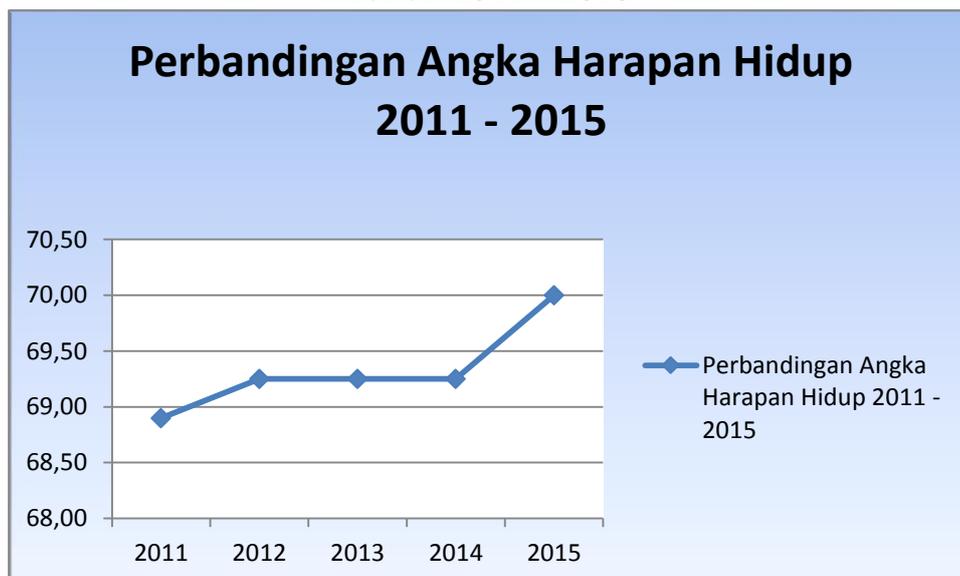
B. Pelayanan Kesehatan

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus di ikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, mencakup gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator/ penilaian derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia didunia.

Target indikator kinerja utama yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 69,25% dengan realisasi 70,7% dengan kinerja pencapaian sebesar 102,09% dengan kategori **Sangat Baik**.

Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia didunia. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator kinerja utama yang pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mencapai 70,7%.

Grafik 2.9
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Tahun 2011 – 2015



Ada beberapa hal yang menyebabkan indikator penurunan / peningkatan kinerja angka harapan hidup adalah sebagai berikut :

a. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium. Angka kematian ibu melahirkan merupakan satu indikator kinerja keberhasilan daerah dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2015 angka kematian ibu melahirkan ditargetkan sebesar 102 orang per 100.000 kelahiran dengan realisasi sebesar 374 per 100.000 kelahiran dengan jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 33 orang. Penyebab Angka Kematian Ibu Melahirkan disebabkan karena beberapa kinerja pencapaian SPM seperti yang diuraikan dibawah ini yakni Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 21,56% dengan target 92% sehingga kinerja pencapaian sasaran sebesar 23,44%

b. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita pada tahun 2015 ditargetkan 16,2 per 1000 KLH. Berdasarkan data diperoleh realisasi sebesar 11,23 per 1000 KLH atau 13 Balita meninggal dari 17.541 KLH. Berdasarkan data di atas diperoleh kinerja sebesar 186,9%.

Adapun program-program yang telah menunjang untuk meningkatkan kinerja angka harapan hidup adalah

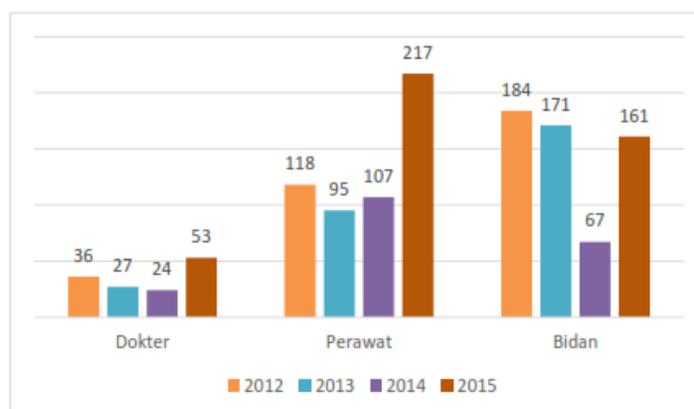
- a. Kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, serta mendapatkan 90 tablet Fe selama periode kehamilannya
- b. mengoptimalkan kinerja petugas BPLKB dalam memantau serta melakukan pelayanan bagi ibu hamil, pelayanan KB dan anak Balita
- c. Pemberian Vitamin A serta nutrisi bagi BALITA
- d. Mengoptimalkan Pos layanan pengaduan cepat (quick respon) melalui SMS center di Dinas Kesehatan.

Adapun program yang sangat efektif untuk dilakukan kedepan untuk menaikan angka harapan hidup sesuai dengan target yang ditetapkan adalah

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas dengan melakukan pemantauan, monitoring terhadap kinerja layanan terhadap BALITA melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas perkembangan kinerja pelayanan bagi anak BALITA baik ditingkat masyarakat, pelayanan di puskesmas dan koordinasi ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional
- b. Mengoptimalkan koordinasi dengan Pihak pemerintah desa dan kecamatan setempat untuk mengoptimalkan layanan SMS Center.
- c. *Sarana Kesehatan dan SDM Kesehatan*

Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 terdiri dari 2 unit Rumah Sakit yang dibantu oleh 20 unit Puskesmas. Tenaga medis dan paramedis adalah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Dengan bantuan mereka akan sangat menolong dalam penanganan kesehatan masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah tenaga medis adalah 288 orang terdiri dari 53 dokter, 71 perawat, 153 bidan, dan 11 farmasi. Sedangkan banyaknya tenaga non-medis adalah sebanyak 113 orang.

Grafik 2.10.
Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bone Bolango, 2012 - 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
Source : Health Service of Bone Bolango Regency

Tabel 2.30.
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Di Kabupaten Bone Bolango

TAHUN	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT BERSALIN	PUSKESMAS	POSYANDU	KLINIK KESEHATAN	POLIN DES	POSKESDES
2012	2	0	19	217	3	--	87
2013	2	0	20	198	5	1	101
2014	2	0	20	206	5	2	108
2015	2	0	20	206	5	1	109

Tabel 2.31.
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Dan Sarana Yankes
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

UNIT KERJA	DOKTER	PERAWAT	BIDAN	FARMASI
Puskesmas Tapa	3	5	1	0
Puskesmas Kabila	2	5	11	0
Puskesmas Tilongkabila	0	4	4	0
Puskesmas Toto Utara	1	5	4	0
Puskesmas Bulango Utara	1	3	6	0
Puskesmas Bulango Selatan	1	6	9	0
Puskesmas Bulango Timur	1	3	3	0
Puskesmas Bulango Ulu	1	3	6	1
Puskesmas Suwawa	1	1	5	1
Puskesmas Ulantha	0	0	4	0
Puskesmas Suwawa Timur	3	2	10	0
Puskesmas Suwawa Selatan	1	2	9	0
Puskesmas Suwawa tengah	1	2	3	0
Puskesmas Botupingge	1	5	5	0
Puskesmas bone	2	0	11	0
Puskesmas Tombulilato	2	3	9	0
Puskesmas bone pantai	2	3	12	0
Puskesmas Bulawa	2	2	10	0
Puskesmas kabila Bone	2	0	11	0
Puskesmas pinogu	1	1	5	0
RSUD Toto Kabila	12	52	19	6
RSUD Tombulilato*)	-	-	-	-
KAB. BONE BOLANGO	24	107	67	8

Sumber : Dinas Kesehatan Bone Bolango

C. Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Prasarana Perdagangan

Kegiatan koperasi dan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapatan dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.32
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dirinci per Kecamatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	KUD	KPN	KSU	KSP	KO PER TA	KOP WAN	KOP KON	KOP PRO	KOPPE PABRI	KOPP ONTRE N	JUM LAH
1. Tapa	1	3	4	2	0	0	0	0	0	1	11
2. Bulango Utara	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4
3. Bulango Selatan	0	0	5	3	3	0	0	0	0	0	11
4. Bulango Timur	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5. Bulango Ulu	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
6. Kabila	1	4	10	6	3	0	1	0	1	0	26
7. Botupingge	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	7
8. Tilongkabila	1	1	10	2	3	0	0	1	0	0	19
9. Suwawa	0	2	6	2	3	1	0	0	0	0	13
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11. Suwawa Timur	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2
12. Suwawa Tengah	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0	6
13. Pinogu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
14. Bone Pantai	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6
15. Kabila Bone	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	6
16. Bone raya	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
17. Bone	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
18. Bulawa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kab. Bone Bolango	8	12	53	25	17	3	2	2	2	2	123
2014	5	12	51	24	15	3	2	2	2	2	121

Keterangan :

KUD : Koperasi Unit Desa, KSP : Koperasi Simpan Pinjam, KOPKON : Koperasi Konsumen

KPN : Koperasi Pegawai Negeri, KOPWAN : Koperasi Wanita, KOPPRO : Koperasi Produsen

KSU : Koperasi Serba Usaha, KOPERTA : Koperasi Tani, KOP.PEPABRI : Koperasi Purn. ABRI

KOPPONTREN : Koperasi Pondok Pesantren.

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bone Bolango

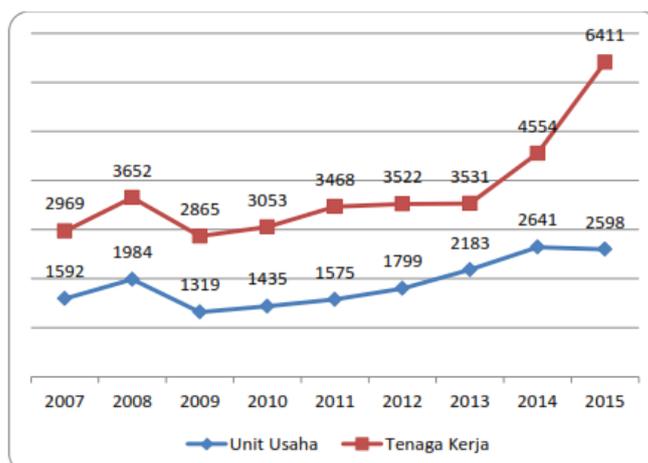
Tabel 2.33.
Perkembangan UMKM Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2012 – 2015

UMKM	2012	2013	2014	2015
- Usaha Mikro	14,200	15,609	17,261	19,499
- Usaha Kecil	297	397	428	448
- Usaha Menengah	55	76	83	88
JUMLAH	14,552	16,082	17,772	20,035

Tabel 2.34.
Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2012 – 2015

UMKM	2012	2013	2014	2015
- Usaha Mikro	1,409	1,652	2,238	2,591
- Usaha Kecil	96	31	20	20
- Usaha Menengah	21	7	5	5
JUMLAH	1,526	1,690	2,263	2,616

Grafik 2.11.
Perkembangan Sektor Industri
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 - 2015



Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil, dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango

Tabel. 2.35.
Perkembangan Sektor Industri
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2008 - 2014

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)
2007	1 592	2 969
2008	1 984	3 652
2009	1 319	2 865
2010	1 435	3 053
2011	1 575	3 468
2012	1 799	3 522
2013	2 183	3 531
2014	2 641	4 554
2015	2 598	6 411

D. Prasarana Perdagangan

Tabel. 2.36.
Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	PASAR			JUMLAH
	IMPRES	NON IMPRES	BANGDES	
1. Tapa	1	0	1	2
2. Bulango Utara	0	0	2	2
3. Bulango Selatan	0	0	0	0
4. Bulango Timur	0	0	1	1
5. Bulango Ulu	0	0	1	1
6. Kabila	1	0	1	2

KECAMATAN	PASAR			JUMLAH
	IMPRES	NON IMPRES	BANGDES	
7. Botupingge	1	0	0	1
8. Tilongkabila	0	0	1	1
9. Suwawa	1	0	1	2
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0
11. Suwawa Timur	0	0	1	1
12. Suwawa Tengah	1	0	0	1
13. Pinogu	1	0	0	1
14. Bone Pantai	0	0	2	2
15. Kabila Bone	0	0	1	1
16. Bone raya	0	0	1	1
17. Bone	1	0	0	1
18. Bulawa	0	0	1	1
Kab. Bone Bolango	7	0	14	21
2014	7	0	15	22

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango

Tabel 2.37.
Jumlah Pasar, toko dan Kios Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	PASAR	TOKO		KIOS
		PERMANEN	NON PERMANEN	
1. Tapa	2	0	35	6
2. Bulango Utara	2	0	0	4
3. Bulango Selatan	0	0	0	42
4. Bulango Timur	1	0	0	20
5. Bulango Ulu	1	0	0	3
6. Kabila	2	0	0	107
7. Botupingge	1	0	0	337
8. Tilongkabila	1	0	0	37
9. Suwawa	2	0	0	18
10. Suwawa Selatan	0	0	0	42
11. Suwawa Timur	1	0	0	11
12. Suwawa Tengah	1	0	0	10
13. Pinogu	1	0	0	7
14. Bone Pantai	2	0	14	29
15. Kabila Bone	1	0	9	83
16. Bone raya	1	0	7	46
17. Bone	2	0	9	83

KECAMATAN	PASAR	TOKO		KIOS
		PERMANEN	NON PERMANEN	
18. Bulawa	1	0	8	61
Kab. Bone Bolango	22	0	82	946
2013	22	0	0	73

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango

E. Aparatur Pemerintahan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango mencatat Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango berjumlah 4.235 pegawai, dengan komposisi 1.518 pegawai laki-laki dan 2.717 pegawai perempuan. Dilihat dari pendidikan terakhir terbanyak yang ditamatkan adalah Diploma IV/S1 sebanyak 46,26 persen, sedangkan yang tamat S2 hanya 3,40 persen.

Tabel . 2.38.
Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango, 2015

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	16	2	18
SMP	18	9	27
SMA	436	692	1 131
SMK	119	139	258
DI/ Diploma 1	38	127	165
DII/ Diploma 2	33	94	165
DIII/ Diploma 3	175	489	664
S1	700	1 259	1 959
S2	102	42	144
S3	0	0	0
Jumlah/ Total	1 518	2 717	4 235

Sumber: Badan Kepegawaian dan DIKLAT
Kabupaten Bone Bolango

F. Pertanian

Berdasarkan Data BPS (2015) Bone Bolango memiliki luas lahan pertanian sebesar 2.053,40 Ha. Menurut pengairannya, sebagian besar sawah menggunakan sistem irigasi teknis yaitu mencapai 93,31 persen. Pada tahun 2015, produksi padi sawah yang tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 27 568,48 ton.

Tabel 2.39.
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Bone Bolango

KECAMATAN	TEKNIS	SETENGAH TEKNIS	SEDERHANA	TADAH HUJAN	LAINNYA
1. Tapa	23,90	--	--	--	--
2. Bulango Utara	25,00	--	--	--	--
3. Bulango Selatan	331,00	--	--	--	--
4. Bulango Timur	219,00	--	--	--	--
5. Bulango Ulu	--	--	--	--	--
6. Kabila	553,00	--	--	--	--
7. Botupingge	--	--	--	--	--
8. Tilongkabila	756,50	--	--	--	--
9. Suwawa	145,00	--	--	--	--
10. Suwawa Selatan	--	--	--	--	--
11. Suwawa Timur	--	--	--	--	--
12. Suwawa Tengah	--	--	--	--	--
13. Pinogu	--	125,00	--	--	--
14. Bone Pantai	--	--	--	--	--
15. Kabila Bone	--	--	--	--	--
16. Bone raya	--	--	--	--	--
17. Bone	--	--	--	--	--
18. Bulawa	--	--	--	--	--
Kab. Bone Bolango	2 053,40	125,00			
2014	1252	96.1	42.7	27	--

Tabel 2.40.
**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, 2014 - 2015**

KECAMATAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
	LUAS PANEN	PRO DUKSI	PRODUK TIFITAS	LUAS PANEN	PRO DUKSI	PRODUK TIFITAS
1. Tapa	46,7	74,24	53	50,00	290,00	58,00
2. Bulango Utara	48	238	46,7	72,00	439,20	61,00
3. Bulango Selatan	660	4 000,52	58,9	990,00	5 541,48	55,97
4. Bulango Timur	438	2 454,00	55	438,00	2 847,00	65,00
5. Bulango Ulu	16	80	50	--	--	--
6. Kabila	1 103,20	6 250,10	55,42	1 104,00	7 176,00	65,00

KECAMATAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
	LUAS PANEN	PRO DUKSI	PRODUK TIFITAS	LUAS PANEN	PRO DUKSI	PRODUK TIFITAS
7. Botupingge	--	--	--	--	--	--
8. Tilongkabila	--	--	--	1 435,80	9 472,80	65,98
9. Suwawa	236	1 416,00	60	222,00	1 332,00	60,00
10. Suwawa Selatan	--	--	--	--	--	--
11. Suwawa Timur	--	--	--	--	--	--
12. Suwawa Tengah	--	--	--	--	--	--
13. Pinogu	--	--	--	100,00	470,00	47,00
14. Bone Pantai	--	--	--	--	--	--
15. Kabila Bone	--	--	--	--	--	--
16. Bone raya	--	--	--	--	--	--
17. Bone	--	--	--	--	--	--
18. Bulawa	--	--	--	--	--	--
Jumlah	2 547,90	14 512,86	47,38	4 411,80	27 568,48	62,49

G. Perikanan dan Kelautan

Perkembangan capaian kinerja di sektor perikanan dan kelautan selang 3 (tiga) tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Data Produksi Perikanan Tangkap
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Jumlah Produksi (ton)
1	2011	12.131
2	2012	12.761
3	2013	13.437
4	2014	13.840,50
5	2015	7.725

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango, 2015

Tabel 2.42.
Data Produksi Peralatan Tangkap (dalam ton)
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015

NO	Jenis Peralatan Tangkap	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pukat Cincin	6.547,1	6.789,6	7.453,8	NA	36
2.	Jaring Insang Tetap	56,4	57,9	55,7	NA	-
3.	Sekor	508,8	585	551,7	571,9	4,35
4.	Pancing Ulur	3.655,5	3.964,1	3896,4	NA	1.136
5.	Pancing Tegak	1.363,2	1.364,9	1479,7	NA	-

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango, 2015

Tabel 2.43.
Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI Menurut Jenis Ikan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013–2015

No	Jenis Ikan	2013		2013		2015	
		Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp,-)
1.	Layang	3.015,5	16.162.292	3.115,4	16.743.273	3151,0	17.206.121
2.	Selar	2.820,6	14.102.895	2.906,2	14.581.212	2.926,1	14.630.772
3.	Tongkol	2.072,4	11.111.252	2.143,7	11.528.237	2.173,9	11.870.847
4.	Cakalang	2.072,2	14.526.443	2.146,7	15.065.350	2.175,6	15.229.072
5.	Tenggiri	194,9	1.435.697	209,2	1.543.384	224,8	1.672.265
6.	Ikan Terbang	22,2	66.687	24	71.998	27,2	81.440
7.	Julung-julung	16,7	50.015	18	53.998	3151,0	17.206.121
8.	Ikan Kuwe	584,5	4.675.682	627,6	4.992.750	20,4	61.080
9.	Cumi-cumi	551,7	4.544.354	571,9	4.544.354	674,4	5.395.489
10.	Tuna lainnya	370,8	7.413.271	386,2	7.472.011	589,5	4.886.232
11.	Madidihang	1.109	22.179.486	1.061,3	21.851.544	465,1	9.304.998

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango, 2015

Tabel. 2.44.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut
Berdasarkan Kepemilikan Sarana Penangkap Ikan 2011– 2015

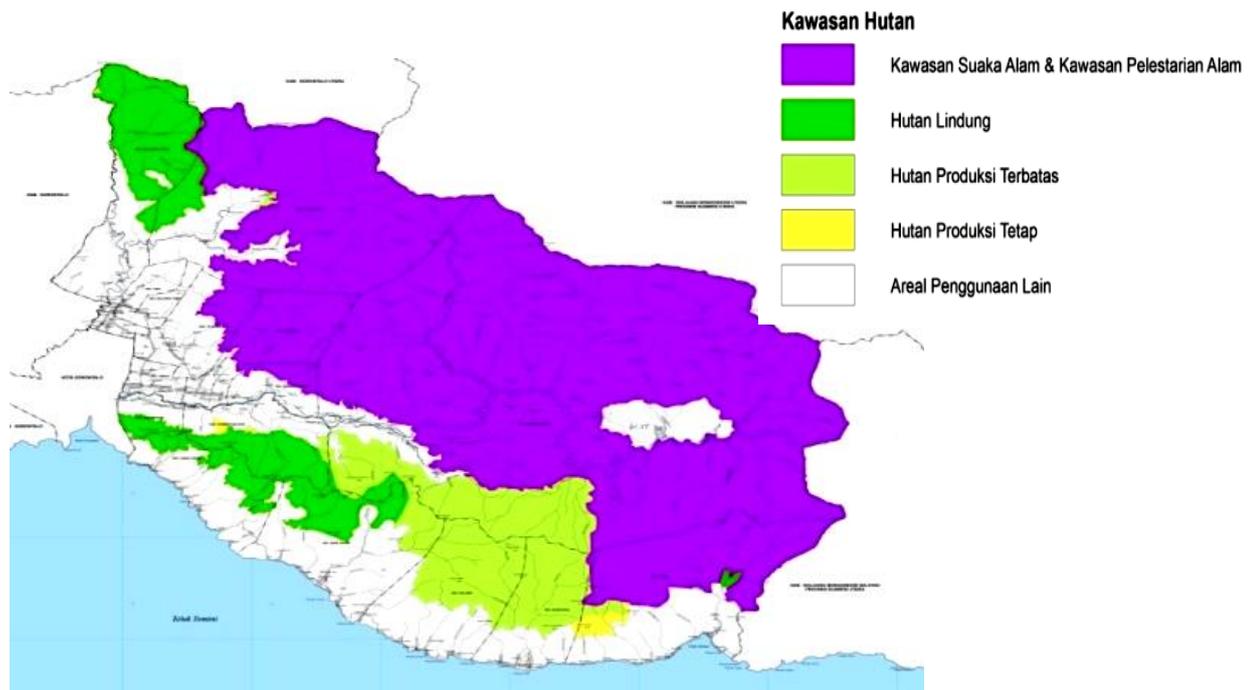
NO	Jenis Rumah Tangga Perikanan Laut (RTP)	2011	2012	2013	2014	2015
1.	RTP Tanpa Perahu	NA	NA	NA	NA	-
2.	RTP Perahu Tanpa Motor	212	212	112	62	157
3.	RTP Perahu/Motor Tempel	1.193	1.193	1.293	1.343	1.402
4.	RTP Kapal Motor	13	14	17	18	6

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

H. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

Gambar. 2.4.
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bone Bolango



Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan. Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi. Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango 140.098,40 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Perkembangan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2011 s/d 2015

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Hutan Lindung	15.718,25	15.718,25	25.490,09	21.177,35	15.718,25
3	Hutan Produksi Terbatas	18.803,29	18.803,29	18.829,35	18.829,35	18.803,29
4	Hutan Produksi Tetap	836,45	836,45	835,85	835,85	836,45
5	Hutan Produksi Konversi	NA	NA	NA	NA	NA
6	Hutan Taman Nasional	104.740,1	104.740,1	104.893,7	104.893,7	104.904,72

Sumber Data: BPKH Wil XVI Gorontalo, (SK Mentri Kehutanan Nomor 325/Menhut/II/2010)

Tabel 2.46.
Produksi Hasil Hutan Non HPH di Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2011 s/d 2015

Produksi Hasil Hutan	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Kayu Bulat	M ³	134,13	134,13	83,40	17,05	-
2. Kayu Gergajian	M ³	NA	NA	NA	NA	-
3. Kayu Olahan	-	NA	NA	68,64	14,03	-
4. Hasil Hutan Ikutan	-	NA	NA	NA	NA	-
5. Damar	-	NA	NA	NA	NA	-
6. Rotan	TON	58,05	45	145	215	-
7. Gondorukem	-	NA	NA	NA	NA	3
8. Kayu Jati	-	NA	NA	NA	NA	-
9. Terpentin	-	NA	NA	NA	NA	-

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 2.47.
Luas Lahan Kritis, Reboisasi dan Penghijauan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 s/d 2015

No.	Jenis Lahan	Luas lahan per tahun (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Lahan Kritis	105,666	105,666	48.483	48.483	48.483
2.	Lahan Reboisasi	250	500	2.871	2.871	150
3.	Lahan Penghijauan	287	305	1.622	1.797	60
4.	Kebakaran Hutan	2,40	5	NA	10	556,27

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango

I. Perkebunan

Tabel. 2.48.
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, 2015

KECAMATAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
	LUAS PANEN	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS	LUAS PANEN	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS
1. Tapa	132	538,2	40,57	110,0	582,0	52,91
2. Bulango Utara	339	1 397,20	41,22	320,0	1 600,0	50,00
3. Bulango Selatan	2	10	49,33	46,0	220,8	48,00
4. Bulango Timur	270	1 090,00	40	--	--	--
5. Bulango Ulu	685	3 460,00	50,5	940,0	5 076,0	54,00
6. Kabila	134	597,7	43	34,0	184,0	54,12
7. Botupingge	27	108	40	36,0	128,0	35,56
8. Tilongkabila	128	153,06	11,96	156,0	780,0	5,00
9. Suwawa	114,53	533	46,56	155,0	17,2	1,11
10. Suwawa Selatan	206	765	37,63	214,0	908,4	42,45
11. Suwawa Timur	90	414,5	47,57	174,0	870,0	50,00
12. Suwawa Tengah	35	149,1	42	24,0	125,0	52,08
13. Pinogu	--	--	--	--	--	--
14. Bone Pantai	50	150	30	115,0	605,0	52,61
15. Kabila Bone	--	--	--	--	--	--
16. Bone raya	83	356,9	43	86,0	413,0	48,02
17. Bone	115	489,21	42,3	68,0	326,0	47,94
18. Bulawa	100	443,1	44,1	45,0	216,0	48,00
Kab. Bone Bolango	2 510,53	10 654,97	40,61	2 532,0	12 051,4	47,77

J. Peternakan

Tabel 2.49.
Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	TAHUN 2014				TAHUN 2015			
	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KUDA	KAMBING	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KUDA	KAMBING
1. Tapa	0	886	10	138	--	933	10	138
2. Bulango Utara	0	1 792	36	251	--	1 891	36	251
3. Bulango Selatan	0	2 196	37	51	--	2 291	37	51
4. Bulango Timur	0	1 139	18	84	--	1 229	18	84
5. Bulango Ulu	0	1 245	6	58	--	1 345	6	58
6. Kabila	0	2 249	51	319	--	2 436	51	329

KECAMATAN	TAHUN 2014				TAHUN 2015			
	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KUDA	KAMBING	SAPI PERAH	SAPI POTONG	KUDA	KAMBING
7. Botupingge	0	953	2	6	--	1 009	2	36
8. Tilongkabila	0	6 247	14	606	--	6 532	14	606
9. Suwawa	1	2 312	9	240	1	2 434	9	240
10. Suwawa Selatan	0	496	0	102	--	617	--	102
11. Suwawa Timur	0	1 398	0	92	--	1 479	--	92
12. Suwawa Tengah	0	437	0	71	--	440	--	71
13. Pinogu	0	472	7	0	--	484	7	--
14. Bone Pantai	0	1 534	0	592	--	1 576	--	622
15. Kabila Bone	0	1 164	0	1 055	--	1 174	--	1 055
16. Bone raya	0	401	17	520	--	434	17	520
17. Bone	0	802	0	282	--	810	--	282
18. Bulawa	0	520	2	509	--	600	30	509
Jumlah	1	26 243	209	4 976	1	27 714	237	5 046

Tabel 2.50.
Populasi Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK
1. Tapa	5 110	0	22 800	37	5 110	--	22 800	37
2. Bulango Utara	13 100	0	16 600	3	13 100	--	16 600	3
3. Bulango Selatan	9 655	75	15 500	98	9 655	75	15 500	98
4. Bulango Timur	7 436	28 500	31 500	55	7 436	28 500	31 500	55
5. Bulango Ulu	6 832	0	0	110	6 832	--	--	110
6. Kabila	29 384	300	23 000	3 525	29 384	300	23 000	3 525
7. Botupingge	8 536	1 700	37 000	1 081	8 536	1 700	37 000	1 081
8. Tilongkabila	40 732	57 620	23 000	2 961	40 732	57 620	23 000	2 961
9. Suwawa	11 943	47 000	22 000	2 144	11 943	47 000	22 000	2 384
10. Suwawa Selatan	4 819	0	4 750	9	4 819	--	4 750	9
11. Suwawa Timur	2 296	0	0	45	2 296	--	--	45
12. Suwawa Tengah	6 021	0	0	18	6 021	--	--	18
13. Pinogu	1 859	0	0	0	1 858	--	--	--
14. Bone Pantai	6 280	0	0	50	6 280	--	--	50
15. Kabila Bone	3 620	0	0	39	3 620	--	23 000	39
16. Bone raya	2 986	125	195	48	2 986	125	195	48
17. Bone	3 654	0	0	74	3 654	--	--	74
18. Bulawa	3 764	0	0	4	3 764	--	--	4
Kab. Bone Bolango	168 026	135 320	196 345	10 301	168 026	135 320	219 345	10 541

Tabel. 2.51.
Jumlah Ternak Sapi yang Dipotong di RPH dan diluar RPH yang Dilaporkan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 – 2015

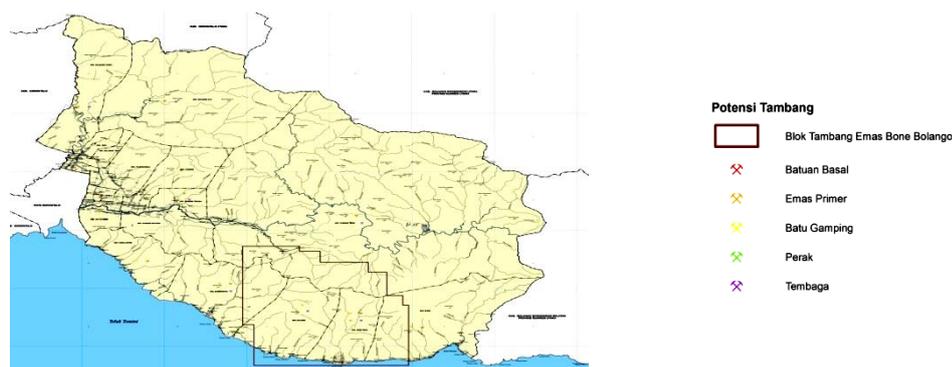
No.	TAHUN	Jumlah Ternak Sapi yang Dipotong (ekor)
1.	2013	3.047 ekor
2.	2014	2.494 ekor
3.	2015	1.474 ekor

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone Bolango

K. Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango. Potensi tambang mineral logam dan galian C tersebar pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango. Demikian pula potensi energy baik berupa energi panas bumi, energi sumber yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya air serta energy baru dan terbarukan lainnya.

Gambar. 2.4.
Peta Potensi Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Dok. RTRW Kabupaten Bone Bolango 2011

Potensi pertambangan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel

Tabel. 2.52.
Potensi Pertambangan Non Logam
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Tambang	Potensi Non Logam
		2015
1.	Granit (Ton)	
2.	Andesit (Ton)	62.500.000
3.	Batu Gamping ((Ton)	67.000.000
4.	Sirtu (Ton)	24.600.880

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

Tabel. 2.53.
Potensi Pertambangan Logam
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

No.	Jenis Tambang	Lokasi (Kec/ Desa)	Potensi (Ton)
1.	Emas	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	3.2
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Tulabolo	119.310
		Kecamatan Bone Raya Desa Tombulilato Kiri	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	119.310
		Kecamatan Suwawa Timur Kayubulan	119.310
2.	Tembaga	Kecamatan Suwawa Tengah Desa Tapadaa	232,200
		Kecamatan Suwawa Timur Desa Kayubulan	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Motomboto	1891,500
		Kecamatan Suwawa Timur Sungai Mak	1891,500
		Kecamatan Bonepantai Cabang Kiri	1891,500

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

Perkembangan potensi sumber energi yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango yakni:

Tabel. 2.54.
Perkembangan Potensi Sumber Energi
di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Sumber Daya Energi	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Jumlah Sumber Daya Energi (unit)
1.	PLTA	Suwawa Timur	-
2.	PLTU	Kecamatan Kabila Bone	
3.	GEOTERMAL	Suwawa Tengah Suwawa Selatan	
4.	PLTD	-	-
5.	PLTS	Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo Barat, - Desa Tulabolo Timur, - Desa Pinogu - Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Selatan - Desa Molintogupo - Desa Bulontala Kecamatan Suwawa Tengah - Desa Tapadaa Kecamatan Kabila Bone - Desa Biluango - Desa Olele Kecamatan Tilongkabila - Desa Tunggulo Kecamatan Bone Pantai -Desa Pelita Hijau	100 Unit 145 Unit 450 Unit 71 Unit 1 Unit 45 Unit 71 Unit 50 Unit 50 Unit 48 Unit -
6.	PLTMH	Kecamatan Bulango Ulu - Desa Owata Kecamatan Bulango Timur - Desa Kopi Kecamatan Suwawa Timur - Desa Tulabolo (Piko Hydro)	1 Unit 1 Unit 15 Unit

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango

L. Pariwisata

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata yang sangat besar khususnya wisata yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain berupa wisata alam Lombongo, Taman Nasional, Wisata Pantai dan Wisata taman laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking* dan *Climbing* serta *Arung Jeram /Susur Sungai*). Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan peluang besar untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Tabel. 2.55.
Daftar Obyek Daya Tarik Wisata Di Provinsi Gorontalo

NO	NAMA OBYEK	JENIS OBYEK	LOKASI
	KABUPATEN BONE BOLANGO		
1	Air Terjun Taludaa	Wisata alam	Desa Taludaa Kec. Bone Pantai
2	Taman Laut Olele	Wisata bahari	Desa Olele Kec. Kabila Bone
3	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Wisata alam	Kec. Suwawa Timur
4	Air Terjun Lombongo I dan II	Wisata alam	Desa Lombongo, Kec. Suwawa Timur
5	Danau Perintis	Wisata alam	Kec. Suwawa
6	Makam Raja-raja Atinggola	Wisata sejarah	Desa Dunggala Kec. Tapa
7	Kebun Binatang Mana Suka	Wisata buatan	Kec. Kabila

Tabel. 2.56.
Jenis Sarana Wisata, Seni dan Budayadi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 – 2015

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata			Jumlah Sanggar Seni dan Budaya
	Wisata Alam	Wisata Bahari	WisataBudaya Sejarah	
2011	1	3	3	6
2012	1	3	3	6
2013	8	4	4	6
2014	8	4	4	6
2015	6	4	4	2

Sumber Data : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kominfo Kab. Bone Bolango

Tabel. 2.57.
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Setiap Obyek Wisata di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

No	Jenis Obyek Wisata	Lokasi (Kec. & Desa)	Jumlah Kunjungan 2015
1.	Wisata Alam Lombongo	Desa Lombongo Kec. Suwawa	9.500
2.	Wisata Bahari Olele	Desa Olele Kec. Kabila Bone	7.500
3.	Wisata Budaya Makam Raja Atinggola	Desa Dunggala Kec. Tapa	-
4.	Wisata Bahari Botutonuo	Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone	14.000
	Jumlah		31.000

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango

M. Pelayanan Perdagangan

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo sebagai Pusat Ekonomi Provinsi Gorontalo, perassnan wilayah Bone Bolango sangat berpengaruh untuk menjadi penyangga pertumbuhan wilayah Provinsi Gorontalo. Disamping sebagai wilayah pensuplai komoditas ekonomi juga berperan sebagai pasar bagi komoditas kebutuhan primer. Oleh karena itu, ketersediaan prasarana perdagangan merupakan prasyarat utama bagi wilayah Bone Bolango sebagai penyangga perekonomian wilayah. Perkembangan jasa perdagangan di Kabupaten Bone Bolango tergambarkan melalui perkembangan sarana prasarana perdagangan yang menunjang mobilitas ekonomi masyarakat, yakni sebagai berikut:

Tabel. 2.58.
Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kecamatan
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	PASAR			JUMLAH	PASAR			JUMLAH
	INPRES	NON IMPRES	BANGDES		INPRES	NON IMPRES	BANGDES	
1. Tapa	1	0	1	2	1	0	1	2
2. Bulango Utara	0	0	2	2	-	0	2	2
3. Bulango Selatan	0	0	0	0	-	0	0	-
4. Bulango Timur	0	0	1	1	-	0	1	1
5. Bulango Ulu	0	0	1	1	-	0	1	1
6. Kabila	1	0	1	2	1	0	1	2
7. Botupingge	1	0	0	1	1	0	0	1
8. Tilongkabila	0	0	1	1	-	0	1	1
9. Suwawa	1	0	1	2	1	0	1	2
10. Suwawa Selatan	0	0	0	0	-	0	0	-
11. Suwawa Timur	0	0	1	1	-	0	1	1
12. Suwawa Tengah	1	0	0	1	1	0	0	1
13. Pinogu	1	0	0	1	1	0	0	1
14. Bone Pantai	0	0	2	2	-	0	2	2
15. Kabila Bone	0	0	1	1	-	0	1	1
16. Bone raya	0	0	1	1	-	0	1	1
17. Bone	1	0	1	2	1	0	0	1
18. Bulawa	0	0	1	1	-	0	1	1
Kab. Bone Bolango	7	0	15	22	7	0	14	21

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango

Tabel. 2.59.
Jumlah Pasar, toko dan Kios Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

KECAMATAN	TAHUN 2014				TAHUN 2015			
	PASAR		TOKO	KIOS	PASAR		TOKO	KIOS
	PER MANEN	NON PERMANEN			NON PERMANEN	PERMANEN		
1. Tapa	2	0	35	6	2	0	35	6
2. Bulango Utara	2	0	0	4	2	0	0	4
3. Bulango Selatan	0	0	0	42	-	0	0	42
4. Bulango Timur	1	0	0	20	1	0	0	20
5. Bulango Ulu	1	0	0	3	1	0	0	3
6. Kabila	2	0	0	107	2	0	0	107
7. Botupingge	1	0	0	337	1	0	0	337
8. Tilonkabila	1	0	0	37	-	0	0	37
9. Suwawa	2	0	0	18	2	0	0	18
10. Suwawa Selatan	0	0	0	42	-	0	0	42
11. Suwawa Timur	1	0	0	11	1	0	0	11
12. Suwawa Tengah	1	0	0	10	1	0	0	10
13. Pinogu	1	0	0	7	1	0	0	7
14. Bone Pantai	2	0	14	29	2	0	14	29
15. Kabila Bone	1	0	9	83	1	0	9	83
16. Bone raya	1	0	7	46	1	0	7	46
17. Bone	2	0	9	83	2	0	9	83
18. Bulawa	1	0	8	61	1	0	8	61
Kab. Bone Bolango	22	0	82	946	21	0	82	946

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kab. Bone Bolango

2.6 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan internasional. Pengembangan daerah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Gorontalo merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, walaupun dalam pengembangannya menghadapi permasalahan-permasalahan yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya sumberdaya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat

Perbandingan relative tingkat daya saing antar kota/kabupaten tersebut; berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu tingkat perekonomian daerah, ketersediaan

infrastruktur dan sumberdaya alam, serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia; dilakukan untuk melihat sejauh mana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan daerah.

2.6.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah

a. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tabel 2.60.
PDRB Harga Berlaku dan Sumbangan Terhadap Perekonomian
Provinsi Gorontalo.

No	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO (Rp 000.000)					Share Terhadap Ekonomi Provinsi Gorontalo						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	645,103.35	713,566.07	784,451.08	856,585.47	987,241.35	na	10.79	10.76	10.60	10.36	10.38	na
2	Pertambangan dan Penggalian	42,352.58	46,945.96	50,437.79	52,843.14	55,814.34	na	17.85	17.75	17.58	17.30	16.84	na
3	Industri Pengolahan	106,483.03	118,056.32	131,213.77	146,086.56	172,123.38	na	16.84	16.58	16.45	16.45	16.37	na
4	Pengadaan Listrik dan Gas	692.63	679.01	713.40	709.64	758.17	na	6.73	6.57	6.58	6.62	6.48	na
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	394.39	461.06	532.82	621.86	757.38	na	5.05	5.32	5.41	5.66	5.94	na
6	Konstruksi	162,638.04	190,922.24	214,863.59	251,602.57	311,118.15	na	8.96	9.30	9.27	9.65	10.47	na
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,781.76	217,397.69	244,290.63	282,766.54	331,612.34	na	12.95	12.87	12.50	12.45	12.63	na
8	Transportasi dan Pergudangan	20,215.36	23,220.54	25,201.09	27,781.73	30,633.52	na	2.34	2.34	2.23	2.09	2.00	na
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	20,350.97	21,505.36	22,598.03	24,723.69	27,860.47	na	6.08	5.71	5.33	5.11	5.16	na
10	Informasi dan Komunikasi	31,711.64	39,867.91	43,336.79	45,582.85	50,539.30	na	7.51	8.42	8.20	7.99	8.01	na
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	25,394.81	32,213.17	44,211.10	48,436.43	55,029.15	na	4.82	5.07	5.76	5.72	5.91	na
12	Real Estate	48,909.94	54,275.29	61,586.30	67,776.49	72,916.04	na	17.11	16.89	16.92	16.41	15.72	na
13	Jasa Perusahaan	1,891.12	2,098.37	2,524.49	3,034.57	3,536.39	na	12.03	12.18	13.07	14.06	14.55	na
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	233,901.61	268,955.79	298,692.97	323,172.45	344,990.63	na	15.53	15.81	15.84	15.88	15.58	na
15	Jasa Pendidikan	67,270.27	77,012.19	97,149.63	115,844.30	129,054.45	na	12.52	12.51	12.86	12.76	12.27	na
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82,141.87	89,165.02	106,772.21	123,787.87	135,568.96	na	15.44	15.32	16.03	16.09	15.71	na
17	Jasa Lainnya	39,429.19	42,740.14	46,696.36	53,268.99	58,857.76	na	13.19	13.26	13.47	13.78	13.89	na
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,719,662.56	1,939,082.13	2,175,272.05	2,424,625.15	2,768,411.78		11.11	11.14	11.06	10.96	10.99	na

Tabel 2.61.
PDRB Harga Konstan dan Sumbangan Terhadap Perekonomian
Provinsi Gorontalo.

No	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO					PROVINSI GORONTALO						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	645,103.35	672,518.81	711,343.90	756,779.51	809,081.97	na	10.79	10.64	10.52	10.46	10.51	na
2	Pertambangan dan Penggalian	42,352.58	45,137.48	45,916.38	46,247.54	46,572.99	na	17.85	17.79	17.26	16.88	16.45	na
3	Industri Pengolahan	106,483.03	113,407.33	121,666.98	130,970.39	139,169.82	na	16.84	16.64	16.51	16.45	16.50	na
4	Pengadaan Listrik dan Gas	692.63	747.37	833.67	901.11	981.58	na	6.73	6.56	6.56	6.58	6.42	na
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	394.39	433.12	483.94	547.89	613.11	na	5.05	5.21	5.41	5.74	5.98	na
6	Konstruksi	162,638.04	178,477.62	190,752.61	212,839.07	246,802.22	na	8.96	8.98	8.93	9.29	9.99	na
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190,781.76	208,545.15	225,238.93	246,706.66	271,716.52	na	12.95	12.85	12.47	12.39	12.63	na
8	Transportasi dan Pergudangan	20,215.36	21,879.67	23,105.36	24,722.22	26,201.77	na	2.34	2.32	2.26	2.22	2.17	na
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	20,350.97	21,293.36	21,542.01	22,642.94	24,688.69	na	6.08	5.90	5.62	5.42	5.52	na
10	Informasi dan Komunikasi	31,711.64	38,416.06	40,495.32	42,739.33	45,808.36	na	7.51	8.40	8.17	7.93	7.80	na
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	25,394.81	30,683.29	38,871.53	40,602.81	43,594.93	na	4.82	5.07	5.75	5.72	5.87	na
12	Real Estate	48,909.94	51,966.26	54,799.73	58,011.69	59,889.37	na	17.11	16.81	16.23	15.79	15.11	na
13	Jasa Perusahaan	1,891.12	2,021.49	2,317.72	2,678.37	2,938.06	na	12.03	12.18	13.07	14.06	14.55	na
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	233,901.61	249,479.22	266,559.35	282,942.74	296,751.72	na	15.53	15.50	15.82	15.87	15.56	na
15	Jasa Pendidikan	67,270.27	75,826.85	89,328.11	101,166.29	110,252.84	na	12.52	12.52	12.89	12.84	12.32	na
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82,141.87	86,232.17	97,909.45	107,655.60	114,205.29	na	15.44	15.31	16.03	16.13	15.72	na
17	Jasa Lainnya	39,429.19	41,558.01	44,715.44	48,433.96	51,385.67	na	13.19	13.24	13.40	13.63	13.73	na
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,719,662.56	1,838,623.28	1,975,880.43	2,126,588.12	2,290,654.91		11.11	11.03	10.99	10.98	11.03	na

Dari table 2.1 (PDRB Berlaku) / table 2.2 (PDRB Konstan) menunjukkan bahwa keadaan perekonomian Kabupaten Bone Bolango terus mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.1.719.662.560.000/Rp.1.719.662.560.000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.2.768.411.780.000/Rp.2.290.654.910.000. Artinya

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB Berlaku mengalami kenaikan nilai tambah sebesar Rp.1.048.749.220.000 dan PDRB Konstan mengalami kenaikan nilai tambah sebesar RP. 570.992.350.000

b. PDRB Deflator

Tabel 2.62.
PDRB Deflator Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo
serta Perbandingannya.

No	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO					PROVINSI GORONTALO					PERBANDINGAN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100.00	106.10	110.28	113.19	122.02		100.00	104.93	109.45	114.37	123.55	131.89	1.000	1.011	1.008	0.990	0.988
2	Pertambangan dan Pengalihan	100.00	104.01	109.85	114.26	119.84		100.00	104.22	107.87	111.52	117.06	127.66	1.000	0.998	1.018	1.025	1.024
3	Industri Pengolahan	100.00	104.10	107.85	111.54	123.68		100.00	104.52	108.22	111.53	124.63	134.95	1.000	0.996	0.997	1.000	0.992
4	Pengadaan Listrik dan Gas	100.00	90.85	85.57	78.75	77.24		100.00	90.61	85.23	78.28	76.58	64.81	1.000	1.003	1.004	1.006	1.009
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100.00	106.45	110.10	113.50	123.53		100.00	104.12	110.09	115.20	124.53	133.49	1.000	1.022	1.000	0.985	0.992
6	Konstruksi	100.00	106.97	112.64	118.21	126.06		100.00	103.31	108.50	113.87	120.29	130.03	1.000	1.035	1.038	1.038	1.048
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100.00	104.24	108.46	114.62	122.04		100.00	104.07	108.20	114.04	121.98	131.75	1.000	1.002	1.002	1.005	1.001
8	Transportasi dan Pergudangan	100.00	106.13	109.07	112.38	116.91		100.00	105.20	110.71	119.36	127.12	135.17	1.000	1.009	0.985	0.942	0.920
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	100.00	101.00	104.90	109.19	112.85		100.00	104.46	110.49	115.87	120.92	132.45	1.000	0.967	0.949	0.942	0.933
10	Informasi dan Komunikasi	100.00	103.78	107.02	106.65	110.33		100.00	103.50	106.66	105.87	107.47	111.94	1.000	1.003	1.003	1.007	1.027
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	100.00	104.99	113.74	119.29	126.23		100.00	104.95	113.46	119.26	125.34	131.68	1.000	1.000	1.002	1.000	1.007
12	Real Estate	100.00	104.44	112.38	116.83	121.75		100.00	103.95	107.81	112.42	117.08	126.37	1.000	1.005	1.042	1.039	1.040
13	Jasa Perusahaan	100.00	103.80	108.92	113.30	120.36		100.00	103.80	108.92	113.30	120.36	131.70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	100.00	107.81	112.05	114.22	116.26		100.00	105.71	111.91	114.15	116.12	119.23	1.000	1.020	1.001	1.001	1.001
15	Jasa Pendidikan	100.00	101.56	108.76	114.51	117.05		100.00	101.69	109.06	115.17	117.57	123.77	1.000	0.999	0.997	0.994	0.996
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.00	103.40	109.05	114.99	118.71		100.00	103.35	109.04	115.28	118.78	126.21	1.000	1.001	1.000	0.997	0.999
17	Jasa Lainnya	100.00	102.84	104.43	109.98	114.54		100.00	102.62	103.87	108.76	113.23	121.92	1.000	1.002	1.005	1.011	1.012
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100.00	105.46	110.09	114.01	120.86		100.00	104.42	109.35	114.26	121.26	129.31	1.000	1.010	1.007	0.998	0.997

Perbedaan nilai pada PDRB Berlaku dan Konstan pada table 2.68 dan 2.69 yang menyebabkan perbedaan nilai tambah (PDRB Berlaku Rp.1.048.749.220.000 dan PDRB Konstan RP. 570.992.350.000) disebabkan terjadinya inflasi berbagai sector perekonomian pada Kabupaten Bone Bolango, seperti ditunjukkan pada tabel 2.70. Semakin jauh dari tahun dasar 2010 maka secara kumulatif terjadi tinggi terjadinya inflasi (Indeks PDRB Deflator semakin turun dari angka 100). Terjadinya penurunan indeks PDRB Deflator tidak sama untuk semua sector ekonomi di Kabupaten Bone Bolango. Tercatat pada Tabel 2.70 inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada sector Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (Sektor 11)/Sektor Konstruksi (sector 6), sedangkan inflasi terendah bahkan terjadi inflasi positif atau deflasi terjadi pada sector Konstruksi (sector 4). Namun secara rata-rata dalam perekonomian kalau dilihat dari Tabel 2.70 mengenai perbandingan inflasi antara Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Bone Bolango lebih rendah dari Provinsi Gorontalo (nilai perbandingan = 0,997), Namun ada beberapa sector ekonomi yang mempunyai tingkat inflasi yang lebih tinggi dari sector yang

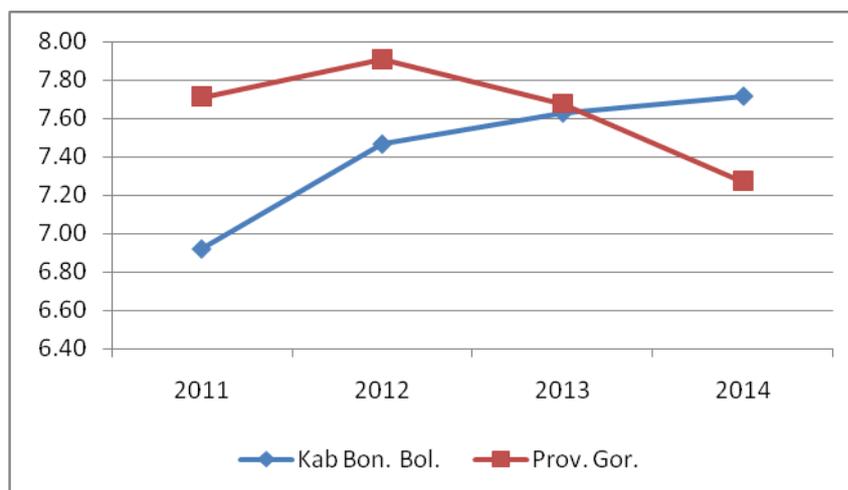
sama dengan inflasi Provinsi Gorontalo, yaitu pada sector-sector yang mempunyai nilai perbandingan inflasi lebih besar 1 (satu).

c. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Parsial.

Tabel 2.63.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo

No	LAPANGAN USAHA	KABUPATEN BONE BOLANGO					PROVINSI GORONTALO					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		4.25	5.77	6.39	6.91		5.75	7.00	6.93	6.44	4.26
2	Pertambangan dan Penggalian		6.58	1.73	0.72	0.70		6.92	4.83	2.98	3.36	3.95
3	Industri Pengolahan		6.50	7.28	7.65	6.26		7.77	8.18	7.99	5.99	4.66
4	Pengadaan Listrik dan Gas		7.90	11.55	8.09	8.93		10.70	11.56	7.70	11.61	1.72
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		9.82	11.73	13.21	11.90		6.55	7.43	6.78	7.34	2.46
6	Konstruksi		9.74	6.88	11.58	15.96		9.41	7.55	7.20	7.85	9.77
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		9.31	8.00	9.53	10.14		10.20	11.26	10.26	8.05	5.75
8	Transportasi dan Pergudangan		8.23	5.60	7.00	5.98		9.14	8.68	8.76	8.57	9.67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		4.63	1.17	5.11	9.03		7.77	6.31	8.96	6.93	8.05
10	Informasi dan Komunikasi		21.14	5.41	5.54	7.18		8.33	8.35	8.67	9.02	9.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi		20.83	26.69	4.45	7.37		15.03	11.60	5.09	4.54	10.15
12	Real Estate		6.25	5.45	5.86	3.24		8.18	9.18	8.84	7.85	8.22
13	Jasa Perusahaan		6.89	14.65	15.56	9.70		5.57	6.79	7.48	5.96	5.57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib		6.66	6.85	6.15	4.88		6.87	4.70	5.83	6.92	3.76
15	Jasa Pendidikan		12.72	17.81	13.25	8.98		12.74	14.42	13.73	13.55	7.14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		4.98	13.54	9.95	6.08		5.88	8.44	9.27	8.84	10.64
17	Jasa Lainnya		5.40	7.60	8.32	6.09		5.00	6.30	6.48	5.28	4.92
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6.92	7.47	7.63	7.72		7.71	7.91	7.67	7.27	6.23

Grafik 2.12.
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo



Secara normative pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, karena sebagai wilayah bagian dari Provinsi Gorontalo, maka pasti PDRB

Kabupaten Bone Bolango lebih kecil. Berdasarkan Tabel 2.64 dan Grafik 2.12 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun Trend perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango terus meningkat, sedangkan trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menurun, sehingga pada tahun 2014 nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango lebih tinggi dari Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.64.
Peran Ekonomi Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Bolango

No	LAPANGAN USAHA	TERHADAP EKONOMI KABUPATEN				PERAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.59	2.11	2.30	2.46	23.05	28.29	30.15	31.88
2	Pertambangan dan Penggalian	0.16	0.04	0.02	0.02	2.34	0.57	0.22	0.20
3	Industri Pengolahan	0.40	0.45	0.47	0.39	5.82	6.02	6.17	5.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06	0.04	0.05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04
6	Konstruksi	0.92	0.67	1.12	1.60	13.31	8.94	14.66	20.70
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.03	0.91	1.09	1.18	14.93	12.16	14.24	15.24
8	Transportasi dan Pergudangan	0.10	0.07	0.08	0.07	1.40	0.89	1.07	0.90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.05	0.01	0.06	0.10	0.79	0.18	0.73	1.25
10	Informasi dan Komunikasi	0.39	0.11	0.11	0.14	5.64	1.51	1.49	1.87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.31	0.45	0.09	0.14	4.45	5.97	1.15	1.82
12	Real Estate	0.18	0.15	0.16	0.09	2.57	2.06	2.13	1.14
13	Jasa Perusahaan	0.01	0.02	0.02	0.01	0.11	0.22	0.24	0.16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0.91	0.93	0.83	0.65	13.09	12.44	10.87	8.42
15	Jasa Pendidikan	0.50	0.73	0.60	0.43	7.19	9.84	7.86	5.54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.24	0.64	0.49	0.31	3.44	8.51	6.47	3.99
17	Jasa Lainnya	0.12	0.17	0.19	0.14	1.79	2.30	2.47	1.80
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6.92	7.47	7.63	7.72	100.00	100.00	100.00	100.00

Berdasarkan table 2.64 Peran Ekonomi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango, Menunjukkan bahwa peran sector pertanian, kehutanan, dan Perikanan masih sangat tinggi dan terus meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango yaitu dari 1.59% (setara dengan 23,05%) tahun 2011 menjadi 2.46% (setara dengan 31,88%) tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa kinerja sector pertanian, kehutanan, dan Perikanan masih amat berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango. Namun

terdapat dua sector ekonomi yang kalau digabungkan memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada sector pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu Sektor Konstruksi dan Sektor Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Gabungan kedua sector tersebut memberikan sumbangan ekonomi 1,95% (setara dengan 28,24%) tahun 2011 menjadi 2,78% (setara dengan 35,94%) tahun 2014. Bahkan padatahun 2014 jumlah sumbangan sektor-sektor jasa lainnya dalam perekonomian Kabupaten Bone Bolango telah meningkat sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.65.
Peran Ekonomi Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo

No	LAPANGAN USAHA	TERHADAP EKONOMI PROVINSI				PERAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.18	0.23	0.25	0.27	7.98	8.77	9.69	11.23
2	Pertambangan dan Penggalian	0.02	0.00	0.00	0.00	16.96	6.36	4.17	3.54
3	Industri Pengolahan	0.04	0.05	0.05	0.04	14.09	14.81	15.80	17.20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	6.55	6.89	5.06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	8.22	10.56	9.31
6	Konstruksi	0.10	0.07	0.12	0.18	9.27	8.18	14.35	18.90
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.11	0.10	0.12	0.13	11.82	9.13	11.59	15.60
8	Transportasi dan Pergudangan	0.01	0.01	0.01	0.01	2.11	1.50	1.80	1.55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.01	0.00	0.01	0.01	3.62	1.09	3.20	7.06
10	Informasi dan Komunikasi	0.04	0.01	0.01	0.02	19.07	5.45	5.22	6.32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.03	0.05	0.01	0.02	6.68	11.65	5.04	9.28
12	Real Estate	0.02	0.02	0.02	0.01	13.07	9.98	10.77	6.51
13	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	26.27	27.19	22.85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0.10	0.10	0.09	0.07	15.05	22.60	16.67	11.19
15	Jasa Pendidikan	0.06	0.08	0.07	0.05	12.50	15.46	12.44	8.51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.03	0.07	0.05	0.03	13.07	24.57	17.21	11.10
17	Jasa Lainnya	0.01	0.02	0.02	0.02	14.24	15.96	17.19	15.72
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0.77	0.82	0.84	0.85	9.97	10.41	10.92	11.65

Sumbangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo walaupun masih relative kecil namun terus mengalami peningkatan tahun demi tahun. Pada tahun 2011 sumbangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.77% dari 7.71% pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo (setara dengan 9,97%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,85% dari 7,27% pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo (setara dengan 11,65%). Hal ini

menunjukkan bahwa walaupun Provinsi Gorontalo mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi namun Kabupaten Bone Bolango justru meningkat, sehingga sumbangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango semakin besar.

Secara umum dilihat pada ekonomi sektoral, walaupun sumbangan ekonomi Kabupaten Bone Bolango masih kecil namun sumbangan ekonomi sektoral cukup sampai dengan sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral Provinsi Gorontalo, dan berpotensi terus meningkat, sehingga perlu penanganan yang lebih baik dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Secara relatif, Kabupaten Bone Bolango menempati urutan kedua setelah Kota Gorontalo dan masih berada diatas Provinsi Gorontalo 66,83 dalam hal perkembangan kualitas sumber daya manusia. Kota Gorontalo mempunyai angka IPM tertinggi se-provinsi Gorontalo, dan termasuk pada kategori IPM tinggi (kisaran 74-75). Begitu juga dengan besarnya PDRB Perkapita dan angka pertumbuhan ekonominya. Untuk IPM Bone Bolango, termasuk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori IPM sedang karena berada pada kisaran 64-65.

Tabel 2.66.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se - Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Kab. Boalemo	61,11	61,71	62,18	62,86
Kab. Gorontalo	62,22	62,22	62,90	63,63
Kab. Pohuwato	60,48	61,38	61,74	62,50
Kab. Bone Bolango	65,13	65,82	66,03	66,83
Kab. Gorontalo Utara	60,71	61,60	61,92	62,55
Kota Gorontalo	74,06	74,43	74,97	75,62
Prov. Gorontalo	64,12	64,70	65,17	65,86

B. Sektor Basis

Table 2.67.
Analisis Sektor Basis dan Daya Saing

LAPANGAN USAHA	LQ Harga Konstan					Harga Konstan			Kategori
	2010	2011	2012	2013	2014	LQ Share	LQ Shift	LQ Trend	
Jasa Perusahaan	1,08	1,10	1,19	1,28	1,32	1,22	2,16	1,77	A
Konstruksi	0,81	0,81	0,81	0,85	0,91	0,85	1,09	1,28	A
Jasa Lainnya	1,19	1,20	1,22	1,24	1,25	1,23	1,48	1,20	A
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,41	1,44	1,44	1,41	1,43	1,54	1,08	A
Jasa Pendidikan	1,13	1,13	1,17	1,17	1,12	1,11	1,18	1,06	A
Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,17	1,16	1,14	1,13	1,15	1,16	1,16	1,01	A
Industri Pengolahan	1,52	1,51	1,50	1,50	1,50	1,52	1,51	0,99	A-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,39	1,46	1,47	1,43	1,38	1,36	0,99	A-
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,97	0,92	0,95	A-
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,52	0,94	1,82	B
Jasa Keuangan dan Asumsi	0,43	0,46	0,52	0,52	0,53	0,48	0,72	1,50	B
Informasi dan Komunikasi	0,68	0,76	0,74	0,72	0,71	0,68	0,73	1,08	B
Pengadaan Listrik dan Gas	0,61	0,59	0,60	0,60	0,58	0,61	0,64	1,05	B
Real Estate	1,54	1,52	1,48	1,44	1,37	1,43	0,89	0,62	C
Pertambangan dan Penggalian	1,61	1,61	1,57	1,54	1,49	1,57	0,86	0,55	C
Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,15	0,75	D
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,54	0,51	0,49	0,50	0,52	0,34	0,66	D

Berdasarkan hasil analisis LQ, LQ share, LQ shift, dan LQ trend yang dituangkan pada table 2.75 yang mengulas tentang keunggulan komperatif, keunggulan kompetitif, serta trend perkembangan relative maka sector ekonomi Kabupaten Bone Bolango dapat dikategorikan kedalam empat macam, yaitu:

Kategori Baik-Baik: 1. Jasa Perusahaan; 2. Konstruksi; 3. Jasa Lainnya; 4. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; 5. Jasa

Pendidikan; 6. Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 7. Industri Pengolahan; 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun tiga sector terakhir walaupun dalam kategori baik-baik, berpeluang mundur jika tidak di jaga.

Kategori Buruk-Baik: 1. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 2. Jasa Keuangan dan Asuransi; 3. Informasi dan Komunikasi; 4. Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor-sektor tersebut walaupun dalam kategori non basis namun mempunyai daya saing yang baik sehingga berpotensi untuk berkembang dengan baik.

Kategori Baik-Buruk: 1. Real Estate; 2. Pertambangan dan Penggalian. Sektor pada kategori ini adalah sektor basis namun mempunyai daya saing yang menurun, sehingga perlu mendapat perhatian.

Kategori Buruk-Buruk: 1. Transportasi dan pergudangan; 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor-sektor dalam kategori ini adalah sector non basis dan mempunyai daya saing lemah, dan mempunyai trend perkembangan relative menurun, sehingga sector-sektor tersebut harus mendapat perhatian penuh.

Secara umum dilihat dari nilai LQ, LQ share, LQ shift, dan LQ trend perekonomian sektoral Kabupaten Bone Bolango mempunyai masa depan yang cukup baik dan berpotensi berperan dalam perekonomian Provinsi Gorontalo, namun masih terdapat beberapa sektor yang harus diperhatikan dan dibina sehingga secara komprehensif dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing ekonomi Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.

2.6.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Infrastruktur Jalan

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menempatkan sektor ini sebagai sektor strategis karena dampaknya bagi pertumbuhan dan mobilitas ekonomi masyarakat disamping mewujudkan keseimbangan dan konektivitas antar wilayah serta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa masalah mendasar pada aspek infrastruktur jalan antara lain masalah kondisi kualitas jalan dengan kondisi kurang baik, ketersediaan dan pertumbuhan jalan baru yang masih rendah, keterbatasan akses menuju wilayah terpencil dan terisolasi, konektivitas wilayah yang kurang

begitu baik, akses jalan menuju bagian utara dan akses menuju wilayah pesisir yang belum terbangun serta akses menuju kawasan strategis yang masih terbatas.

Data perkembangan jalan berdasarkan status jalan menurut kewenangannya dan sumber pembiayaannya dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Tahun 2014, panjang jalan negara di Kabupaten Bone Bolango tercatat 89,898 kilometer, sedangkan panjang jalan provinsi dan kabupaten berturut-turut adalah 101,4 kilometer dan 325,18 kilometer.

Tabel 2.68.
Status Ruas Jalan dalam Wilayah Kab. Bone Bolango

Status Jalan	2013	2014	2015
Jalan Nasional	89,898 ^r	89,898 ^r	89,898 ^r
Jalan Provinsi	101,400 ^r	101,400 ^r	101,400 ^r
Jalan Kabupaten	325,180 ^r	325,180 ^r	325,180 ^r
Jumlah	516,478 ^r	516,478 ^r	516,478 ^r

Tabel 2.69.
Klasifikasi Permukaan Jalan dalam Wilayah Kab. Bone Bolango

Kondisi Jalan	2013	2014	2015
Jalan Aspal	323.808 ^r	323.808	344,267
Jalan Kerikil	0,400 ^r	0,400 ^r	0,400 ^r
Jalan Tanah	192.270 ^r	192.270 ^r	171,811
Jumlah	516,478 ^r	516,478 ^r	516,478

Tabel 2.70.
Kondisi Jalan di Kabupaten Bone Bolango

Kondisi Jalan	2013	2014	2015
Baik	247,768	323.808 ^r	344,267
Sedang	50.150 ^r	34,450	31,172
Rusak	87,070 ^r	41,040	39,401
Rusak Berat	131,490	117,180	101,638

B. Fasilitas Air Bersih

Salah satu aspek dasar yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu ketersediaan akses air minum bagi seluruh masyarakat secara layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyediaan sarana prasarana air bersih menjadi agenda strategis tahunan yang dilakukan. Hingga tahun 2014, capaian kinerja penyediaan air minum yang dapat diakses oleh masyarakat yakni:

- 57,95% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
- 67,07% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
- 44,30% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

Tabel 2.71.
Sarana Air Bersih dan Sistem Perpipaan Kab. Bone Bolango
Tahun 2013 - 2014

Sarana Air Bersih	2013	2014
Sambungan Rumah	6839	7994
Cakupan Pelayanan	46.70%	48.10%
Sambungan Rumah Untuk MBR	1000	100

Sumber : PDAM Kab. Bone Bolango

C. Fasilitas Sanitasi

Hingga tahun 2014, capaian kinerja sanitasi yang terkait dengan ketersediaan sanitasi layak yang dapat diakses masyarakat, yakni sebagai berikut:

- 47,94% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
- 55,61% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
- 36,47% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

D. Fasilitas Listrik

Ketersediaan energy listrik masih merupakan salah satu issu penting di Kabupaten Bone Bolango. Hingga tahun 2014, rasio elektrifikasi Kabupaten Bone Bolango baru mencapai 72%. Sedangkan jumlah desa yang belum terlayani listrik sampai dengan tahun 2014 sebanyak 13 desa dan jumlah desa yang sudah terlayani listrik sampai dengan tahun 2014 sebanyak 152 desa.

Tabel 2.72.
Penyediaan Energi Listrik Tahun 2012-2015 dan Target Tahun 2015

NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI				TARGET 2016	JUMLAH
			2012	2013	2014	2015		
1	Pengadaan Instalasi Lampu Jalan	Unit	10	114	139	-	-	263
2	Pengadaan Instalasi Listrik	RTM		400	1.987		460	2.387

Tabel 2.73.
Jaringan Listrik dan Lampu Jalan Tahun 2012-2015 di Kabupaten Bone Bolango

NO	KEGIATAN	SATUAN	REALISASI				TARGET 2016	JUMLAH
			2012	2013	2014	2015		
1	Pengadaan Reaktor Biogas	Unit	-	43	39	48		
2	Pengadaan PLTMH	Unit		1		1		
3	Pengadaan PLTS terpusat	Unit	-	1	1	1		
4	Pengadaan PLTS tersebar	Unit			99	67	-	166

E. Perumahan

Grafik . 2.13.
Perkembangan Kinerja Bidang Perumahan
Di Kabupaten Bone Bolango



Tabel. 2.74.
Bantuan Rumah Bagi Masyarakat
Di Kabupaten Bone Bolango

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN ANGGARAN					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015*)	
1	BSPS	100	1823	2090	1542	827	6382
2	HUNIAN PANTAS (APBD KAB)			25	31	103	159
3	RTLH (APBN)					100	100
4	BEDAH KAMPUNG			50			50
5	BBR			50		540	590

Tabel 2.75.
Perkembangan Rumah Layak Huni
Di Kabupaten Bone Bolango

Perkembangan Rumah Layak Huni	2011	2012	2013	2014	2015
	8319	8419	10242	12457	14030

Berikut ini adalah gambaran capaian kinerja Kabupaten Bone Bolango. tahun 2011-2015 beserta interpretasi capaiannya:

2.7 Evaluasi Sasaran –sasaran pembangunan RPJMD

A. Sasaran 1. *Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah*

Pelaksanaan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilannya ditetapkan 2 indikator yakni:

1. Prosentase produk hukum yang ditindaklanjuti dengan target 100% dengan realisasi 100% dengan prosentase kinerja sebesar 100%, dimana semua produk hukum yang telah disusun baik peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati maupun peraturan dari pemerintah pusat telah dijalankan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan. Evaluasi fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah daerah telah dilaksanakan dalam rangka penataan organisasi pemerintah daerah guna menciptakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran dan fungsi yang tepat, responsive, berkompoten dan profesional dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Indikator prosentase peningkatan kompetensi aparatur dengan target 174 orang dengan realisasi sebesar 137 orang dengan prosentase kinerja sebesar 79%. Angka realisasi ini hanya mencakup aparatur yang mengikuti diklat perjenjangan/struktural.

B. Sasaran 2 : *Terciptanya Tata Pemerintahan Yang Lebih Baik, Penuh Integritas, Taat Kepada Hukum Yang Berwibawa, Transparan, Profesional, Dan Akuntabel*

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan demokratis di tengah persaingan global yang semakin meningkat adalah perbaikan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah Kabupaten Bone Bolango menetapkan prioritas reformasi birokrasi secara terpadu, integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan dalam dokumen RPJMD. Dalam rangka mendukung pencapaian terhadap prioritas ini maka Pemerintah Kabupaten

Bone Bolango telah menetapkan indikator-indikator penilaian sebagai acuan pengukuran. Berikut indikator-indikator tersebut :

Tabel 2.76.
Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Pencapaian Kinerja
1.	Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah	Persentase Peningkatan kompetensi aparatur.	Meningkat 13,5% dari 4.212 PNS (akumulasi thn 2011, 2012 & 2013 , 357 Orang) atau bertambah sebanyak 211 Orang atau menjadi 568 Orang	Meningkat 22,41% dari 4.212 PNS atau bertambah sebanyak 439 orang atau menjadi 944 orang	166%
2.	Terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik, penuh integritas, taat kepada hukum yang berwibawa, transparan, profesional, dan akuntabel	Kinerja pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat	Nilai Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah	66 (B)	58,77 (CC)	89,05%
4.	Tegaknya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75%	82,72%	110,29%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan	Angka partisipasi	75%	75,53%	100,71%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Pencapaian Kinerja
	mutu pendidikan masyarakat	sekolah			
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,25	70,70	102,09%
7.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan	16,44 %	16,68% (naik sebesar 0,24% dari 16,44%)	98,5%
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan	Peningkatan pendapatan masyarakat	Rp.8.300.000	Rp. 8.547.063	102,9%
9.	Meningkatnya peran dan fungsi wilayah kawasan guna pengembangan pariwisata daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah serta pelestarian budaya daerah	Peningkatan kunjungan wisata.	30.000	31.000	103,33%
10.		Peningkatan pertumbuhan ekonomi	7,68%	7,72%	100,52%
11.		Peningkatan pendapatan asli daerah	Rp.43.977.484.9 25,47	Rp. 54.414.583.9 66	123,73%
12.	Meningkatnya aksesibilitas	Kualitas infrastruktur	50%	66,6% (Bertambah	133,2%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Pencapaian Kinerja
	wilayah dan Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian	jalan dan jembatan penunjang aksesibilitas wilayah		29 Km dari total Panjang Jalan (325,184 Km)	
13.	Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian	Peningkatan kualitas rumah layak huni	46% dari 34.373	48,21% dari 34.373	104,80%
14.		Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih	55% dari jumlah penduduk 161.129	57,95% dari jumlah penduduk 161.129	105,4%

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat

keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

- C.** Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian indikator kinerja utama dalam mendukung capaian sasaran kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD sebesar 133 dengan kategori **Sangat Baik**. Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci.

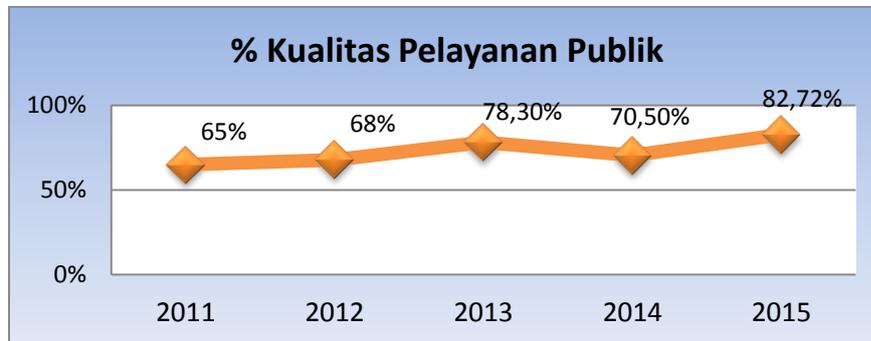
D. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berorientasi Kebutuhan Masyarakat

Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango sendiri telah menerapkan prinsip *from government to governance*. Hal ini tergambar dalam program dan kegiatan yang menjadi sasaran pembangunan masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, pelayanan air bersih, listrik, serta pengentasan kemiskinan yang mengalami peningkatan.

Selama ini data tingkat kepuasan masyarakat diperoleh melalui data primer yang dilakukan dengan metode survei langsung kepada masyarakat melalui pengolahan data statistik yang diawali dengan pengisian angket kuisioner oleh sebagian masyarakat sebagai sampel yang dipilih secara acak dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bone Bolango. Survei ini dilakukan oleh salah satu lembaga survei independen yang ada di Gorontalo, yang hasilnya di laporkan kepada pemerintah kabupaten Bone Bolango sebagai bahan evaluasi dan acuan perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone bolango digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.14.
Persentase Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2011-2015



Persentase pelayanan publik di tahun 2015 yang mencapai 82,72% mengalami kenaikan 12,72% dari nilai tahun 2014 sebesar 70,50%. Peningkatan di tahun 2015 mengalami kenaikan. Melihat nilai pencapaian ini maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

E. Sasaran 4: Tegaknya Hukum Secara Adil, Konsekuen, Tidak Diskriminatif Dan Memihak Pada Rakyat Kecil

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Sasaran pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan khususnya dalam menjamin kepastian hukum menjadi fokus dalam pencapaian sasaran RPJMD. Pencapaian sasaran ini didukung dengan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan penegakan hukum. Penilaian dilakukan dengan mengukur pelanggaran hukum yang didasarkan pada penurunan angka kriminalitas sebagai indikatornya. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

F. Sasaran 5 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Masyarakat

Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat ditentukan dari indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah, Prosentase peningkatan Mutu Siswa, dan Penurunan Angka Putus Sekolah.

1. Angka Partisipasi Sekolah

APS digunakan Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka APS yang ditargetkan sebesar 75% dengan realisasi 75,53% dengan capaian sebesar 100,71%, dengan kategori **Sangat baik**.

2. Peningkatan Mutu siswa

Peningkatan Mutu siswa dilihat keberhasilannya dari tingkat daya serap siswa pada setiap tingkatan pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan atas dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tingkat sekolah dasar dengan daya serap sebesar 99,06%
- Pada tingkat sekolah lanjutan pertama dengan daya serap sebesar 83,23%
- Dan pada tingkat sekolah lanjutan atas sebesar 37 persen.

Dari nilai diatas diperoleh rata-rata mutu pendidikan diperoleh angka sebesar 73,38.

3. Angka Putus sekolah

Tabel 2.77.
Angka Putus Sekolah tahun 2014/2015

NO	Jenjang Sekolah	Angka Siswa Putus Sekolah Thn 2014	Angka Siswa Putus Sekolah Thn 2015	Persen
1	SD/MI	69	69	0,36
2	SLTP/MTs	57	57	0,77
3	SMA/MA	NA	NA	NA
Jumlah		157	157	

Berdasarkan data diatas diperoleh rata-rata siswa putus sekolah sebesar 0,86% dari target 1% dengan capaian kinerja sebesar 86%.

4. Indikator Peningkatan Mutu tenaga pendidik

Peningkatan Mutu tenaga pendidik pada tahun 2015 diharapkan meningkat rata-rata sebesar 20 % pada semua tingkatan. Peningkatan mutu dilihat dari jumlah guru yang memiliki ijazah Starat 1 atau sarjana dibidang pendidikan keguruan. Lebih jelasnya capaian kinerja peningkatan mutu tenaga pendidik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.78.
Jumlah Guru yang telah memiliki Izajah S1

Jenjang sekolah	Jumlah guru yang memiliki ijazah s1 thn 2013	Jumlah guru yang memiliki ijazah s1 thn 2014	Persen
SD/MI	699	788	1,12
SLTP/M Ts	133	538	4,04
SMA/M A	325	419	1,28
Jumlah	1.157	1.745	1,50

Berdasarkan data diatas diperoleh ada kenaikan guru yang memiliki kompetensi S1 dan bersertifikasi pada tahun 2014 berjumlah 1.745 orang dibandingkan tahun 2013 sebesar 1.157 orang dengan rata-rata kenaikan sebesar 101,9%persen dibandingkan tahun 2013.

5. Peningkatan Mutu Siswa

Peningkatan Mutu siswa dilihat keberhasilannya dari tingkat daya serap siswa pada setiap tingkatan pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan atas dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian APM Bone Bolango ditahun 2014 menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2014 APM ditargetkan 100% untuk jenjang pendidikan SD, 80% jenjang SMP, dan 60% untuk jenjang pendidikan SMA atau rata-rata 80% dengan realisasi masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 91,35%, 75,91 dan 62,49 atau rata-rata 76,58%. Sehingga capaian kinerja APM kabupaten Bone Bolango sebesar 97,73%.

- Peningkatan mutu siswa diukur dengan menggunakan persentase angka kelulusan siswa. Pada tahun 2014 angka kelulusan ditargetkan 100% pada seluruh jenjang pendidikan. Sedangkan realisasinya adalah sebesar 99,87% sehingga capaian kinerja angka kelulusan pada tahun 2014 adalah sebesar 99,87%.
- Sedangkan untuk indikator penurunan angka putus sekolah pada tahun 2014 ditargetkan mencapai rata-rata 0,33% (jenjang pendidikan SD 0,18%, SMP 0,38%, dan SMA 0,42%) dengan realisasi mencapai 0,43% (SD 0,37%, SMP 0,79, SMA 0,42) sehingga capaian kinerja angka putus sekolah pada tahun 2014 sebesar 69,7%.

G. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pembinaan pemuda dan olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi guna meningkatkan kualitas pemuda melalui kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Dibidang keolahragaan meliputi kegiatan olah raga dievent nasional dengan formulasi target juara III disetiap perlombaan yang diikuti ditingkat nasional. Setelah melalui pengukuran nilai kinerja diperoleh sebesar 1,75% artinya dari semua kegiatan yang diikuti antara lain cabang Catur, atletik, olah raga tradisional. Semua cabang diikuti hanya olah raga catur yang memperoleh juara III.

H. Sasaran 7: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

- a) Angka Harapan Hidup

Tabel 2.79.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Kinerja Pencapaian
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,7 Tahun	69,25 Tahun	97,95

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa target indikator kinerja utama yang pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 70.70% dengan realisasi 69,25% dengan kinerja pencapaian sebesar 97,95% dengan kategori **baik**.

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Penyebab Angka Kematian Ibu Melahirkan disebabkan karena beberapa kinerja pencapaian SPM seperti yang diuraikan dibawah ini yakni:

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 90,23% dengan target 91% sehingga kinerja pencapaian sasaran sebesar 99,15%..
2. Capaian kunjungan ibu hamil K4 belum mencapai karena kunjungan K4 bila ibu hamil Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani yang ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi 70% dan kinerja pencapaian sasaran sebesar 100%.
3. Cakupan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 87,16% dengan target 70% dan kinerja pencapaian sasaran sebesar 124,5%.
4. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan sebesar 99,76% dengan target 87% sehingga kinerja pencapaian sebesar 114,6%
5. Cakupan Cakupan pelayanan ibu nifas sebesar 88,19% dengan target 86,32%, kinerja pencapaian sasaran sebesar 102,1%.
6. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 21,56% dengan target 92% sehingga kinerja pencapaian sasaran sebesar 23,44%.

c. Penurunan Angka Kematian Bayi

Terdapat beberapa penyebab angka kematian balita tidak mencapai target :

1. Cakupan kunjungan bayi sebesar 77,51% dengan target 96% sehingga kinerja pencapaian sasaran sebesar 80,74%.
2. Cakupan pelayanan anak balita sebesar 40,25% dengan target 88% sehingga kinerja pencapaian sasaran sebesar 45,74%.

I. Sasaran 8: Meningkatnya kualitas hidup, peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Bone Bolango diukur melalui persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan public dan jumlah jenis usaha perempuan yang difasilitasi oleh pemerintah. Berikut trend peran serta perempuan dalam jabatan publik dan jumlah jenis usaha perempuan.

Tabel 2.80.
Presentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Pemerintah

INDIKATOR	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
Jumlah jenis usaha perempuan	4	NA	NA
Jumlah perempuan yang menduduki jabatan public	6 orang dari total Pejabat 48 orang	6 orang dari total Pejabat 48 orang	323

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jumlah jenis usaha perempuan mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 0 jenis usaha jika dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai 4 jenis usaha. Sehingga trendnya pencapaian di tahun 2013 menurun sebesar 0% dibandingkan tahun 2012.

J. Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Hidup Serta Perlindungan Anak Dan Manula

Untuk sasaran meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan anak dan manula di Kabupaten Bone Bolango diukur dengan melihat capaian indikator keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 2.81.
Jumlah Kelahiran dan Angka Eksploitasi Sosial Ekonomi Anak
Tahun 2013 dan tahun 2014

INDIKATOR	TAHUN 2013	TAHUN 2014
Penurunan jumlah kelahiran per 10000 penduduk	Menurun 40 orang anak	Menurun 72 Orang
Prosentase penurunan angka eksploitasi sosial ekonomi anak	Menurun 20 orang anak	Menurun 134 anak

Berdasarkan data diatas penurunan angka kelahiran per 10.000 penduduk di tahun 2014 justru menunjukkan kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan pada tahun 2013. Trend penurunan dari tahun 2013 yang berjumlah 40 ke tahun 2014 sejumlah 72 sebesar 80%. Sehingga angka ini menunjukkan cukup baik. Begitupula untuk penurunan angka eksploitasi sosial ekonomi anak menunjukkan trend yang baik. Pada tahun 2013 jumlah yang berhasil diturunkan sebanyak 20 orang anak sedangkan di tahun 2014 menurun sampai 134 anak. Sehingga capaian kinerja kategori baik.

K. Sasaran 10 : Meningkatnya Taraf Hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Tabel 2.82.
Pengukuran Kinerja Indikator Angka Kemiskinan
Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Kinerja Pencapaian
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Menurun sebesar 1,81 dari 16,66 menjadi 15%	17,19 (naik sebesar 0,53 dari 16,66%)	8,37%

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa target penurunan 1,81 persen dari angka 16,66 dengan realisasi naik 0,53 dari 16,16 dengan kinerja pencapaian sebesar 8,37%persen dengan kategori **sangat kurang**.

L. Sasaran 9 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan

**Tabel 2.83.
Pengukuran Kinerja Indikator PDRB Perkapita
Tahun 2015**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Kinerja Pencapaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan	PDRB Perkapita	Rp.8.211.400	Rp.8.171.188	99,51%

Sumber data : BPS Bone Bolango

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan bahwa target peningkatan pendapatan perkapita tahun 2014 sebesar 8.211.400 juta realisasi 8.171.118 juta dengan kinerja pencapaian sebesar 99,51% persen dengan kategori **Baik**.

M. Sasaran 10. Meningkatnya peran dan fungsi wilayah kawasanguna pengembangan pariwisata daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah serta pelestarian budaya daerah.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan sektor pariwisata dalam diperlukan upaya-upaya meningkatkan kunjungan wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata.

N. Sasaran 11 : Meningkatnya aksesibilitas wilayah

Peningkatan aksesibilitas wilayah erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur penghubung atas akses antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga konstalasi sektor-sektor utama dan pendukung dapat saling menunjang satu sama lainnya. Indikator kinerja sasaran ini terdiri dari beberapa indikator yakni:

1. Indikator Proporsi Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi baik dengan target 78% dari 331,374 Km dengan realisasi sebesar 39,995 atau 12,07% prosentase kinerja sebesar 15,47%.

2. Efektivitas Pemanfaatan sarana prasarana penguatan sistem perekonomian target 90% dengan realisasi sebesar
3. indikator Persentase Penurunan Jumlah Kasus kecelakaan dengan target 20%
4. kualitas Rumah Layak Huni target 90% dari 38.226 dengan realisasi sebesar 27.917 atau 73 % dengan presentase kinerja sebesar 81%
5. Prosentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Banjir dengan target 11%
6. Ratio Jaringan Irigasi target 50%
7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dengan target 50%

O. Sasaran 12 :*Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat ditentukan oleh faktor penyebab status lingkungan*

1. Prosentase Penurunan tingkat kerusakan hutan dengan target 44%
2. Peningkatan luas RTH dengan target 13%
3. Prosentase penurunan tingkat Kerusakan lingkungan target 44%
4. Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TRS) per Satuan Penduduk target 3000
5. Ratio Ketersediaan Daya Listrik target 50%

2.8 Permasalahan Daerah

Dengan mencermati uraian pencapaian target dan sasaran pembangunan dengan berdasarkan pada beberapa faktor penyebab ketidak capaian target sebagaimana tertera diatas, maka beberapa permasalahan daerah yang masih merupakan permasalahan strategis daerah adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Pemerintah dengan permasalahan:
 - Belum optimalnya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program antar SKPD dan antar wilayah.
 - Profesionalitas dan kompetensi aparatur yang masih terbatas pada bidang tugas tertentu
 - Disiplin dan mental aparatur yang perlu terus ditingkatkan.
 - Terbatasnya sarana prasarana pemerintahan khususnya prasarana pemerintahan desa dan kelurahan.
 - Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu terus diperkuat.

- Penataan administrasi dan manajemen pemerintahan yang masih perlu terus diperbaiki.
 - Pengawasan dan pengendalian pembangunan yang perlu dioptimalkan.
- b. Bidang Pendidikan;
- Angka partisipasi sekolah khususnya pada jenjang pendidikan menengah yang masih dibawah rata-rata.
 - Keterbatasan sarana prasarana pendidikan khususnya pada wilayah terpencil dan terisolir.
 - Peningkatan ketersediaan tenaga guru dengan kualitas yang memenuhi kualifikasi pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
 - Perbaiki mutu dan manajemen pendidikan.
- c. Bidang Kesehatan;
- Ketersediaan sarana prasarana kesehatan khususnya pada pelayanan tingkat rujukan.
 - Ketersediaan tenaga medis khususnya pada wilayah terpencil dan pada jenjang pelayanan spesialistik.
 - Kemudahan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada wilayah terpencil.
 - Penanganan masalah gizi buruk dan rawan pangan pada wilayah-wilayah tertentu.
- d. Aspek Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan permasalahan berikut :
- Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
 - Daya beli masyarakat dan tingkat investasi masih rendah
 - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan tumbuhnya komoditas unggulan daerah.
 - Masih rendahnya penguasaan teknologi pengelolaan produk unggulan daerah.
- e. Aspek Kebutuhan Dasar Masyarakat masih diperhadapkan dengan permasalahan berikut :
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin diatas rata-rata nasional.
 - Jumlah pengangguran terbuka yang cenderung naik.
 - Rendahnya tingkat efektivitas program penanggulangan kemiskinan (22%)

- Jangkauan masyarakat di daerah terpencil terhadap akses pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
 - Kondisi rumah tidak layak huni yang masih tinggi dengan utilitas yang terbatas.
 - Rasio elektrifikasi masih rendah.
- f. Aspek sarana dan prasarana, terdapat beberapa permasalahan berikut :
- Kualitas infrastruktur pada Pusat Ibukota Kabupaten yang belum tersedia dan merata keseluruh wilayah.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana perdesaan khususnya terbatasnya pembukaan akses jalan menuju sentra-sentra produksi
 - Adanya beberapa kecamatan dan desa yang terisolir diantaranya Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bulango Ulu, beberapa desa di Suwawa Timur dan Bone Pesisir.
 - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan khususnya Rumah Sakit Toto dan Rumah Sakit Tombulilato.
 - Ketersediaan sarana prasarana ekonomi khususnya untuk menunjang pengembangan kawasan peternakan, pertanian serta jasa perdagangan berupa pasar harian yang mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 serta prospek perekonomian Tahun 2016-2017. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian daerah serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dalam empat tahun terakhir (2012-2015) terus mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 terkoreksi menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,72% dibanding tahun 2013 sebesar 7,63%, dan tahun 2012 sebesar 7,47%, namun pada tahun 2015 mengalami pelambatan menjadi 6,52%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 dipengaruhi oleh terjadinya pelambatan pertumbuhan hampir pada semua sektor utamanya pada sektor primer dan sekunder yang kontribusinya pada pembentukan PDRB sangat besar. Sektor pertanian melambat pertumbuhannya dari 6,9% menjadi 5,8%. Sektor pertambangan penggalian bahkan mengalami pertumbuhan minus sebesar -0,21%. Beberapa sektor yang pertumbuhannya anjlok antara lain sektor listrik dan gas dari 8,87% menjadi 0,69%, sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah dari 11,92% menjadi 6,92%, serta sektor konstruksi dari 15,9% menjadi 9,6%. Pergerakan pertumbuhan pada beberapa sektor tersier masih cukup baik walaupun masih cenderung kurang progresif dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dalam jangka menengah. Dalam skala regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dalam jangka menengah perlu terus diperkuat untuk mencapai pertumbuhan diatas rata-rata

pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. yang pada tahun 2015 mencapai 6,4%.

Tabel 3.1.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2015

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	672 518,81	711 343,90	756 785,65	809 087,95	856 281,24
B	Pertambangan dan Penggalian	45 137,48	45 916,38	46 247,54	46 572,99	46 473,39
C	Industri Pengolahan	113 407,33	121 666,98	130 970,39	139 202,86	146 563,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	747,37	833,67	899,89	979,69	986,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	433,12	483,94	547,89	613,22	655,68
F	Konstruksi	178 477,62	190 752,61	212 839,07	246 802,22	270 637,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	208 545,15	225 238,93	246 706,66	271 829,72	294 554,82
H	Transportasi dan Pergudangan	21 879,67	23 105,36	24 722,89	26 202,48	28 260,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21 293,36	21 542,01	22 685,11	24 756,97	27 181,51
J	Informasi dan Komunikasi	38 416,06	40 495,32	42 739,33	45 851,10	49 337,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30 683,29	38 871,53	40 511,84	43 244,95	48 422,56
L	Real Estat	51 966,26	54 799,73	58 011,69	59 889,37	62 622,21
M,N	Jasa Perusahaan	2 021,49	2 317,72	2 678,37	2 938,06	3 155,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	249 479,22	266 559,35	282 942,74	296 794,16	308 864,92
P	Jasa Pendidikan	75 826,85	89 328,11	101 166,29	110 252,84	118 193,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 232,17	97 909,45	107 655,60	114 205,29	124 225,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	41 558,01	44 715,44	48 433,96	51 385,67	53 453,56
	PDRB	1 838 623,27	1 975 880,41	2 126 544,91	2 290 609,53	2 439 871,22

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 s/d 2015

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,77	6,39	6,91	5,83
B	Pertambangan dan	1,73	0,72	0,7	-0,21
C	Industri Pengolahan	7,28	7,65	6,29	5,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,6	7,94	8,87	0,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,7	13,2	11,92	6,92
F	Konstruksi	6,88	11,6	15,96	9,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8	9,53	10,18	8,36
H	Transportasi dan	5,6	7	5,98	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	5,31	9,13	9,79
J	Informasi dan Komunikasi	5,41	5,54	7,28	7,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26,7	4,22	6,75	11,97
L	Real Estat	5,45	5,86	3,24	4,56
M,N	Jasa Perusahaan	14,7	15,6	9,7	7,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	6,15	4,9	4,07
P	Jasa Pendidikan	17,8	13,3	8,98	7,2
Q	Jasa Kesehatan dan	13,5	9,95	6,08	8,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,6	8,32	6,09	4,02
	Produk Domestik Regional Bruto	7,47	7,63	7,72	6,52

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

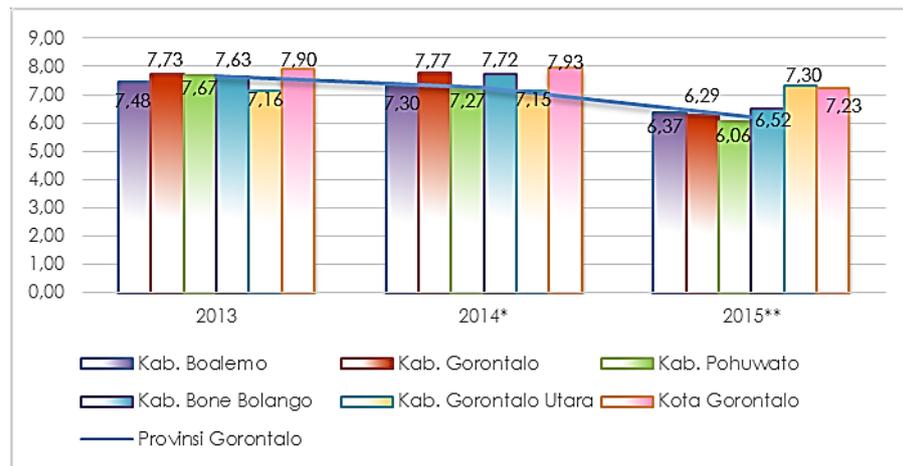
Tabel 3.3.
Perbandingan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Boalemo	6,74	7,42	7,48	7,3	6,37
Kabupaten Gorontalo	7,72	7,74	7,73	7,77	6,29
Kabupaten Pohuwato	7,11	7,51	7,67	7,27	6,06
Kabupaten Bone Bolango	6,92	7,47	7,63	7,72	6,52

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Gorontalo Utara	7,00	7,13	7,16	7,15	7,30
Kota Gorontalo	7,79	7,88	7,90	7,93	7,23

Grafik 3.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Kabupaten dan Kota Tahun 2013 - 2015



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo

b. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Bone Bolango hingga tahun 2015 masih didominasi sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sektoral mencapai 36,7%. Sektor tersier juga semakin memberikan kontribusi cukup besar yang mencapai diatas 45%. Beberapa sektor tersier yang perannya dominan disumbangkan oleh pertumbuhan sektor jasa konstruksi, perdagangan besar/eceran dan reparasi kendaraan, jaminan sosial, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

Dalam periode terakhir tahun 2015, walapun terjadi pelambatan pada sektor pertanian, namun kontribusi sektor pertanian masih dominan dalam pembentukan output daerah, sementara sektor sekunder cenderung kurang progresif perannya dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, pergeseran tersebut kurang memberikan nilai tambah signifikan terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah serta kurang memberi penguatan terhadap perbaikan struktur ekonomi daerah dalam jangka

panjang. Sektor sekunder dan sektor tersier seharusnya secara bertahap semakin meningkat peranannya dalam memperkuat pembangunan ekonomi Kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang.

Tabel 3.4.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2010 – 2015 atas Dasar Harga Berlaku (%)

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,8	36,06	35,33	35,66	35,7
B	Pertambangan dan	2,42	2,32	2,18	2,02	1,9
C	Industri Pengolahan	6,09	6,03	6,02	6,22	6,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,85	9,88	10,38	11,24	11,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	11,21	11,23	11,66	11,98	12,32
H	Transportasi dan	1,2	1,16	1,15	1,11	1,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,04	1,02	1,01	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	1,99	1,88	1,83	1,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,66	2,03	2	1,97	2,04
L	Real Estat	2,8	2,83	2,8	2,63	2,58
M,N	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13
O	Pertahanan dan Jaminan Sosial	13,87	13,73	13,33	12,46	11,7
P	Jasa Pendidikan	3,97	4,47	4,78	4,66	4,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,6	4,91	5,11	4,9	4,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,2	2,15	2,2	2,13	2,07
Produk	Domestik Regional Bruto (PDRB)	100	100	100	100	100

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan suatu pendekatan dan indikator penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Seiring dengan

perkembangan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita Kabupaten Bone Bolango terus mengalami peningkatan dengan capaian Rp.14.820.000 di tahun 2012, pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 16.276.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.18.321.000, serta pada tahun 2015 membaik menjadi Rp. 20.486.000

Tabel 3.5.
Agregat Produk Domestik Regional Bruto
Dan PDRB Perkapita Kabupaten Bone Bolango
Periode 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	1.939,08	2.175,27	2.424,75	2.768,30	3.137,78
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	1.838,62	1.975,88	2.126,54	2.290,61	2.439,87
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	13.401,17	14.820,66	16.276,65	18.321,70	20.486,13
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	12.706,89	13.462,15	14.274,89	15.160,16	15.929,59
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	5,32	5,94	6,04	6,2	5,08
Jumlah Penduduk (Jiwa)	144.695	146.773	148.971	151.094	153.166
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,52	1,44	1,5	1,43	1,37

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

d. Tenaga Kerja

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, sebesar 25,16% penduduk Bone Bolango bekerja disektor pertanian, diikuti sektor jasa sebesar 21,81%, Sektor Perdagangan sebesar 19,47% dan sisanya pada sector Industri Pengolahan sebesar 5,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian cenderung berperan strategis dalam pengurangan angka pengangguran. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada sektor pertanian tersebut sangatlah beralasan mengingat ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango sangatlah besar baik untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan pengembangan usaha perikanan kelautan.

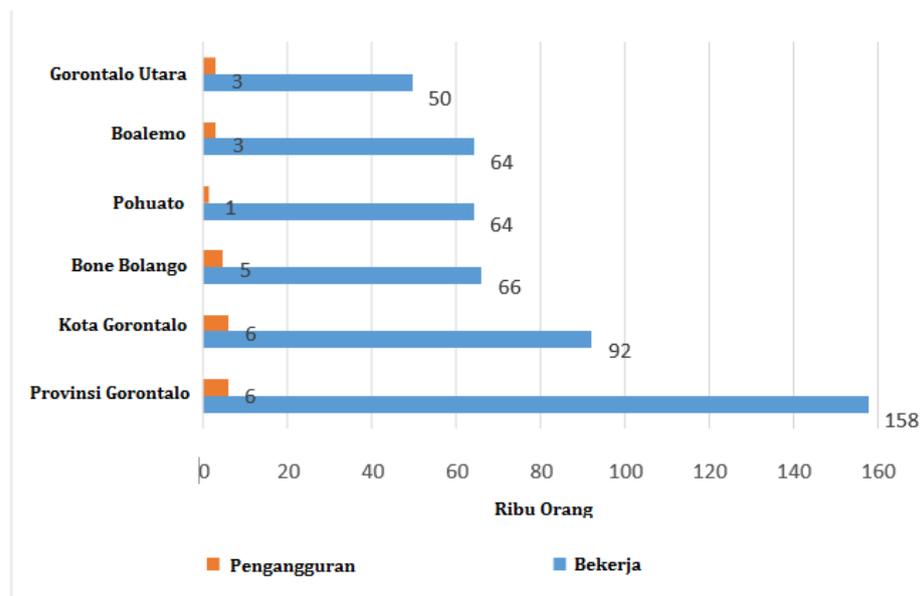
Tabel 3.6
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha
Periode 2010-2015

Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja Per Tahun (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	36,16	28,43	27,25	28,74	25,16	25,16
2. Industri Pengolahan	6,18	7,09	3,52	3,97	5,19	5,19
3. Perdagangan Besar, eceran, rumah makan dan Hotel	11,71	13,30	16,54	16,59	19,47	19,47
4. Jasa kemasyarakatan	22,44	24,81	25,47	25,93	21,81	21,81
5. Lainnya (pertambangan, listrik, gas, air, bangunan, transportasi dan keuangan)	23,50	26,37	27,22	24,77	28,37	28,37
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016

Angka pengangguran Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5% dibandingkan tahun 2014 sebesar 4,84%.

Grafik 3.2
Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Gorontalo Kab.Bolango
Tahun 2015



3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah

Tahun 2017 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah ketiga Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021. Beberapa tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh Kabupaten Bone Bolango kedepan adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang masih cenderung melambat walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sekunder dan tersier masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor industri dan jasa-jasa yang diharapkan menjadi sektor pemberi value added terbesar masih tertinggal dan mengalami penurunan pertumbuhannya. Perkembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, yang mempunyai basis sumber daya terbesar di Kabupaten Bone Bolango belum dibarengi dengan perkembangan sektor sekunder yang mampu memberikan akselerasi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Dinamika perekonomian nasional yang terkait dengan perkembangan fiskal nasional, moneter, perdagangan serta harga termasuk kebijakan pengendalian harga BBM dan kebutuhan dasar lainnya berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat. Langkah langkah untuk mengendalikan inflasi daerah harus tetap menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
3. Kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, dimana kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya berada dibawah 10% dalam lima tahun terakhir, sehingga pembiayaan pembangunan daerah lebih didominasi dan mengalami ketergantungan besar pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pendapatan pajak dan retribusi daerah masih dibawah 2% dari total pendapatan daerah.
4. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga untuk menjabarkan peran tanggung jawab daerah dalam pencapaian cita-cita nasional (NAWA CITA) yang telah menjadi agenda besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Beberapa target kinerja nasional yang sangat progresif menjadi tantangan utama yang harus terjabarkan dan bersinergi dengan pembangunan daerah.

5. Penggunaan dan penguasaan teknologi pengelolaan produk yang masih sangat rendah, sehingga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Kemampuan daerah untuk menemukenali dan mengembangkan produk unggulan daerah harus terus ditingkatkan dengan mengintegrasikan pengembangan potensi daerah secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir serta melibatkan perguruan tinggi didalamnya.
6. Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah masih kurang baik dari aspek kualitas maupun kuantitas yang perlu terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan dan dinamika perkembangan wilayah. Infrastruktur tersebut utamanya berkaitan sarana prasarana dasar daerah antara lain infrastruktur transportasi, sarana air bersih, sanitasi, sarana prasarana perhubungan, olahraga, perdagangan dan pariwisata yang merupakan sektor penyumbang pendapatan daerah.
7. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi mengharuskan Pemerintah Daerah semakin lebih kreatif dan adaptif dalam memobilisasi sumber daya pembangunan yang dimiliki. Kinerja program kegiatan harus lebih responsif dalam menjawab dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat diharapkan dapat meningkat dengan pertumbuhan diatas rata-rata laju pertumbuhan inflasi daerah. Walaupun kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 6,51%, pada tahun 2016 tahun 2017 diprediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami pertumbuhan positif kembali diatas 7% dengan asumsi instrumen belanja pembangunan pada sektor publik khususnya sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta alokasi belanja pembangunan untuk infrastruktur daerah semakin meningkat dan memberikan stimulus bagi mobilitas ekonomi masyarakat luas.

Demikian pula, walapun jumlah penduduk miskin kita naik menjadi 18,49% pada tahun 2015, namun jumlah penduduk miskin diharapkan secara bertahap dan berkesinambungan akan tetap dapat diturunkan melalui

berbagai strategi dan kebijakan yang terpadu dan komprehensif baik upaya perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pengembangan fasilitas dasar masyarakat. Pengurangan penduduk miskin ditargetkan dapat ditekan dibawah 16% pada akhir tahun 2017. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan program yang lebih *pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment* yang diyakini akan semakin dapat memberikan dampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 3.7.
Perbandingan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2014 - 2015

Kabupaten/ Kota	Tahun 2014					Tahun 2015					Perubahan P0	Kenaikan Garis Kemiskinan (%)
	Jumlah Penduduk Miskin	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)		
Boalemo	30,5	20,79	4,24	1,31	292.557	32,19	21,67	4,77	1,45	309.227	0,88	5,7
Gorontalo	77,66	21,05	3,45	0,9	323.578	80,52	21,8	4,55	1,4	343.373	0,75	6,12
Pohuwato	29,85	20,69	3,37	0,77	214.146	32,7	22,43	4,49	1,41	222.996	1,74	4,13
Bone Bolango	25,31	16,68	2,31	0,52	288.741	28,19	18,49	3,66	1,1	304.627	1,81	5,5
Gorontalo Utara	20,15	18,34	3,12	0,8	213.613	21,06	18,93	4,04	1,25	222.054	0,59	3,95
Kota Gorontalo	11,64	5,85	0,76	0,19	376.010	12,18	6,05	0,72	0,15	404.620	0,2	7,61

Penurunan angka pengangguran merupakan salah satu target strategis dalam tahun 2017 yang diproyeksikan dapat ditekan dibawah 4% pertahun. Seiring penurunan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen untuk memberikan stimulus fiskal yang besar bagi alokasi belanja langsung untuk pelayanan publik serta penciptaan iklim kondusif bagi kemudahan berinvestasi, pemberian bantuan usaha mikro yang ditargetkan akan dapat memberikan efek positif pada pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Bone Bolango yang saat ini sekitar 5% pada tahun 2015.

Tabel 3.8
Perkembangan dan Prospek Makro Ekonomi Tahun 2017
Kabupaten Bone Bolango

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	PDRB Harga Berlaku (jutaan rupiah)	2.175,27	2.424,75	2.768,30	3.137,78	3.570,00	3.810,15
	PDRB Harga Konstan (jutaan rupiah)	1.975,88	2.126,54	2.290,61	2.439,87	2.527,00	2.740,10
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun tertentu	7,47 %	7,63 %	7,72 %	6,51%	7,0%-7,5%	7,5-7,8%
3.	Tingkat Inflasi	4,5%	6%	7%	5 - 7%	5%	5% - 7%
4.	Stuktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)	Dominasi sektor pertanian 36,06%	Dominasi sektor pertanian 35,33%	Dominasi sektor pertanian 35,66%	Dominasi sektor pertanian 35,70%	Dominasi sektor pertanian <35%	Dominasi sektor pertanian <35%
5.	Angka Kemiskinan	>16,55%	17,19%	<16%	18,49%	<15,5%	16%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,94	3,88%	4,84%	5%	<4%	<4%
7.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	• PDRB Perkapita (Harga Berlaku)	14.820.660	16.276.650	18.321.700	20.486.130	>21.100.000	>22.300.00
	• Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Indeks)	0,43	0,43	0,41	0,41	<0,41	<0,40
	• Besaran IPM	65,13	65,82	66,03	66,83	>67	>67,5
8.	Berbagai macam besaran rasio/perbandingan						
	• Pajak/Retribusi Daerah Terhadap PDRB	0,8%	0,8%	1%	1,2%	>1%	>1,4%
	• Biaya (belanja langsung) Pendidikan/Kesehatan terhadap PDRB	3,71%	4%	4%	5%	>6%	>6%
	• Perbandingan Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan thdp PDRB	35,07%	47%	47%	49%	46%-50%	40%-50%
	• Struktur Pembiayaan :						
- Belanja langsung Vs Belanja tak langsung	47 : 53	48 : 52	48 : 52	48 : 52	40 : 60	55%-45%	
- Belanja Publik dan Aparatur	47 : 5	48 : 52	51 : 49	51 : 49	49 : 51	52%-48%	

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Berkualitas”. Pembangunan berkualitas yang dimaksud adalah membangun untuk manusia dan masyarakat; tidak memperlebar ketimpangan antar golongan dan wilayah; serta aktivitas pembangunan tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pembangunan infrastruktur tersebut sangat diperlukan dalam mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri.

Sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2017 sebagai tahun pertama RPJMN 2014-2019 antara lain :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% -6,6%.
2. Penurunan angka penangguran 5,2%-5,5%.
3. Penurunan angka kemiskinan 10% - 9%.
4. Laju inflasi dibawah 4%.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 tetap menjaga sinergitas dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 untuk memantapkan perekonomian nasional dalam upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah, perbaikan infrastruktur dasar wilayah, peningkatan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sinergis dengan kebijakan ekonomi nasional dan regional kedepan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 diharapkan dapat:

- (1) Meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 7,5% serta penguatan struktur ekonomi daerah kearah pembangunan sektor sekunder melalui pengembangan kinerja sektor-sektor riil yang didukung oleh infrastruktur memadai serta pengembangan komoditas unggulan yang dapat menjadi pendorong berkembangnya ekonomi

rakyat dan usaha ekonomi pedesaan. Peningkatan kemampuan perekonomian daerah diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Meningkatkan daya saing ekonomi regional dengan mendorong perbaikan infrastruktur dasar wilayah yang merata dan berkeadilan khususnya wilayah kecamatan tertinggal, pengembangan pusat-pusat layanan kabupaten dan kecamatan, pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pendidikan, kawasan minapolitan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan produksi pertanian dan kawasan lainnya yang dapat mendukung akselerasi percepatan pembangunan daerah dalam jangka menengah.
- (3) Meningkatkan investasi daerah dalam mengakselerasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui fasilitas kemudahan berinvestasi baik pelayanan perizinan maupun non perizinan, pemberian insentif bagi investor, penyediaan data dan informasi, serta menjamin kepastian hukum berusaha dan peningkatan produktivitas guna memperkuat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonomi.
- (4) Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas utama daerah untuk mendukung kedaulatan pangan nasional serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang dapat menjadi sektor base dan prime mover pembangunan daerah. Sektor basis tersebut diprioritaskan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan serta industri pengolahan yang terintegrasi dengan sektor primer, dengan memperhatikan daya dukung wilayah serta keseimbangan ekosistem lingkungan..
- (5) Meningkatkan upaya-upaya perluasan dan percepatan penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan pada tahun 2017 dapat ditekan dibawah 14,5%. Perluasan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas pada akhir tahun 2017. Harus dilakukakn berbagai fasilitasi program

dan kegiatan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dalam penyediaan perumahan atau pemukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha ekoomi produktif, fasilitasi sambungan air bersih, bantuan jamban sehat, dan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin, memperkuat pelaksanaan Program bantuan beras (RASKIN), PKH, jaminan kesehatan masyarakat, bantuan siswa miskin (BSM), serta pemberian beasiswa berprestasi bagi siswa miskin tapi berprestasi pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggaran yang tersedia baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan baik DAU, DAK maupun dana bagi hasil, serta pendapatan lainnya yang memperkuat APBD Kabupaten Bone Bolango, Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan bersinergi dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, APBD Provinsi Gorontalo, hibah, dana kemitraan swasta atau kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta partisipasi masyarakat luas dalam berperan aktif mendukung pembangunan daerah`

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.Pembiayaan

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

3.4.1. Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan

Struktur keuangan dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam beberapa periode terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan walaupun peningkatan pendanaan tersebut masih didominasi oleh transfer pusat ke daerah. Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dengan mendayagunakan dan mengelola potensi sumber daya daerah agar menjadi stimulus utama bagi terciptanya sumber pendapatan daerah yang mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Ringkasan Struktur APBD Kabupaten Bone Bolango
Realisasi 2015- 2016 dan Proyeksi Tahun 2017

No	URAIAN	Anggaran Tahun 2015	Anggaran Tahun 2016	Estimasi Anggaran Tahun 2017
PENDAPATAN		635,114,833,583.72	882,226,435,586.00	1,021,989,718,659.03
1.1	Pendapatan Asli Daerah	59,547,484,925.00	59,547,484,925.00	62,524,859,171.25
1.2	Dana Perimbangan	509,892,554,012.00	636,123,428,012.00	712,331,014,687.84
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	130,540,042,209	186,555,522,649.00	247,133,844,799.94
BELANJA		740,650,467,939.00	894,490,826,474.00	1,021,989,718,659.03
2.1	Belanja Tidak Langsung	447,284,426,983.00	554,134,124,632.00	567,069,172,109.93
2.2	Belanja Langsung	293,366,040,956.00	340,356,701,842.00	454,920,546,549.10
PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	44,670,386,793.00	44,670,386,793.00	51,370,944,811.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	46,000,000,000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0.00	0.00	0.00

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu elemen strategis kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk lebih dapat memberikan stimulus fiskal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar serta upaya perluasan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan anggaran sedapat mungkin dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan mengedepankan keseimbangan pendapatan dan belanja daerah. Surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan bagi pembentukan dana cadangan untuk membiayai program-program strategis yang sifatnya multiyears secara bertahap akan dikembangkan.

3.4.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang dikelompokkan atas :

- a. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada Kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.
- d. Selain sumber pendapatan yang disebutkan diatas, pendapatan lain yang dikelola oleh daerah adalah pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola mulai pada tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah selang tahun 2014 -2017 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Realisasi 2015-2016 dan Proyeksi 2017 Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Pendapatan Daerah	Pagu Anggaran Tahun 2015	Pagu Anggaran Tahun 2016	Pagu Anggaran Tahun 2017
1.1	Pendapatan Asli Daerah	59,547,484,925.00	59,547,484,925.00	62,524,859,171.25
1.1.1	Pajak Daerah	7,000,000,000.00	7,150,000,000.00	7,507,500,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	3,032,750,000.00	3,039,750,000.00	3,191,737,500.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	730,000,000.00	450,000,000.00	472,500,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48,784,734,925.00	48,907,734,925.00	51,353,121,671.25
1.2	Dana Perimbangan	509,892,554,012.00	636,123,428,012.00	712,331,014,687.84
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	20,616,878,012.00	20,616,878,012.00	23,086,779,997.84
1.2.2	Dana Alokasi Umum	426,858,306,000.00	495,597,190,000.00	555,372,861,362.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	62,417,370,000.00	119,594,360,000.00	133,871,373,328.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	130,540,042,209.00	186,555,522,649.00	87.133.844.799,94
1.3.1	Hibah	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,359,400,000.00
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	16,780,984,709.00	16,860,984,709.00	18,880,930,677.14
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64,285,992,000.00	54,428,986,000.00	60,949,578,522.80
1.3.6	Pendapatan lainnya	44,053,065,500.00	108,743,551,940.00	3,943,935,600.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 +1.3)		561,366,657,863.13	882,226,435,586.00	861.989.718.659,03

Sumber Data : DPPKADKab. Bone Bolango dan Analisis

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi dan target pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango diprediksi terus meningkat. Pada tahun 2016 direncanakan naik sebesar 19,73% dan tahun 2017 diproyeksikan sebesar 23,64%. Peningkatan pendapatan daerah tersebut masih didominasi oleh peningkatan dana transfer daerah melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana bagi hasil, Pada tahun 2017, diprediksi Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah akan meningkat signifikan utamanya disebabkan oleh kemungkinan adanya alokasi Dana Insentif Daerah (DID) karena pencapaian kinerja opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kenaikan Dana Desa secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2017, Pendapatan Daerah diproyeksikan berada dalam kisaran \pm Rp 1,021 milyar atau naik 15,95% dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar Rp.882 milyar. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 tersebut setelah mempertimbangkan kemungkinan proyeksi beberapa sumber pendapatan seperti pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain. Proyeksi PAD tahun 2017 targetkan sama dengan tahun 2016 yakni sebesar Rp 62,5 milyar atau lebih tinggi dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD 2016 sebesar Rp. 59,5 milyar.

Dengan kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih rendah tersebut, diperkirakan peranan dana perimbangan utamanya dana alokasi umum masih merupakan sumber pendapatan yang akan menjadi penopang utama pembangunan daerah. Pada tahun 2017 ditargetkan proporsi dana perimbangan akan naik signifikan sesuai dengan arah kebijakan fiskal nasional yang lebih memperkuat peran dana-dana desentralisasi dalam pembiayaan pembangunan daerah. Ditargetkan kenaikan dana perimbangan kurang lebih mencapai 15%. Peran dan kontribusi pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pembangunan terus diperkuat sebagai upaya untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan fiskal dalam jangka panjang.

Selain dana perimbangan, peranan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah dan dana darurat serta bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi masih diharapkan akan memberikan kontribusi penting dalam penerimaan daerah, walaupun diprediksi bahwa sumber pendapatan ini besarnya akan cenderung fluktuatif tergantung dengan kondisi dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah disamping upaya-upaya ekstensifikasi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain.

Disamping itu, pendapatan asli daerah merupakan indikator penting bagi penguatan kapasitas fiskal dan derajat kemandirian fiskal daerah.

Beberapa kebijakan strategis yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahun 2014 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara seksama dengan melakukan revitalisasi penetapan tarif obyek pajak secara proporsional.
- b. Memperkuat kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengendali dan pengelola pendapatan daerah dapat memperkuat kelembagaan baik secara struktural maupun fungsional untuk berperan dan bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak/retribusi termasuk pengelolaan PBB-P2. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah harus menjadi bagian integral dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, melalui upaya:
 - Merevitalisasi dan pendataan subjek dan objek pajak/retribusi daerah termasuk PBB-P2 lebih akurat untuk menjamin bahwa seluruh subjek dan objek yang ada telah resmi ditetapkan sebagai wajib pajak.
 - Melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah atau peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk yang berkaitan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak. Selain itu, menginventarisir potensi sumber-sumber pendapatan baru dan menindaklanjuti dengan penerbitan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah baru sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan dampaknya pada terjadinya distorsi pasar.

- Monitoring dan pengendalian pengumpulan pajak dan retribusi daerah secara kontinu dan berkesinambungan dengan terus membandingkan antara target dan realisasi maupun antara potensi dan target.
 - Meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan pemungutan sumber- sumber PAD serta menerapkan *reward* dan *punishment* dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha untuk berinvestasi sehingga berdampak pada perluasan potensi objek pajak dan retribusi daerah.
 - Meningkatkan kinerja PDAM, BLU RS. Toto, dan BUMD sebagai kontributor PAD melalui pengelolaan yang profesional, produktif, inovatif dan kompetitif.
 - Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat serta meningkatkan sosialisasi sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak/retribusi.
 - Meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai potensi riil basis pajak/retribusi daerah.
 - Mengembangkan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam manajemen kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berdampak positif dalam pencapaian kinerja lain-lain PAD yang sah dalam bentuk pendapatan bunga dan jasa lainnya.
 - Mengintensifkan upaya penanganan tuntutan ganti rugi terhadap pihak terkait sebagai upaya menyelamatkan keuangan daerah.
- d. Mendayagunakan pengelolaan aset-aset daerah.

Peningkatan PAD juga dapat dicapai melalui pendayagunaan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Optimalisasi aset daerah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perbaikan manajemen aset daerah antara lain sarana pariwisata, sarana perdagangan (pasar-pasar tradisional), dan sarana pengolahan air bersih yang potensinya cukup menjanjikan untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pendayagunaan manajemen aset juga dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan masyarakat/dunia usaha atau pengembangan kerja sama antar wilayah.

- e. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi dalam upaya peningkatan pendapatan pajak/retribusi daerah dengan basis pembangunan ekonomi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak/retribusi daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan kegiatan pembangunan yang mendukung potensi pajak daerah.
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang keuangan
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan ekstensifikasi dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat pengelola pajak/retribusi daerah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang relevan.
- g. Meningkatkan koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat dan valid dalam rangka penetapan alokasi dana perimbangan sehingga alokasi dana perimbangan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan daerah.
- h. Membantu peningkatan pemungutan pajak pusat seperti PPh, dan lain-lain pajak pusat guna meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil.
- i. Peningkatan pengawasan manajemen pendapatan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pengelolaan pendapatan daerah yang dimulai sejak tahap perencanaan termasuk penetapan target pendapatan, potensi objek pajak/retribusi, serta tahap pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi.

3.4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2015 s/d 2017 yakni sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2015 s/d Tahun 2017

No	Jenis Belanja Tidak Langsung	Realisasi Tahun 2015	Pagu Anggaran Tahun 2016	Proyeksi /Target Tahun 2017
2.1	Belanja Tidak Langsung	407,038,666,356.00	554,134,124,632.00	567,069,172,109.93
2.1.1	Belanja Pegawai	313,972,201,572.00	387,547,283,030.00	390,800,120,011.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	1,000,000,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	17,784,768,000.00	5,050,000,000.00	4,040,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,147,886,075.00	8,137,208,000.00	8,625,440,480.00
2.1.6*)	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
2.1.7*)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	66,581,329,209.00	152,649,633,602.00	161,808,611,618.13
2.1.8	Belanja tidak terduga	552,481,500.00	750,000,000.00	797,000,000.00
2.2	Belanja Langsung	282,636,680,792.00	340,356,701,842.00	454,920,546,549.10
2.2.1	Belanja Pegawai	46,003,763,302.00	50,892,278,850.00	59,264,058,720.83
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,306,658,393.00	130,701,961,936.00	162,702,434,674.47
2.2.3	Belanja Modal	128,326,259,097.00	158,762,461,056.00	232,954,053,153.80
JUMLAH BELANJA DAERAH 28(2.1 + 2.2)		689,675,347,148.00	894,490,826,474.00	1,021,989,718,659.03

Sumber Data : DPPKAD Kab.Bone Bolangodan Analisis

Perbandingan komponen belanja tidak langsung (BTL) dan Belanja langsung ditargetkan yakni BTL 55% dan dan BL sejumlah 45%. Alokasi belanja tidak langsung bukan hanya belanja gaji pegawai tetapi juga belanja yang diperuntukan untuk masyarakat dan kepentingan publik seperti belanja hibah, bantuan sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja publik tahun 2017 ditargetkan semakin lebih baik dari tahun 2017 yang diprediksi sejumlah >55%.

Belanja daerah tahun 2017 akan lebih fokus pada alokasi belanja untuk penguatan pembangunan infrastruktur dasar wilayah, serta pembangunan pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan diarahkan dengan alokasi minimum 20% dan untuk mendukung fungsi kesehatan minimum 10% dari total belanja daerah serta peningkatan infrastruktur jalan sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan tetap melanjutkan pengalokasian anggaran untuk perluasan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian daerah.

Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pembelanjaan daerah dengan pendekatan kinerja (*performance-based budgeting*) maka belanja program dan kegiatan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada indikator kinerja, sasaran program SKPD dan berpedoman pada Renstra dan Renja SKPD sehingga pembiayaan operasional SKPD seperti belanja pegawai (honorarium) belanja telepon, air, listrik dan internet, belanja ATK, belanja sarana dan prasarana perkantoran serta perjalanan luar dan dalam daerah harus sesuai dengan kebutuhan riil, prinsip efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaranprogram dan kegiatan strategis SKPD.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2017 diarahkan pada beberapa prioritas berikut:

1. Kebijakan belanja daerah untuk Periode 2017 masih akan dititikberatkan pada lima Program strategis, yakni pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah.
 - 1) Pengurangan rakyat miskin dan pembangunan desa tertinggal
 - 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan.

- 3) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah
 - 4) Peningkatan akses dan mutu pendidikan
 - 5) Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan
2. Alokasi belanja untuk mendukung program prioritas sekurang-kurangnya 70% dari total APBD dikurangi belanja pegawai.
 3. Meningkatkan alokasi belanja pada upaya perluasan dan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi rakyat miskin di Kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan fasilitasi ekonomi produktif bagi masyarakat miskin seperti bantuan peternakan (sapi, ayam, dll), penanganan lahan kritis (lahan tidur), fasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan laut dan air tawar, bantuan fasilitas peralatan produksi dan modal usaha berupa barang bagi usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi, serta penyediaan pemukiman rakyat yang layak huni/hunian pantas yang ditopang oleh penyediaan listrik dan instalasi air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 4. Peningkatan kapasitas pembangunan desa dalam upaya penguatan dan mendukung terwujudnya desa tumbuh daerah maju melalui instrumen Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa serta sumber keuangan lainnya. Pemanfaatan dana desa di prioritaskan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar skala desa serta menunjang mobilitas ekonomi masyarakat desa. Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Umum Desa (TPPUD) untuk tahun 2017 akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2017 penunjang operasional pemerintah desa akan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan berlaku serta penyediaan sarana prasarana pemerintah desa utamanya kantor desa dan kendaraan operasional akan menjadi prioritas penting.
 5. Mengembangkan program afirmatif untuk mendukung percepatan pengurangan rakyat miskin serta pengentasan desa tertinggal melalui instrumen fiskal dengan target sasaran kelompok masyarakat tertentu serta desa-desa sangat tertinggal.
 6. Mensinergikan dan mengintegrasikan rencana belanja program kegiatan SKPD dengan rencana program yang dilaksanakan melalui instrumen APBD

desa. Pelaksanaan rencana anggaran melalui APBD desa diarahkan pula untuk mendukung pencapaian serta prioritas pembangunan daerah tahun 2017.

7. Mengalokasi belanja modal minimal 30% dari total belanja langsung untuk kepentingan rakyat dalam upaya peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur dan belanja pengadaan barang dan jasa yang dapat memberi dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur keseluruh wilayah, meningkatkan aksesibilitas wilayah (antar pusat-pusat pemukiman, antar pusat-pusat produksi dan pemasaran), membuka keterisolasian wilayah-wilayah terpencil khususnya Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Bulango Ulu, serta penataan kawasan pemerintahan dan kawasan strategis lainnya dengan melakukan perbaikan kualitas infrastruktur pada pusat pemerintahan, peningkatan akses masyarakat terhadap air minum, listrik, sanitasi lingkungan serta infrastruktur pemukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur irigasi akan terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah.
8. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Belanja untuk penataan infrastruktur wilayah dialokasikan untuk (1) pembangunan atau peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten yang dipandang penting dan mendesak termasuk memberikan prioritas khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan pinogu dan bulango ulu serta penyiapan lahan yang pembukaan jalan lintas Suwawa-Kabila Bone. Disamping itu beberapa jalan desa atau jalan lintas desa yang memberikan dampak luas akan diprioritaskan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Prioritas penataan lingkungan pemukiman meliputi normalisasi sungai, pembangunan drainase, pembangunan sarana air bersih, pembangunan RTH, pembangunan sarana pengelolaan limbah dan persampahan, (3) pengembangan sarana prasarana pemerintahan. Pada tahun 2016 akan dialokasikan anggaran menunjang pembangunan

infrastruktur baik berupa penyediaan master plan infrastruktur, perencanaan teknis infrastruktur, dokumen lingkungan serta penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

9. Mengalokasikan anggaran pendidikan dengan arah utama untuk mendukung program Bone Bolango Cerdas dengan alokasi minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2017 termasuk belanja gaji guru. Belanja ini dialokasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung perbaikan angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, angka dan mutu kelulusan siswa, peningkatan ketersediaan dan mutu tenaga pendidik, serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk pemberian beasiswa siswa dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, beasiswa bagi guru berprestasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya yang bertugas pada wilayah wilayah terpencil.
10. Mengalokasikan anggaran sektor kesehatan untuk pelayanan yang bermutu dan terjangkau dengan alokasi minimal 10% sesuai amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Arah belanja sektor kesehatan tersebut diarahkan pula untuk penyediaan fasilitas mobil layanan kesehatan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, pembangunan/rehabilitasi Rumah Sakit Toto dan Tombulilato, pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, penyediaan operasional Puskesmas, peningkatan kapasitas tenaga medis dan insentif paramedis, perbaikan gizi, pengentasan penyakit menular dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan pelaksanaan imunisasi daerah untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) dan cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
11. Meningkatkan alokasi anggaran sektor-sektor ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan program-program unggulan daerah serta mengembangkan interkoneksi antar sektor. Belanja pada sektor ini menjadi bagian dari

program populer pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam upaya akselerasi pembangunan ekonomi daerah seperti pengembangan wisata lombong dan danau perintis, serta pengembangan kopi pinogu dan pertanian organik sebagai *branding* produk unggulan daerah serta pengembangan gula Aren.

12. Belanja peningkatan kapasitas birokrasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui kegiatan penguatan peran kepala daerah dan wakil kepala daerah, penataan manajemen dan administrasi pemerintahan, pembinaan aparatur dan pengembangan karir ASN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik diklat struktural, fungsional dan diklat teknis, analisis jabatan, pengadaan pegawai, peningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab, serta penguatan pemerintahan kecamatan khususnya dalam melaksanakan sebagian kewenangan pelayanan dan perizinan yang dilimpahkan kepada pemerintahan kecamatan. Disamping itu, alokasi belanja pemerintahan diarahkan pula untuk penguatan peran dan fungsi perencanaan, koordinasi pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Alokasi belanja untuk penataan birokrasi dan tata laksana pemerintahan akan diprioritaskan pula untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur berupa perbaikan tunjangan tambahan penghasilan aparatur dengan pembayaran setiap bulan mulai Januari 2016.
13. Mengalokasikan belanja operasional kegiatan pemerintah kecamatan sesuai dengan kebutuhan wilayah berdasarkan alokasi dasar, alokasi proporsional dan alokasi kebutuhan khusus. Pada tahun 2017 program kegiatan pemerintahan kecamatan diprioritaskan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian program pembangunan termasuk berkenaan dengan kegiatan pembangunan pedesaan melalui APBD Desa, serta pembinaan kemasyarakatan.
14. Merumuskan rencana program kegiatan multiyears untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan optimalisasi capaian kinerja program khususnya

untuk program kegiatan pembangunan skala besar yang pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.

15. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta melakukan pengukuran kinerja program dan kegiatan setiap triwulan sebagai dasar merasionalkan anggaran dalam mengimplementasikan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pengawasan baik oleh aparaturnya pengawasan fungsional dan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat.
16. Mengefisiensikan belanja aparaturnya khususnya belanja perjalanan dinas dan operasional kantor pada semua SKPD dengan mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan perencanaan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, serta pengendalian & evaluasi.
17. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel khususnya oleh setiap satuan kerja serta penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standard akuntansi pemerintah.
18. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta tambahan belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan kejadian darurat yang tidak teralokasikan sebelumnya.
19. Berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu sehingga pelaksanaan anggaran dapat mempercepat pergerakan sector-sektor riil masyarakat dan dunia usaha.

3.4.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah dapat berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang mendominasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bone Bolango sejak daerah ini dibentuk.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2015 s/d 2017

No	Jenis Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2015	Pagu Anggaran Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	44,670,386,793.00	80,691,466,683.91	148,869,607,031.01
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	44,670,386,793.00	80,691,466,683.91	148,869,607,031.01
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	48,670,386,793.00	84,691,466,683.91	152,869,607,031.01

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada tambahan penyertaan modal pada Bank SULUT yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, serta penyertaan modal kepada PDAM untuk mendukung peningkatan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyertaan modal pada BUMD akan dilaksanakan secara lebih selektif dan terarah dengan memperhatikan kemampuan dan kesehatan manajemen pengelolaan BUMD.

Arah kebijakan untuk penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2017 dilakukan sebagai berikut:

- ❖ Meminimalisir target SILPA pada tahun 2017 yang antara lain melalui percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik (konstruksi) baik yang bersumber dana DAK maupun sumber-sumber pendanaan APBD lainnya.
- ❖ Pencairan dana cadangan ditargetkan nihil. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan fiskal daerah belum melakukan pembentukan dana cadangan khususnya untuk pembiayaan program-program strategis daerah yang sifatnya multi years.
- ❖ Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan nihil karena Pemerintah Daerah belum memiliki rencana untuk melakukan penjualan beberapa asset daerah yang dipisahkan.
- ❖ Penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2017 belum direncanakan, namun dalam jangka menengah akan dikaji pengusulan kebutuhannya dalam rangka mendukung pelayanan publik serta kegiatan daerah yang produktif.

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, Tahun 2017 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ketiga 2016-2021 yang menitikberatkan pada kelanjutan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan untuk mewujudkan masyarakat maju dan bermartabat menuju Bone Bolango Cemerlang 2021. Sebagai tahun kedua RPJMD Ketiga (2016-2021), kebijakan utama pembangunan daerah diarahkan pada:

1. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan.
2. Peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan bersih dan berwibawa.
3. Peningkatan kualitas layanan publik.
4. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin bermutu.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Pengembangan produk unggulan daerah.
7. Percepatan pengembangan infrastruktur dasar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
8. Percepatan penataan pusat pemerintahan kabupaten dan kecamatan, serta pengembangan kawasan-kawasan strategis.
9. Pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam
10. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango 2005-2025, maka Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango

dalam rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, adalah sebagai berikut:

A. Visi

“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”

CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang “*Unggul dan Berdaya saing*” serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

Cerdas : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.

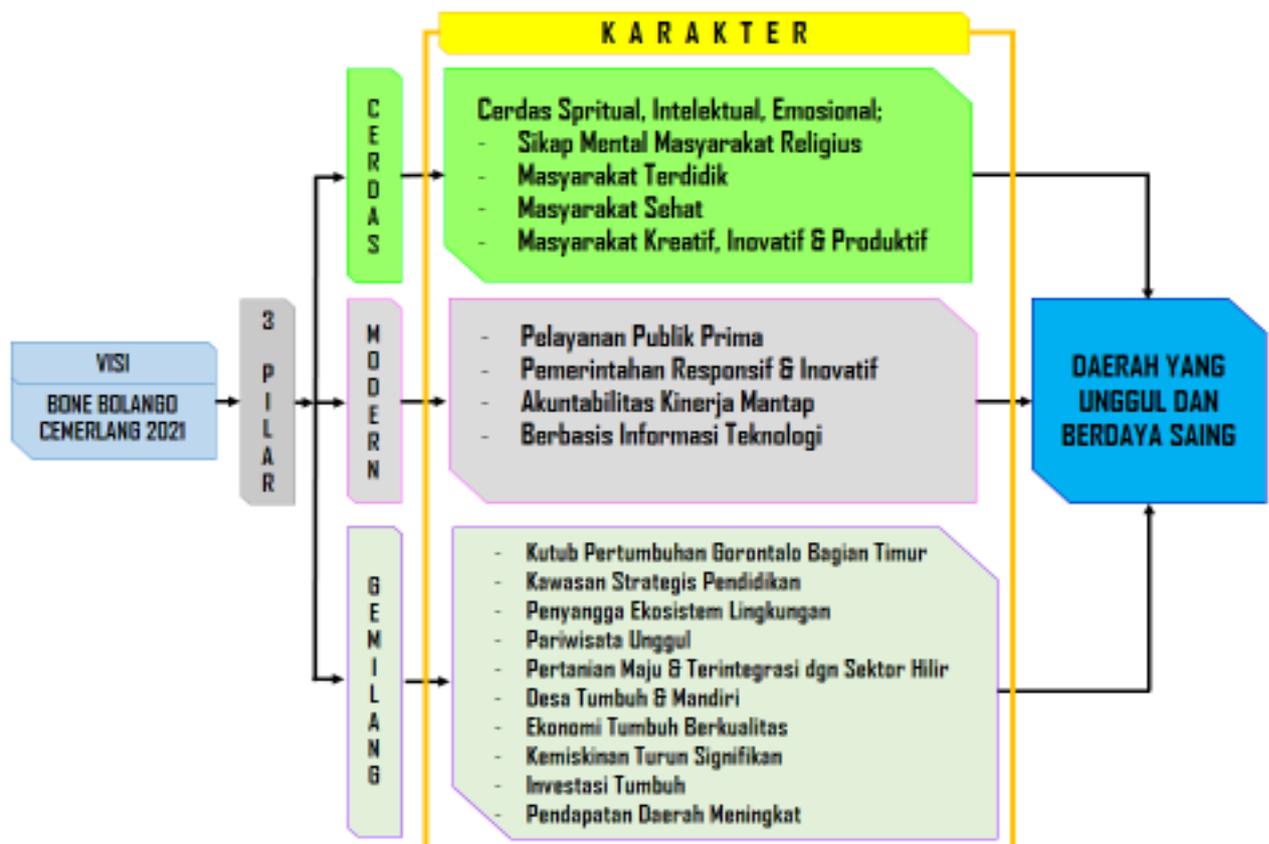
Modern : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Gemilang : Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah

dengan keunggulan comparative dan keunggulan competitive. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir integrated*), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.

Gambar 4.1.

Visi dan Karakter Utama Visi Daerah
Dalam Rancangan RPJMD 2016-2021



B. Misi

Misi Kesatu: Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

Misi Kedua: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Misi Ketiga: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer

khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

Misi Keempat: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya

Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

Keempat misi pembangunan tersebut difokuskan dalam tiga dimensi pembangunan utama yakni:

A. Dimensi Pembangunan Manusia

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi **“Prime Mover”** pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan

berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul

ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

Gambar 4.2.
Dimensi Pembangunan dan Sasaran Utama Pembangunan
Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021



4.2. Prioritas Pembangunan 2017

A. Tema dan Sasaran RKP Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian lembaga/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RKP 2017 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial untuk memastikan terwujudnya koordinasi, sinergi dan keterpaduan kebijakan dan program

pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan wilayah dan daerah.

RKP 2017 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 adalah **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”**.

Tema pembangunan tersebut disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi arahan Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Beberapa dimensi pembangunan yang menjadi agenda penting Nawa Cita yakni sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas : sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan

melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industry dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.

Untuk mempertegas target kinerja pada tahun 2017, beberapa sasaran makro pembangunan nasional yang menjadi target kinerja pemerintah, antara lain:

Sasaran Makro	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	Target 2017	Akhir RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	4,8	6,6	7,1	8,0
Pengangguran (%)	5,94	6,18	5,2 – 5,5	5,2 - 5,5	4,0 – 5,0
Kemiskinan (%)	10,96	11,13	9,0 – 10,0	7,5 – 8,5	7,0 – 8,0
Gini Ratio (Indeks)	0,41	0,41	0,39	0,38	0,36
Index Pemb, Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,3
Index Pemb. Masy. (IPMAS)	0,55	n.a	n.a	n.a	Naik

B. Tema dan Sasaran RKPD Provinsi 2017.

Dalam kerangka mendukung pembangunan nasional, Tema Utama Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yakni “Terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia dan memacu pembangunan infrastruktur daerah, untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan” dengan prioritas pembangunan diarahkan pada :

- (1) Memantapkan perekonomian daerah,
- (2) Penguatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM dan
- (3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo untuk tahun 2017, diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran makro sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan tumbuh 7,8% – 8,5%
- Laju inflasi ditargetkan pada kisaran 4% – 7%
- Pengangguran Terbuka ditargetkan pada kisaran 3,50%
- Angka Kemiskinan diharapkan dapat mencapai angka 13% – 10%
- Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan pada kisaran 73,76%
- Indeks Gini dibawah 0,34%

C. Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 sebagaimana digambarkan diatas, serta mencermati kebijakan strategis nasional dan regional serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, maka Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut : **“Melanjutkan Pembangunan Desa dan Infrastuktur Berkelanjutan untuk Mengurangi Kemiskinan”**. Tema pembangunan tahun 2017 merupakan kesinambungan rencana pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Seluruh stakeholders pembangunan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan tahun 2016 menyepakati bersama untuk perlu terus memantapkan upaya pengurangan rakyat miskin secara berkesinambungan. Pencapaian upaya tersebut dilaksanakan dengan menempatkan pembangunan desa sebagai basis pembangunan yang didukung oleh ketersediaan dan

peningkatan kualitas infrastruktur secara terus menerus dan terarah mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka menengah 2016-2021.

Dengan mengacu pada arahan rancangan RPJMD 2016-2021, maka implementasi spirit pembangunan yang menjadi tema utama pembangunan 2017 diarahkan pada 5 prioritas unggulan utama program pembangunan (*Leading Program*) serta 1 prioritas pendukung (*Supporting Program*).

a. Prioritas Utama sebagai Leading Program

1. Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal

Prioritas pengurangan rakyat miskin difokuskan pada 5 (lima) bentuk intervensi. Intervensi *Pertama* diarahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan social dengan sasaran pemenuhan hak dasar utama seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Intervensi *kedua*, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis perdesaan, perkotaan, serta wilayah tertinggal. Disamping itu pemberdayaan masyarakat berdasarkan sector, dengan cara mengembangkan skema program sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil masyarakat. Intervensi *ketiga*, diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil seperti pembiayaan dalam bentuk bantuan permodalan, akses modal serta akses pasar produk; dan pendampingan serta peningkatan keterampilan manajemen usaha. Intervensi *keempat* yakni penyediaan sarana prasarana dasar rumah tangga berupa peningkatan akses pada rumah layak, penyediaan akses sanitasi dan air bersih, akses listrik dan prasarana dasar lainnya. Intervensi *kelima* yakni melalui kebijakan affirmative dengan mengembangkan program khusus pada wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan dan ketertinggalan.

Sedangkan pengentasan desa tertinggal diarahkan melalui 4 (empat) fokus kebijakan; *pertama* yakni penguatan kelembagaan dan kapasitas pembangunan desa, *kedua* yakni percepatan pembangunan infrastruktur desa, *ketiga*; pengembangan ekonomi desa dengan memperkuat unggulan desa, *keempat* yakni pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

3. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone Bolango secara adil dan merata melalui penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (*Universal Health Coverage*), serta peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat, peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan KB, pemberantasan penyakit menular dan penanganan penyakit tertentu dengan prevalensi tinggi, penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga

kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan dilakukan juga melalui pemenuhan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang didukung dengan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasinya.

4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Daerah

Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan stabilitas, keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango yang diarahkan melalui (1) peningkatan produksi dalam daerah khususnya beras secara berkelanjutan, peningkatan keanekaragaman dan ketersediaan produksi pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta olahannya, (2) pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif yang menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat (4) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli khususnya bagi masyarakat tertentu yang rawan pangan (5) Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan (6) mendorong, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan keanekaragaman pangan (7) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan. Percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan didorong melalui pengembagan produk unggulan daerah dibidang kepariwisataan khususnya pariwisata alam dan budaya, pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan dan berbasis komunal, pengembangan pertanian organik, pengembangan industri kopi pinogu dan gula aren

serta usaha industri berbasis sumber daya alam pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengembangan unggulan jasa layanan kesehatan.

5. Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan

Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten. Pengembangan sarana prasarana wilayah khususnya infrastruktur transportasi, energi listrik, telekomunikasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, sumber daya air, perumahan pemukiman, serta sarana-prasarana ekonomi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mobilitas manusia, barang maupun jasa secara lokal maupun regional, peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan transportasi diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan baik pembangunan terminal, moda transportasi maupun rekayasa jalan dan pengaturan perilaku lalu lintas melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta terbentuknya struktur dan pola ruang yang terarah, efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan infrastruktur jalan yang eksisting, pengembangan aksesibilitas pada wilayah terpencil dan terisolasi khususnya wilayah Pinogu dan Bulango Ulu dan beberapa titik diwilayah Bone Pesisir. Pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan pula pada penyiapan dokumen serta pengadaan lahan untuk pembukaan akses lintas selatan Suwawa – Kabila Bone serta pembukaan akses Suwawa Selatan – Tulabolo Barat Suwawa Timur. Disamping itu, dukungan infrastruktur jalan pada kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan serta kawasan strategis lainnya akan terus diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Prioritas Pendukung sebagai Supporting Program

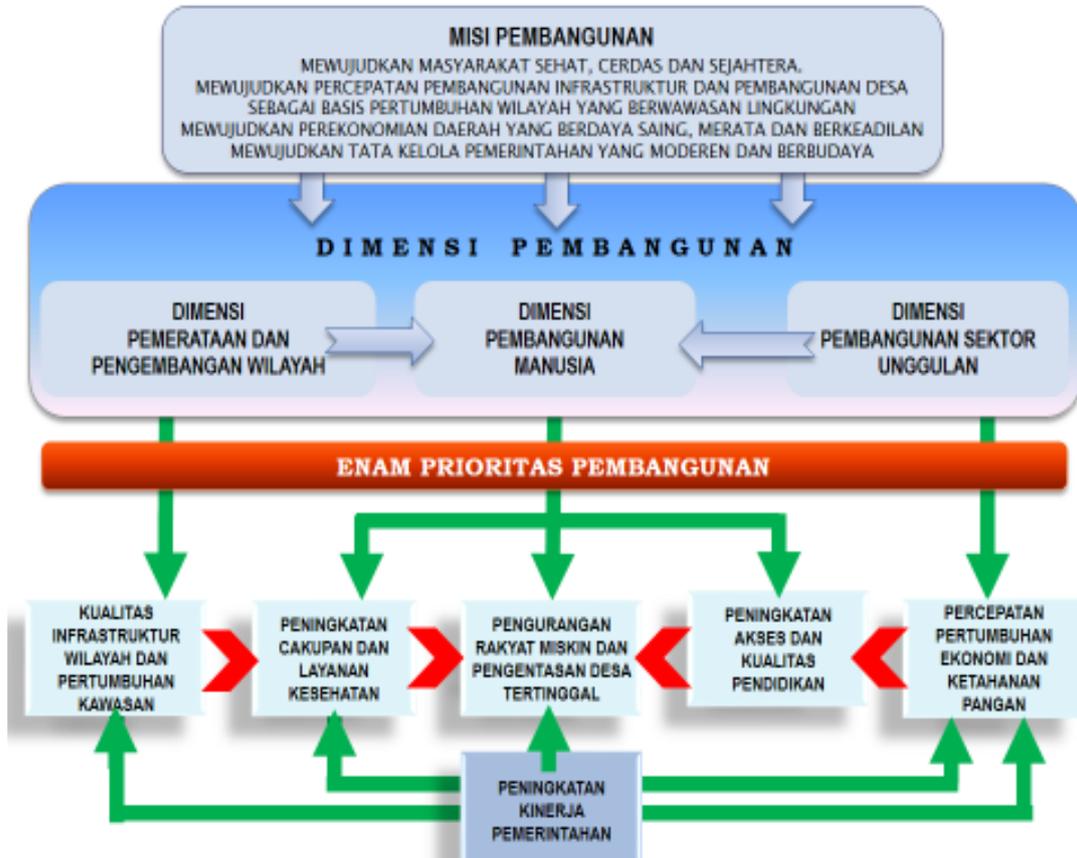
Agenda prioritas pendukung yakni difokuskan pada Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan Aparatur Sipil Negara.

Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, serta integritas etika dan moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas layanan publik.

Peningkatan kapasitas aparatur daerah dilakukan melalui pembinaan aparatur yang terarah dan berkesinambungan serta pendidikan dan pelatihan aparatur baik diklat fungsional, diklat teknis, diklat kepemimpinan maupun pendidikan akademik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

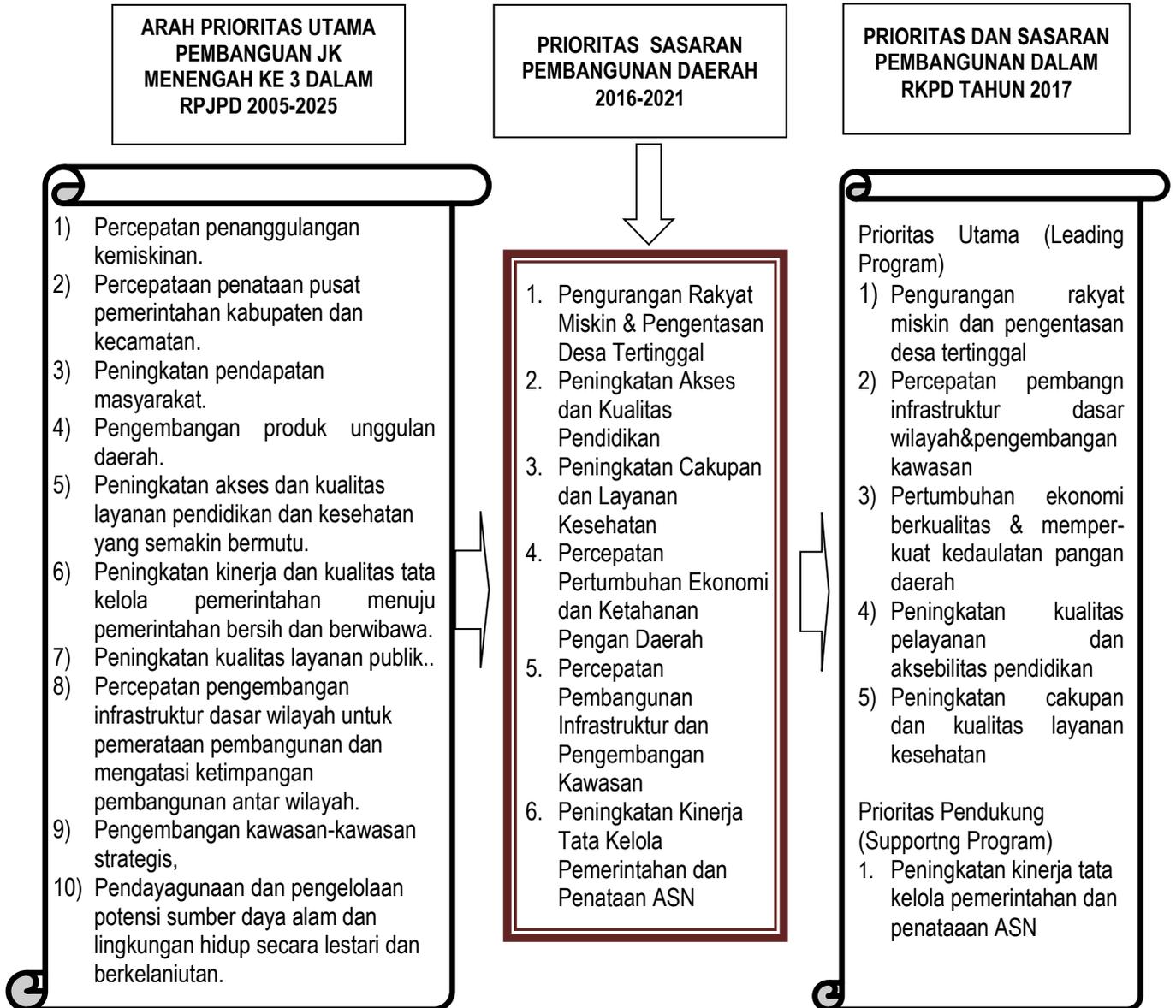
Pengembangan aparatur diarahkan pula melalui upaya peningkatan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan, penguatan kinerja KORPRI, serta perlindungan hukum dan hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang prima diarahkan untuk meningkatkan kepuasan layanan dan jaminan akses layanan masyarakat yang cepat, mudah dengan biaya yang terjangkau. Peningkatan layanan publik diarahkan pula untuk peningkatan daya tarik investasi khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat, serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prima dikembangkan melalui penyediaan system layanan yang handal, termasuk kerangka regulasi terstandarisasi yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan serta efektifitas dan efisiensi setiap jenis layanan, peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknis, peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan publik handal dan berkualitas.

Gambar 4.3
Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bone Bolango 2016-2021



Keterkaitan prioritas dan sasaran RKPD tahun 2017 dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMD ketiga (2016-2021) dalam RPJPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2005-2025, diuraikan dalam skema berikut :

Gambar 4.4
Konektivitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2017 dengan Arah Kebijakan Pembangunan
Jangka Menengah Ke-3 dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021



Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 serta agenda utama pembangunan 2016, maka beberapa upaya strategis yang menunjang agenda prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan upaya pengurangan rakyat miskin melalui program perlindungan social, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi rakyat serta pengembangan asset masyarakat miskin. Strategi pengurangan rakyat miskin tersebut antara lain dilakukan melalui bantuan jaminan kesehatan masyarakat miskin, bantuan pendidikan bagi para siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu, bantuan duka, bantuan nikah bagi keluarga miskin, bantuan anak yatim, janda miskin, subsidi raskin, bantuan usaha ekonomi rakyat serta bantuan perbaikan dan pembangunan 2000 unit rumah serta 2400 jamban sehat, 1500 listrik gratis serta 2000 sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Melanjutkan pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah bagi keluarga yang kurang mampu serta kelompok usaha produktif lainnya, termasuk bantuan usaha untuk kelompok rentan seperti para janda yang menjadi kepala keluarga, penyandang cacat, korban bencana serta korban PHK.
3. Meneruskan pemberian bantuan sapi, kambing, ayam, alat pertanian, benih unggul, pupuk dan pembukaan lahan tidur serta bantuan sarana prasarana perikanan bagi masyarakat pesisir dan petani budidaya ikan air tawar.
4. Melanjutkan pembangunan desa dengan intervensi melalui ADD, dana desa serta program afirmatif lainnya yang berdampak pada membaiknya kelembagaan desa, infrastruktur desa serta peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran utama pengurangan desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri.
5. Meneruskan pembangunan infrastruktur dasar wilayah berupa pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pembangunan terminal, pasar, irigasi, jalan usaha tani, infrastruktur perumahan dan pemukiman, sarana air bersih dan jaringan listrik untuk rakyat serta sarana pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan lainnya.
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, daerah terpencil dan tertinggal serta jaminan akses pendidikan bermutu bagi murid, siswa dan mahasiswa berprestasi melalui Program Bone Bolango Cerdas.

7. Meningkatkan cakupan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Bone Bolango (*Universal Health Coverage*) dengan memperkuat kapasitas pelayanan dasar serta pelayanan rujukan dengan prioritas utama Rumah Sakit Toto, serta didukung dengan pengembangan Rumah Sakit Tombulilato.
8. Meneruskan pembangunan pusat pemerintahan dan memulai revitalisasi 4 kecamatan induk sebagai kawasan perkotaan melalui peningkatan jalan, penghijauan, pembangunan drainase, lampu penerangan jalan umum, prasarana olahraga serta taman kota sebagai ruang publik yang multifungsi. Pengembangan kawasan termasuk pula perbaikan sarana prasarana pemerintahan serta merevitalisasi fasilitas Stadion Olahraga Bone Bolango di Kecamatan Suwawa.
9. Memperkuat pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki daya saing melalui pengembangan produktivitas pertanian, pengembangan usaha perkebunan serta pengembangan produktivitas perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan usaha industry, jasa perdagangan dan usaha koperasi, mikro kecil dan menengah serta pengembangan jasa kepariwisataan sebagai potensi utama daerah.
10. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan moral dan dedikasi, pemberian beasiswa unggulan untuk kompetensi khusus serta meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui pemberian tambahan tunjangan kinerja setiap bulan, insentif khusus bagi aparatur pada wilayah terpencil khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan, disamping pembinaan mental spiritual masyarakat.

Rencana pembangunan Daerah tahun 2017 dengan perencanaan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi sehingga pencapaian sasaran pembangunan dapat lebih terarah dan berkesinambungan, sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Gambar 4.5.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango

No	Prioritas Pembangunan Nasional 9 (Sembilan) Agenda NAWACITA (RKP 2017)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (RKPD 2017)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango (RKPD 2017)
1.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.	1.	Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan	1.	Pengurangan rakyat miskin dan pengentasan desa tertinggal
2.	Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	2.	Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah		
3.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.	3.	Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan.	2.	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan (kedaulatan) pangan daerah
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	4.	Peningkatan akses, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan.	3.	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	5.	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi, serta penguatan kedaulatan pangan.	4.	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
6.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	6.	Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam.	5.	Pembangunan infrastruktur dasar wilayah dan pengembangan kawasan Supporting Program
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	7.	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.	Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan penataan Aparatur Sipil Negara
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa.	8.	Pengembangan budaya dan destinasi wisata		

No	Prioritas Pembangunan Nasional 9 (Sembilan) Agenda NAWACITA (RKP 2017)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo (RKPD 2017)	No	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango (RKPD 2017)
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial	9.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
		10.	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga.		
		11.	Pengembangan UMKM dan Koperasi.		
		12.	Penanggulangan Kemiskinan.		
		13.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)		

D. Sasaran Prioritas Utama Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017

Rumusan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, yang didasarkan pada kendala dan permasalahan daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diuraikan dibawah ini:

Prioritas Penurunan Angka Kemiskinan

Sasaran : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

Indikator : - Penurunan angka kemiskinan menjadi 16% dan angka pengangguran ditekan <5%, serta meningkatkan pendapatan masyarakat >7%.
- Indeks gini (ketimpangan) ditekan <40
- Peningkatan nilai tukar petani >104

Prioritas Pengentasan Desa Tertinggal

Sasaran : Menurunnya jumlah desa tertinggal

Indikator : - Pengurangan desa tertinggal menjadi 58 desa dan bertambahnya desa mandiri sejumlah 10 desa

- Implementasi APBD Desa untuk semua desa
- Peningkatan infrastruktur dasar desa
- 85% Desa telah memiliki BUMDES.
- 75% Prasarana Pemerintahan Desa berkualitas baik

**Prioritas Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi
dan Ketahanan
(Kedaulatan) Pangan
Daerah**

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan pangan daerah

- Indikator :
- Pertumbuhan ekonomi mencapai >7,5%.
 - Inflasi <6,7%
 - Peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier >62%
 - Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) dan investasi pemerintah tumbuh diatas 10%
 - Peningkatan produksi padi >30.000 ton
 - Peningkatan produktivitas per hektar padi 6,46 ton
 - Peningkatan produksi jagung >15.000 ton
 - Peningkatan produktivitas per hektar jagung 3,7 ton
 - Peningkatan produksi perikanan >13.500 ton
 - Peningkatan jumlah populasi ternak sapi bertambah >4000 ekor
 - Peningkatan jumlah usaha UMKM yang difasilitasi bertambah 400 unit usaha
 - Peningkatan modal usaha UMKM
 - Peningkatan jumlah koperasi sehat menjadi 22 koperasi dari 56 koperasi aktif
 - Berkembangnya produk unggulan daerah (jasa pariwisata, pertanian organik, ternak sapi, kopi pinogu)
 - Tumbuhnya 4 pasar harian
 - Tumbuhnya desa mandiri pangan 30% dari target 20 desa
 - Berkembangnya desa mandiri benih.
 - Peningkatan akses jalan usaha pertanian >25.000 meter

**Prioritas Peningkatan
Kualitas Pelayanan dan
Aksesibilitas Pendidikan**

Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat melalui Peningkatan kualitas layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

- Indikator :
- Peningkatan Angka Partispasi Murni (APM) ditargetkan sebesar 90.12 % untuk tingkat SD sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 56,9 % dan 54,38 % untuk tingkat SMA
 - Peningkatan angka partisipasi kasar (APK); SD >100, SMP >89, SMA/SMK >79.
 - Peningkatan angka kelulusan ditargetkan sebesar >99% untuk tingkat SD, >99% untuk tingkat SMP dan >98% untuk tingkat SMA/SMK.
 - Penurunan Angka Putus Sekolah <0,16% (SD/MI), <0,12% (SMP/MTS), <0,13% (SMA/SMK/MA)
 - Peningkatan rata-rata lama sekolah 7,48
 - Peningkatan kualitas mutu lulusan
 - Peningkatan angka melek huruf >98,97
 - Peningkatan sarana prasarana pendidikan dengan kondisi baik 94,3% (SD) dan 58,3% (SMP)
 - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 60,73
 - Peningkatan kompetensi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 82,11
 - Peningkatan kesejahteraan guru pada wilayah terpencil.
 - Peningkatan akses beasiswa bagi semua siswa dan 500 mahasiswa pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
 - Peningkatan ketersediaan dan pemerataan guru pada semua wilayah khususnya untuk bidang studi tertentu (Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris dan bidang studi keahlian lainnya).

Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan

Sasaran : Peningkatan kualitas layanan kesehatan diarahkan pada pelayanan kesehatan yang semakin bermutu, cepat dan terjangkau pada semua unit dan tingkatan layanan baik layanan dasar kesehatan maupun layanan rujukan.

- Indikator: :
- Angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar >71,01
 - Angka kematian Ibu Melahirkan yang ditargetkan sebesar <259 per 100.000 kelahiran hidup,
 - Penurunan angka kematian balita dengan target <12,6 per 1.000 kelahiran
 - Angka prevalensi gizi buruk sebesar 0,38%.
 - Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan; 100%
 - Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan 100% (Universal Health Coverage) khususnya bagi masyarakat miskin.
 - Peningkatan kepesertaan KB Aktif
 - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 88,3%.
 - Peningkatan persentase ibu hamil yang beroleh layanan antenatal ke empat (K4); 88,23
 - Peningkatan persentase kunjungan neonatal pertama (KN1).
 - Persentase anak usia 0-11 bulan yang beroleh imunisasi dasar lengkap
 - Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 85,4%
 - Cakupan kunjungan bayi 76%
 - Cakupan penanganan penderita penyakit menular TBC BTA; 91,8%, dan penyakit DBD 100%
 - Cakupan Puskesmas 100%
 - Cakupan posyandu aktif purnama mandiri 38,8%
 - Cakupan Poskesdes 71,3%
 - Peningkatan jumlah puskesmas yang bersertifikasi terakreditasi.

- Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata hingga keseluruhan daerah terpencil.
- Peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan dasar.
- Cakupan desa siaga aktif; 92,9%.
- Cakupan rumah tangga ber PHBS; 68,6%
- Peningkatan cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR Rumah Sakit melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan tingkat rujukan dengan prioritas utama pada Rumah Sakit Toto Kabila.
- Peningkatan cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR Rumah Sakit melalui peningkatan ketersediaan tenaga medis khususnya pelayanan spesialisik pada Rumah Sakit Toto dan Rumah Sakit Tombulilato.
- Jaminan ketersediaan obat obatan, bahan habis pakai dan peralatan medis baik ditingkat layanan dasar maupun rujukan.

<p>Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan</p>	<p>Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas wilayah dan meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian, serta pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis daerah.</p>
<p>Indikator :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kualitas jalan baik >74% dan pertumbuhan jalan baru 2%. 2. Peningkatan aksesibilitas ke Kecamatan Pinogu, Bulango Ulu, dan beberapa desa di Bone Pesisir. 3. Persentase akses air minum layak >69% 4. Persentase akses sanitasi layak >64%. 5. Peningkatan jumlah rumah layak huni 2000 unit. 6. Peningkatan ratio elektrifikasi >80%.

7. Persentase luasan jaringan irigasi baik 92%
8. Jumlah Ton Sampah yang dikumpulkan (berdasarkan cakupan wilayah); 1719 ton
9. Revitalisasi 4 Kecamatan Induk
10. Pengembangan infrastruktur pasar harian 1 unit pasar tradisional modern.
11. Pengembangan kawasan wisata lombongo, danau perintis dan kawasan wisata botutonuo.
12. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan.
13. Pembangunan fasilitas Stadion Olahraga Bone Bolango.
14. Pembangunan Terminal Tipe C

Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN

Sasaran

Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) serta penataan aparatur daerah.

Indikator
:

1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP
2. Persentase penurunan jumlah kasus temuan yakni 40% dari tahun sebelumnya
3. Tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan (AKIP) mencapai predikat B.
4. Penataan pengembangan E-Government di lingkungan pemerintahan daerah
5. Persentase peningkatan ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan baik diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional mencapai 75 %.
6. Peningkatan disiplin, pembinaan karir dan mutasi aparatur sipil negara.
7. Persentase SKPD yang memenuhi kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pengelolaan keuangan mencapai 100 %.

8. Peningkatan kapasitas perencanaan, koordinasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
9. Peningkatan ketertiban, keamanan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. 100% SKPD Kabupaten telah memiliki bangunan kantor.
11. 100% Pemerintahan Kecamatan telah memiliki Rumah Dinas Camat.
12. 75% infrastruktur pemerintahan desa (kantor desa) ditingkatkan ketersediaan dan kualitasnya, utamanya bagi kantor desa pemekaran serta rehabilitasi bagi kantor desa yang rusak berat.
13. Peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang operasional pemerintahan (kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi pemerintahan pada semua unit kerja SKPD..
14. Perbaikan manajemen dan infrastruktur penanggulangan bencana.
15. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pengamanan aset pemerintahan dan penegakan peraturan daerah.
16. Peningkatan kesejahteraan aparatur bagi pemerintahan desa , serta perbaikan kesejahteraan tenaga honor/kontrak daerah.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, sehingga program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 diharapkan menjadi penguatan pondasi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah 2016-2021. Program kegiatan prioritas ini merupakan rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja dan kebutuhan dana atau pagu indikatif kegiatan. Program kegiatan SKPD yang termuat dalam dokumen RKPD 2017 disusun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya serta kebutuhan SKPD kedepan yang memperhatikan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan rancangan dokumen RKP Nasional Tahun 2017 sebagai upaya sinergitas arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional.

Matriks Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penyusunan program kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Arahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 berdasarkan pembagian urusan kewenangan yakni sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program kegiatan pendidikan difokuskan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk mendukung Program Bone Bolango Cerdas. Penyelenggaraan program Bone Bolango Cerdas tersebut diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), pengurangan angka putus sekolah, peningkatan angka kelulusan serta angka melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Disamping itu pembangunan pendidikan diarahkan juga untuk peningkatan mutu lulusan serta kemampuan prestasi, minat bakat serta perilaku mental siswa. Urusan pendidikan tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan manajemen layanan pendidikan, penyediaan sarana prasarana berupa penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, pembangunan perpustakaan dan laboratorium sekolah, penyediaan buku, media pembelajaran serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Guna mendukung kinerja pendidikan, pemerintah daerah akan meningkatkan penyediaan layanan transportasi gratis bagi siswa khususnya wilayah-wilayah terpencil, pemberian beasiswa Bone Bolango Cerdas bagi siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu serta peningkatan sarana prasarana pendukung lainnya. Disamping itu, peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik dan kependidikan berupa pemberian beasiswa kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru pada wilayah terpencil dan penyediaan fasilitas penunjang bagi tenaga pendidik baik berupa mess atau rumah dinas guru pada wilayah terpencil akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kebijakan nasional dan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kualitas pengawasan tetap menjadi prioritas dalam mendukung mutu pendidikan pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Dalam mempercepat dan meningkatkan target kinerja pendidikan, Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kinerja manajemen kelembagaan pendidikan, serta juga mendorong berkembangnya partisipasi swasta dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kebijakan program kegiatan untuk urusan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan layanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan yang semakin berkualitas dan terjangkau melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat

serta peningkatan layanan kesehatan baik promotif, preventif dan kuratif. Peningkatan layanan kesehatan dasar diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas manajemen layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa alat dan perlengkapan kesehatan dan obat-obatan, mobil layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sarana puskesmas dan peningkatan kualitas layanan Poskesdes. Pada tahun 2017, keberlanjutan Program Mutiara Berlian menjadi salah satu pilar penting dalam rangka penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta perbaikan kualitas hidup kesehatan bayi dan balita.

Peningkatan kualitas layanan rujukan Rumah Sakit Toto akan menjadi prioritas utama pada tahun 2017 dan 2018. Pengembangan rumah sakit tersebut diprioritaskan pada Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit berupa penambahan ruangan perawatan dan gedung VIP, pembangunan ruang laboratorium, ruang radiologi, ruang bedah, ruang jenazah, instalasi pengolahan limbah rumah sakit, dan penataan lingkungan dalam kawasan RSUD Toto Kabila. Peningkatan kualitas manajemen layanan Rumah Sakit diarahkan pada pengembangan kerjasama kemitraan dalam penyediaan layanan spesialisik serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis melalui pemberian beasiswa pendidikan kesehatan termasuk pendidikan Dokter spesialis. Pengembangan Rumah Sakit Tombulilato diprioritaskan pada penguatan perannya untuk pelayanan rujukan masyarakat Bone pesisir dan kawasan sekitarnya, serta pelayanan penyakit Jiwa dan penyalahgunaan NARKOBA. Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit Tombulilalo serta penyediaan dokter spesialisik akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan program kegiatan ke PU-an diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas wilayah berupa penyiapan dokumen lingkungan dan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan lintas selatan sepanjang 9 Kilometer yang menghubungkan Suwawa dan Kabila Bone serta peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan sepanjang kurang lebih 30 Kilometer yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pemukiman dan sentra produksi, termasuk penataan kawasan pemerintahan, kawasan pariwisata serta peningkatan akses pada wilayah terpencil Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Bulango Ulu. Pembangunan infrastruktur dasar

diprioritaskan juga pada pembangunan sarana prasarana sanitasi lingkungan, penyediaan instalasi dan jaringan air bersih untuk mensupport wilayah rawan air bersih serta . Penataan kawasan strategis yang diprioritaskan pada revitalisasi empat kecamatan yaitu Kecamatan Suwawa, Kecamatan Tapa, Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Kabila, serta melanjutkan penataan infrastruktur wilayah pada kawasan pemerintahan. Untuk mendukung kedaulatan pangan daerah, pembangunan infrastruktur dasar wilayah diarahkan pada peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. Pembangunan penataan ruang daerah diprioritaskan pada penyusunan rencana rinci tata ruang, perancangan revitalisasi kawasan perkotaan, design teknis pembangunan infrastruktur, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau buatan atau taman kota serta pengendalian ruang daerah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan program kegiatan bidang perumahan dan permukiman diarahkan pada penciptaan hunian layak dan sehat serta mendukung perbaikan lingkungan permukiman yang sehat. Pembangunan perumahan pada tahun 2017 diprioritaskan pada pembangunan hunian pantas bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa 1000 unit pembangunan baru dan 1000 unit peningkatan kualitas hunian yang pelaksanaannya juga akan terintegrasi dengan . Pembangunan perumahan juga akan dilakukan melalui pengembangan permukiman terpadu yang akan dipusatkan pada tiap kecamatan untuk memecahkan backlog rumah yang cukup besar yang pelaksanaannya akan dimulai secara bertahap pada tahun 2017 melalui kerja sama dengan pengembang perumahan dan lembaga pembiayaan. Dalam rangka pencapaian universal akses di bidang sanitasi, maka secara bertahap pada tahun 2017 diprogramkan pembangunan 2400 jamban sehat bagi masyarakat miskin yang terintegrasi pula dengan pembangunan rumah baru ataupun peningkatan kualitas hunian. Perbaikan lingkungan permukiman diprioritaskan pada pembangunan prasarana jalan lingkungan pada Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Tilongkabila.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Kebijakan program kegiatan Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diprioritaskan pada penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban daerah, serta penegakan peraturan daerah. Program

kegiatan pada urusan ini pula diarahkan pada penanganan cepat dan tanggap penanggulangan bencana daerah serta pencegahan, pengendalian dan mitigasi bencana. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparaturnya serta penyediaan sarana prasarana penunjang tugas akan terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan pada pencegahan dini dan penanganan korban bencana alam melalui pemantauan dan penyebaran informasi bencana alam, penyediaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana alam, peningkatan kualitas kader relawan siaga bencana serta penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. Pembangunan bidang sosial diarahkan pula pada fasilitasi program-program nasional dibidang kesejahteraan sosial baik PKH, KUBE, Program RASKIN, bantuan BBR dan bantuan program sosial lainnya, penanganan masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, disabilitas, para janda miskin, para lansia miskin, penyandang kesejahteraan sosial lainnya), serta upaya pemantapan kesetiakawanan sosial. Peningkatan produktivitas karang taruna melalui bantuan usaha ekonomi produktif akan menjadi prioritas pada tahun 2016. Pemantapan data dan informasi masyarakat miskin menjadi fokus urusan sosial yang bekerja sama dengan urusan pemerintahan lainnya.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan

Program kegiatan tahun 2016 pada urusan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, koordinasi perencanaan, penyaluran dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan usaha ketenagakerjaan. Penguatan kelembagaan ketenagakerjaan dan pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada peningkatan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan gender (KG), perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan, serta fasilitasi bagi usaha bagi perempuan dan P2WKSS serta peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta pembangunan dan pembinaan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pada urusan ini pula diarahkan pada peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program kegiatan 2016 pada urusan ini diprioritaskan pada pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan akibat kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas manajemen lingkungan melalui peningkatan kinerja pengelolaan limbah berupa penyediaan sarana prasarana persampahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH buatan atau taman hijau, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kebersihan, peningkatan kapasitas tenaga pengelola lingkungan hidup, diseminasi lingkungan serta pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pertanahan pada Tahun 2017 diprioritaskan pada pembebasan lahan dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah utamanya untuk penyiapan pembangunan jalan lintas Suwawa – Kabila Bone. pembangunan beberapa fasilitas pemerintahan umum, pendidikan dan kesehatan, serta pembebasan lahan untuk fasilitas publik lainnya berupa pembangunan fasilitas pengelolaan limbah, pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan taman/RTH, koridor hijau, fasilitas air bersih dan beberapa infrastruktur dasar lainnya. Urusan pertanahan diprioritaskan pula untuk penyelesaian pembebasan lahan untuk infrastruktur akibat sengketa atau konflik kepemilikan lahan yang telah ditetapkan sah secara hukum untuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta lanjutan penyelesaian lahan untuk mendukung pembangunan kampus baru Universitas Negeri Gorontalo. Pembangunan bidang pertanahan diarahkan pula pada upaya penyediaan sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang berpenghasilan rendah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan mengembangkan sistem pelayanan kependudukan yang dimulai dari desa dengan target seluruh masyarakat Bone Bolango dapat terlayani dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta administrasi kependudukan lainnya. Tahun 2017 pula akan dilakukan pemutakhiran data kependudukan yang akan dirangkum dalam profil kependudukan Kabupaten Bone Bolango.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, maka program kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan desa termasuk pembinaan, fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan APBD Desa, peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan urusan ini diarahkan pula pada penguatan koordinasi pemerintahan desa termasuk peningkatan kualitas proses pemilihan kepala desa. Peningkatan alokasi dana desa pada tahun 2017 akan ditingkatkan secara signifikan seiring dengan rencana peningkatan dana desa yang berasal dari transfer APBN. Pemanfaatan APBD desa diarahkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar skala desa dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa termasuk untuk mendukung program unggulan dibidang peternakan, pengembangan BUMDES, peningkatan tunjangan kinerja aparatur desa, pembangunan dan rehabilitasi kantor desa serta penyediaan kendaraan roda dua operasional pemerintahan desa. Penyelenggaraan pembangunan desa akan diperkuat pula dengan pengembangan kerja sama antar desa untuk pembangunan kawasan pedesaan.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program kegiatan pada urusan ini di fokuskan pada penyiapan lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa pembangunan Balai Uji Kendaraan Bermotor, penyiapan dokumen teknis, dokumen lingkungan serta penyiapan lahan untuk pembangunan terminal di Suwawa dan di wilayah Bone Pesisir, pembangunan pos pengendalian lalu lintas serta pengadaan dan

pemasangan peralatan rambu-rambu lalu lintas jalan. Pemasangan fasilitas rambu-rambu lalu lintas dan jalan raya diprioritaskan pada jalan-jalan utama pada pusat pemerintahan dan kawasan strategis lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk pengurangan angka kecelakaan di jalan raya, tahun 2017 dilaksanakan program kegiatan berupa sosialisasi tertib lalu lintas bagi masyarakat dan pengetahuan lalu lintas dasar bagi pelajar mahasiswa, serta penyelenggaraan pengawasan kegiatan lalu lintas jalan yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya..

15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Arah program kegiatan pada urusan ini difokuskan pada pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dan peningkatan kerja sama dengan media masa untuk peningkatan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat, penyediaan sarana prasarana informasi serta penataan manajemen informasi daerah dengan memperkuat peran pejabat informasi publik daerah pada semua unit pemerintahan. Penataan berbagai aplikasi dan media informasi pemerintahan yang tersebar pada semua unit kerja akan dimulai dengan pengembangan master plan E-Government untuk memberikan arah dan keterpaduan sistem pengembangan E-Government pada semua lini pemerintahan daerah.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Pada urusan ini diarahkan pada pengembangan data informasi statistik daerah serta updating data dan informasi, pengembangan kerja sama dalam penyediaan statistik daerah, serta penyediaan sarana prasarana pengembangan data dan informasi. Pengembangan statistik daerah diarahkan pula dengan memperkuat kapasitas dan ketersediaan data dan informasi wilayah dan informasi sektoral pada semua unit dan jenjang pemerintahan.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pada urusan ini program kegiatannya diarahkan pada pengembangan nilai budaya daerah melalui promosi budaya daerah, penyusunan kebijakan budaya local daerah, pembinaan lembaga adat daerah (Gorontalo, Suwawa, Bulango), serta penguatan kelembagaan adat daerah serta pelestarian adat dan budaya daerah secara berkelanjutan. Pelestarian budaya dan adat daerah akan terus dikembangkan dengan memperkuat peran kelembagaan adat daerah serta dukungan pembiayaan pemerintah daerah.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program kegiatan pada urusan ini diarahkan pada pengembangan minat budaya baca dan pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, penyediaan bahan pustaka perpustakaan desa dan perpustakaan umum daerah serta pengembangan sarana prasarana perpustakaan dan sistem informasi pustaka. Pengembangan perpustakaan daerah diarahkan pula melalui pengembangan kerja sama dengan perpustakaan atau lembaga lainnya baik dalam penguatan kapasitas manajemen layanan perpustakaan maupun pengayaan buku dan informasi kepustakaan. Disamping itu, upaya layanan perpustakaan mobile pada wilayah kecamatan atau sekolah tertentu terus diperkuat serta pengintegrasian layanan perpustakaan dengan program Cyber City.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program kegiatan tahun 2017 pada urusan ini diarahkan pada peningkatan kinerja bidang kearsipan melalui perbaikan system administrasi kearsipan, pengembangan peningkatan kualitas layanan Informasi kearsipan serta penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip. Pembinaan pengelolaan arsip daerah bagi seluruh unit kerja pemerintahan daerah akan terus ditingkatkan untuk menjamin pengelolaan administrasi pemerintahan yang tertata baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program kegiatan tahun 2017 pada urusan ini diarahkan pada pertumbuhan koperasi melalui fasilitasi, pembinaan dan pengawasan bagi koperasi yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Untuk pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tahun 2017 dialokasikan anggaran untuk pemberian modal usaha mikro bagi 1000 rumah tangga berpenghasilan rendah, fasilitasi modal bagi 150 kelompok usaha kecil menengah yang berkembang, serta pengembangan UMKM yang menunjang pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelatihan dan fasilitasi kemudahan ijin usaha. Peningkatan ketrampilan bagi pengrajin pada bidang tertentu akan dikembangkan melalui pelatihan ketrampilan dan pemagangan pada usaha atau daerah yang relevan dengan pengembangan usaha industri daerah. Penyelenggaraan program ini diselenggarakan secara terpadu dengan pembiayaan program melalui APBD desa sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan desa`

21. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pada Urusan ini program kegiatan diprioritaskan pada pembinaan usaha investasi untuk meningkatkan realisasi jumlah dan realisasi investasi, penyediaan database atau profil potensi investasi Kabupaten Bone Bolango untuk promosi investasi, peningkatan kinerja pelayanan perizinan secara terpadu, pengendalian dan pengawasan penanaman modal baik investasi dalam negeri maupun investasi asing serta pengembangan kerja sama investasi/penanaman modal untuk pembangunan daerah.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2016 program kegiatan pada urusan ini diarahkan pada pembentukan dan fasilitasi kelompok pemuda, peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan olahraga, revitalisasi Stadion Olahraga Bone Bolango, pembangunan lapangan olahraga di pusat-pusat kecamatan, pelaksanaan event olahraga serta pembinaan atlet dan pelatih khususnya atlet berprestasi. Pembinaan kepemudaan diarahkan pada peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, penguatan peran KNPI sebagai wadah berhimpun serta pembinaan pemuda desa.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program Kelautan dan Perikanan diprioritaskan pada pembinaan usaha perikanan melalui pemberdayaan nelayan dan pengusaha perikanan, peningkatan pengelolaan TPI Inengo dan TPI Tihu, pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap serta pemberian bantuan sarana usaha perikanan berupa kendaraan motor dan cool box bagi nelayan. Pembinaan kegiatan usaha budidaya perikanan termasuk uji coba budidaya ikan vaname akan terus ditingkatkan melalui dukungan penyediaan benih/bibit, pakan, bantuan sarana prasarana, peningkatan ketrampilan para nelayan, serta fasilitasi manajemen dan bantuan pemasaran. Pengembangan sarana penunjang usaha perikanan berupa penyediaan cold storage, fasilitas pabrik es, fasilitas pemasaran hasil perikanan akan tetap menjadi perhatian pemerintah pada tahun 2017.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

tahun 2017 diprioritaskan pada pengelolaan dan peningkatan sarana prasarana destinasi kawasan wisata alam Pantai Botutonuo (Botutonuo, Botubarani dan Molotabu) dan obyek Wisata Lombongo, serta pengembangan obyek wisata Danau Perintis. Disamping itu, pembangunan pariwisata diarahkan pada pembinaan usaha keparwisataan serta peningkatan promosi wisata melalui kegiatan-kegiatan kepariwisataan.

Pengembangan obyek wisata lainnya akan dimulai dengan penyediaan rancangan teknis obyek wisata alam Pantai Bulawa, obyek wisata Air Terjun Taludaa, serta obyek wisata Meranti.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Sejalan dengan Program Nawacita Pemerintah Nasional, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memprioritaskan upaya peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan daerah berupa fasilitasi desa mandiri pangan, pengawasan keamanan pangan, penyediaan infrastruktur pengolahan hasil pangan dan penyediaan serta penyaluran bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk memperkuat kelembagaan ketahanan pangan, pembangunan ketahanan pangan daerah diarahkan pada pembinaan kelompok petani berupa penyuluhan dan pembinaan teknis usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kegiatan usaha kehutanan.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Untuk menjamin kedaulatan pangan, program kegiatan pertanian diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana pertanian termasuk penyediaan gudang dan lantai jemur, pemberian bantuan benih dan pupuk, bantuan alat mesin pertanian, konversi lahan kering termasuk pembukaan lahan tidur, pengembangan infrastruktur pendukung khususnya pembangunan jalan usaha tani dan pembangunan saluran irigasi dan infrastruktur sumber daya air pendukung usaha pertanian yang menjadi kewenangan daerah.

Disamping itu, program kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pula pada pembinaan usaha peternakan melalui pengadaan bibit sapi unggul untuk kelompok usaha peternakan berbasis komunal, pengembangan inseminasi buatan, pengembangan kawasan peternakan melalui penyediaan lahan, disain dan prasarana dasar penyiapan pembangunan pasar hewan dan rumah potong hewan, pembangunan failitas kesehatan hewan, pengawasan dan pengendalian peredaran hewan ternak.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program Kegiatan pada urusan kehutanan diprioritaskan pada usaha konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan termasuk penanganan lahan kritis, pembinaan kehutanan, pengawasan hasil hutan, pengendalian kebakaran hutan, pengendalian alih fungsi hutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Energi

Program Kegiatan pada urusan ini diprioritaskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan galian C, pengawasan kegiatan pertambangan rakyat, pengembangan energi baru terbarukan berupa pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) pada wilayah yang ratio elektrifikasi rendah, penyediaan sambungan listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyediaan penerangan jalan umum pada jalan dan kawasan strategis serta pada fasilitas publik lainnya.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program kegiatan pada urusan ini meliputi pembangunan sarana prasarana perdagangan berupa rehabilitasi dan pengembangan pasar tradisional, pengembangan Pasar Traditional Modern atau Bone Bolango Busines Center (BBC), peredaran dan pengawasan barang perdagangan, pelaksanaan kegiatan metrology (tera ulang) serta promosi hasil produksi unggulan daerah. Pada urusan perdagangan, diprioritaskan pula usaha-usaha pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah. Pengembangan 4 (empat) pasar harian menjadi prioritas penting untuk memperkuat mobilisasi usaha dan produksi perekonomian masyarakat.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maka urusan perindustrian ini diharapkan dapat menjadi prioritas penunjang ekonomi daerah sehingga program kegiatan pada urusan ini diarahkan pada pengembangan industri kecil menengah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah Kopi Organik Pinogu dan Gula Aren, pembinaan dan pelatihan usaha industri, serta fasilitasi kemudahan ijin usaha bagi industri kecil menengah dan penataan industri daerah.

31. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pada urusan ini program kegiatan diarahkan pada pengembangan wilayah transmigrasi yang telah existing melalui penyediaan sarana prasarana social ekonomi masyarakat serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi masyarakat transmigrasi di wilayah Owata Bulango Ulu dan kawasan Pelita Hijau.

32. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian

Urusan ini dibagi menjadi beberapa sub urusan yang dijelaskan dibawah ini:

1. Sub Urusan Otonomi Daerah

Pada sub urusan ini diprioritaskan pencapaian peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan public dengan program kegiatan berupa peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, penataan otonomi daerah serta peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

B. Sub Urusan Pemerintahan Umum

Sub urusan ini memprioritaskan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat diseluruh lini pemerintahan daerah baik pemerintah Umum, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa sehingga terciptanya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

C. Sub Urusan Administrasi Keuangan

Dalam sub urusan ini diharapkan pencapaian predikat pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

D. Sub Urusan Perangkat Daerah

Program kegiatan pada sub urusan ini di prioritaskan pada peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, kemudian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penataan peraturan perundang-undangan daerah dalam mencapai good government.

E. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sub urusan ini prioritas program dan kegiatan diarahkan pada penyediaan dokumen perencanaan dan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan musrenbang perencanaan pembangunan, penyusunan dokumen LKPJ Kepala Daerah, penyusunan dokumen rencana detail tata ruang daerah (RDTR), peningkatan kerja sama pembangunan daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan ekonomi daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur perencana daerah.

F. Sub Urusan Kepegawaian Daerah

Program Kegiatan pada sub urusan ini di arahkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan diklat structural maupun diklat fungsional

dan teknis, penataan dan pengembangan system administrasi dan informasi kepegawaian daerah, pembinaan pola karier ASN, pelaksanaan lelang jabatan ASN, serta ujian dinas bagi ASN.

Selanjutnya, berdasarkan prioritas pembangunan sektoral pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang menjadi fokus masing-masing SKPD yang didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) SKPD pada tahun anggaran 2017 serta rencana program dan kegiatan prakiraan maju pada tahun anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir dalam dokumen RKPD ini.

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2017, kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan yang dituangkan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah. Hal ini penting agar tema pembangunan “**Melanjutkan Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mengurangi Kemiskinan**” bukan hanya menjadi slogan belaka tetapi menjadi acuan dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan amanah demi tercapainya masyarakat madani.

Sehubungan dengan hal tersebut, RKPD Tahun 2017 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder, yakni:

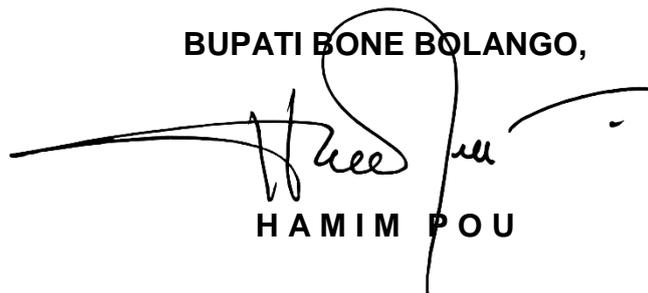
1. Masyarakat bersama Dunia Usaha dapat berperan lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari perumusan perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango agar dapat mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam merumuskan rencana anggaran dan kegiatannya;
3. Sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2017, maka RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan prioritas dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017;
4. Terkait pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka penanggung jawab pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2017 dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 akan disesuaikan dengan penetapan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang sedang dirumuskan dan akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran tersebut;
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati Bone Bolango melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango;
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan masing-masing Kepala SKPD pada tahun lalu dan tahun berjalan;
9. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2017.
10. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Demikian dokumen RKPD Tahun 2017 ini disusun, semoga menjadi landasan berpijak dan acuan bertindak bagi pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan **“Bone Bolango Cemerlang 2021”**.

Bone Bolango, Mei 2016

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN BONE BOLANGO

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG/KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
	Bidang Urusan Pendidikan	Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar					16.230.637.625	17.550.403.368			
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			Kab. Bone Bolango	Persentase minat anak usia 4 - 6 tahun yang masuk PAUD	95% (Dari 8.735 Siswa PAUD) TK, KB, BA, RA, PAUD Sejenis)		900.000.000	990.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan	
1.01.15.58	- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini						Jumlah Taman Kanak-Kanak Yang Difasilitasi		20 Lembaga TK			
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Kab. Bone Bolango	Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Usia 7-12 tahun	96% (Dari 8.735 Siswa PAUD) TK, KB, BA, RA, PAUD Sejenis)		10.232.000.000	11.255.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan	
1.01.16.03	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah				Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 13-15 tahun	70%(dari 4.390 siswa SMP berusia 13-15 tahun)	Jumlah Mess Guru yang dibangun		2 Unit			
1.01.16.03	- Penambahan Ruang Kelas Sekolah				Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP usia 13-15 tahun	80%(dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun)	Jumlah Ruang Kelas dan Jamban yang di bangun		11 Unit			
1.01.16.04	- Penambahan Ruang Guru				persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD	0% (dari 17.8777 siswa yang duduk di bangku SD)	Jumlah Ruang Guru yang dibangun					
1.01.16.08	- Pembangunan Ruang Seba Guna / AULA				persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0% (dari 6.344 siswa yang duduk di bangku SMP)	Jumlah Ruang Serba Guna yang dibangun		1 Unit			
1.01.16.08	- Pengadaan sarana Mobilitas Sekolah				Persentase Angka Kelulusan (AL) SD	99% (dari 2.894 siswa lulusan SD)	Jumlah Bus Sekolah yang diadakan		3 Unit			
1.01.16.42	- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP	99% (dari 1.819 siswa lulusan SMP)	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang direhab		4 Unit			
1.01.16.67	- Penyelenggaraan Paket A Setara SD				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (7-12 tahun dan 13-15 tahun)	50%(dari 28.480 siswa berusia 7-12 dan 13-15 tahun)	Jumlah Peserta Ujian Paket A		35 Orang			
1.01.16.68	- Penyelenggaraan Paket B Setara SMP				Rasio sekolah pendidikan SMP dan SMA/SMK kondisi bangunan rehab ringan	30%(dari 121 ruang sekolah SMA/SMK kondisi rehab ringan)	Jumlah Peserta Ujian Paket B		35 Orang			
1.01.16.70	- Pembinaan Kelembagaan dan manejemen Sekolah dengan Penerapan MBS di satuan Pendidikan Dasar						Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah yang dilaksanakan		3 Kegiatan			
1.01.16.70	- Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa						Jumlah kegiatan		7 Kegiatan			
1.01.16.78	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Jumlah Dokumen Analisis Penggunaan Dana Bansos dan Dana BOS SD/SMP		2 Dokumen			

	- Ujian khir (UAS) SD/MI dan SMP/MTs					Jumlah Peserta Ujian Akhir SD/Mi dan SMP/MTs	450 Siswa					
1.01.17	Program Pendidikan Menengah		Kab. Bone Bolango	Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 16-18 tahun	50% (dari 3.207 siswa yang duduk dibangku SMA)			3.670.000.000	3.732.428.730	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan	
				Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK usia 16-18 tahun	55% (dari 2.250 siswa yang duduk dibangku SMK)							
				Persentase meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA usia 16-18 tahun	55% (dari 2.189 siswa yang berusia 16-18 tahun yang duduk dibangku SMA)							
				Jumlah Siswa SMA Miskin yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	500 Siswa							
	- Beasiswa Siswa Berprestasi					Jumlah Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bone Bolango Cerdas	400 Orang					
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal		Kab. Bone Bolango	Persentase Tuna aksara Dewasa	2 % (dari 86.552 jiwa penduduk usia 15-44 tahun yang tidak mengikuti paket A,B dan C)			317.200.000	350.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan'	
1.01.18.01	- Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal					Jumlah Tenaga pendidik Non Formal yang difasilitasi	552 Org/bln					
1.01.18.05	- Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup					Pemberian Bantuan Barang Ketrampilan bagi kelompok/Lembaga Kursus	2 Kelompok					
1.01.18.12	- Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal					Tersosialisasinya berbagai program pembinaan PAUD melalui HAI & Jambore PTK PNFI	2 Kegiatan					
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kab. Bone Bolango	Persentase meningkatnya guru yang berkualifikasi pendidik S1/D-IV	86% (dari 1.946 guru yang berijasah S1/D-IV)			865.000.000	951.893.250	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan	
1.01.20.01	- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik					Tersosialisasinya Juknis Aneka Tunjangan	2 Kali					
1.01.20.02	- Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Terlaksananya Keg. Woororkshop Peningkatan Kompetensi Guru dan Guru Berprestasi	690 Orang					
1.01.20.03	- Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi					Terlaksananya Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	1 Keg					
1.01.20.10	- Pengembangan Sistem penghargaan dan Perlindungan Terhadap profesi Pendidik					Jumlah guru Kontrak Daerah	6324 Org/bln					
1.01.20.07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi					Jumlah Pendidik Non S1	4116 Org/bln					
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Kab. Bone Bolango	Persentase Jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan melalui penerapan sistem informasi	86% merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan			246.437.625	271.081.388	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan	
1.01.22.02	- Pelaksanaan Kerja sama Secara Kelembagaan di bidang Pendidikan					Terlaksananya kegiatan dalam rangka kerjasama kelembagaan pendidikan	2 Kegiatan					

1.01.22.07	- Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan						Tersedianya data dan informasi pendidikan yang akurat dan aktual dalam rangka perencanaan dan pengambilan kebijakan	2 Kegiatan					
1.01.22.09	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Dapodik	1 Kegiatan					
	Bidang Urusan Kesehatan	Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan							50.062.314.588	52.008.783.121		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Kab. Bone Bolango	Cakupan Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk layanan kesehatan	94%				9.375.556.975	10.313.112.673	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan
1.02.15.01	- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan						cakupan ketersediaan obat dan perbekalan	20 puskesmas					
1.02.15.05	- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan						jumlah pengelola obat, dokter dan perawat yang diberikan pelatihan dalam penggunaan obat	60 Orang					
	- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat-Obatan Rumah Sakit						Cakupan penyaluran bahan Obat -Obatan Rumah Sakit	5287 Resep					
	- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP)						Cakupan penyaluran bahan Habis Pakai (BHP)	12 Paket/Bln/thn					
	- Pengadaan bahan kimia laboratorium (Reagen)						Cakupan penyaluran bahan Kimia Laboratorium (Reagen)	12 Paket/Bln/thn					
1.02.15.06	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas yang dimonev pengelolaan	20 org					
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Kab. Bone Bolango	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	40% (8 PKM dari 20 PKM)				1.651.311.750	1.816.442.925	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan
1.02.16.13	- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan						jumlah puskesmas yang difasilitasi	20 Puskesmas					
1.02.16.06	- Revitalisasi Sistem Kesehatan						tersedianya dana non kapitasi JKN di FKTP	12 Bulan					
1.02.16.08	- Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial						cakupan lembar resep yang dilayani diapotik	5287 resep					
1.02.16.15	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah puskesmas yang dievaluasi hasil capaian SPM per triwulan	20 Puskesmas					
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			Kab. Bone Bolango	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	40%				38.846.500	42.731.150	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan
1.02.17.02	- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya						jumlah dokumen laporan pengawasan keamanan pangan dan berbahaya	2 Dokumen					
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			Kab. Bone Bolango	cakupan jumlah kecamatan yang memiliki kebijakan tentang PHBS	70%				298.993.200	328.892.520	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan
1.02.19.01	- Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat						jumlah produk media promosi dan informasi sadar hidup sehat	3 Media					

1.02.19.02	- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat					jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat	7 Kegiatan					
1.02.19.02	- peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan					jumlah pertemuan advokasi	5 Kegiatan					
1.02.19.06	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan					jumlah laporan pelaksanaan monitoring promosi kesehatan di puskesmas	3 dokumen					
1.02.20	Program Perbaiki Gizi Masyarakat		Kab. Bone Bolango	prevalensi balita gizi buruk	0,35%			140.544.800	154.599.280	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
1.02.20.01	- Penyusunan Peta Informasi Masyarakat kurang gizi					dokumen hasil pelacakan Balita Gizi Buruk& ibu hamil KEK	2 Dokumen					
1.02.20.02	- Pemberian tambahan makanan dan vitamin					Jumlah balita dan Ibu hamil yang mendapat PMT-P	100 balita & 100 Ibu Hamil					
1.02.20.03	- Penanggulangan KEP,AGB, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainnya					penyediaan operasional panti pemulihan gizi (TFC)	12 Bulan					
1.02.20.04	- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi					jumlah kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan keluarga sadar gizi	6 Kegiatan					
1.02.20.06	- Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan						19 Puskesmas					
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Kab. Bone Bolango	perilaku masyarakat yang sehat dan peduli terhadap sanitasi	48,40%			120.598.117	132.657.929	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
1.02.21.01	- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat					jumlah laporan hasil rekomendasi pemeriksaan sampel air	5 dokumen					
1.02.21.02	- Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat					jumlah dokumen hasil pelaksanaan sosialisasi menciptakan lingkungan sehat	5 dokumen					
1.02.21.03	- Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat					jumlah lokasi pengawasan lingkungan sehat	18 Kecamatan					
1.02.21.04	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan					jumlah dokumen hasil monitoring program penyehatan lingkungan	1 Dokumen					
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular		Kab. Bone Bolango	Persentase tatalaksana seluruh kasus <24 jam	100%			132.589.050	132.657.929	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
1.02.22.01	- penyemprotan/fogging sarang nyamuk					jumlah lokasi/ Desa KLB DBD dan cikungunya dilaksanakan fogging	30 Lokasi/Desa					
1.02.22.05	- pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					Jumlah dokumen hasil pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di masyarakat	8 Dokumen					
1.02.22.08	- pelayanan imunisasi					Jumlah puskesmas yg memiliki coldchain						
1.02.22.09	- peningkatan survailans epidemiologi dan penanggulangan wabah					jumlah dokumen laporan hasil survailans epidemiologi dan penanggulangan wabah	4 Dokumen					
1.02.22.11	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan					jumlah laporan hasil monitoring program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan survailans	4 Dokumen					
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Kab. Bone Bolango	Jlh Puskesmas yang mampu melaksanakan e-Health	95% (19 dari 20 PKM			120.255.300	132.280.830	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	

1.02.23.03	- Pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan					jumlah dokumen pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan	2 Dokumen					
1.02.23.04	- Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan					tersusunnya dokumen profil kesehatan selama tahun 2016	2 Dokumen					
1.02.23.06	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan					jumlah dokumen laporan perkembangan program standarisasi pelayanan kesehatan	2 Dokumen					
1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya		Kab. Bone Bolango	Cakupan sarpras kesehatan dasar yang layak dan sesuai Permenkes 75 tahun 2014	Cakupan sarpras kesehatan dasar yang layak dan sesuai Permenkes 75 tahun 2014			13.200.000.000	14.520.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
1.02.25.01	- Pembangunan Puskesmas / Perluasan gedung puskesmas					Jumlah puskesmas yang dibangun / ditingkatkan	6 Paket					
1.02.25.07	- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas					Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang	6 Paket					
	- Rehabilitasi sedang/berat puskesmas					jumlah sarana kesehatan yang direhabilitasi berat	12 Unit					
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Tombulilato					Jumlah Gedung dan Ruangan yang	9 Paket					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tombulilato					Jumlah sarana dan prasarana Rs. Tombulilato yang diadakan	6 Paket					
01.02.26	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		Kab. Bone Bolango	cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, GDR	5000 Pasien			20.131.000.000	19.000.433.000	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
01.02.26.01	- Pembangunan rumah sakit						100%					
01.02.26.03	- pembangunan gudang obat/apotik						100%					
01.02.26.11	- Pengembangan ruang inkubator						100%					
01.02.26.17	- Rehabilitasi bangunan rumah sakit						100%					
01.02.26.18	- Pengadaan alat- alat kedokteran umum						100%					
01.02.26.20	-Pengadaan ambulance/mobil jenazah						100%					
01.02.26.25	-Pengembangan tipe rumah sakit						100%					
01.02.27	Program pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		Kab. Bone Bolango	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang di optmalkan pemanfaatannya	80% dihitung dari nilai efektifitas penggunaan			811.818.000	852.408.900	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
01.02.27.01	- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit					Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang dioptimalkan pemanfaatannya	80%					
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Kab. Bone Bolango	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (146.678 Penduduk)	14.500 Pasien			917.900.000	1.147.375.000	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	
1.02.28.01	- Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat					jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan						
	- Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat rumah sakit											
1.02.28.05	- kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis											
1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		Kab. Bone Bolango	Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	13,2 per 1.000 KLH			38.846.500	42.731.150	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan	

1.02.29.04	- pelatihan dan pendidikan perawat anak balita						jumlah bidan seluruh 159, bidan yg sdh di latih 60 Orang, sisa 99 org	peserta pelatihan 20 org bidan desa				
1.02.29.07	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan						mengevaluasi kinerja program KIA Puskesmas	20 PKM				
1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			Kab. Bone Bolango	Penurunan Angka Kematian Ibu	301,4 per 100.000 KLH			800.250.000	880.275.000	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan
1.02.32.02	- perawatan berkala bagi ibu hamil kurang mampu						Jumlah bidan yang dilatih					
1.02.32.03	- pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu						Jumlah bidan dan lintas sektor yang diberikan pengetahuan tentang pertolongan ibu melahirkan					
	Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fiskal)				Persentase Puskesmas yang terakreditasi	40% (8 PKM dari 20 PKM)			2.283.804.396	2.512.184.836	Sedang Berjalan	Dinas Kesehatan
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Infrastruktur Dasar yang berkualitas- Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung						94.017.000.000	111.500.000.000		
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			Kab. Bone Bolango	Persentase Kondisi Jalan berdasarkan wewenang Kabupaten	35000 M			70.000.000.000	80.000.000.000	Sedang Berjalan	Dinas PU
1.03.15.01	- Perencanaan pembangunan jalan											
1.03.15.03	- Pembangunan jalan						Panjang jalan yang dibangun					
1.03.15.05	- Pembangunan jembatan						Jumlah jembatan yang dibangun					
1.03.15.06	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan											
1.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Kab. Bone Bolango	Panjang drainase yang dibangun	6.000 M			2.200.000.000	3.000.000.000	Sedang Berjalan	Dinas PU
1.03.16.03	- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						Panjang saluran drainase yang dibangun					
1.03.17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong			Kab. Bone Bolango	Panjang bronjong yang dibangun	1.500 M			2.130.000.000	4.000.000.000	Sedang Berjalan	Dinas PU
1.03.17.03	- Pembangunan turap/talud/bronjong						Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun					
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			Kab. Bone Bolango	Jaringan irigasi kondisi baik	2.000 M			4.600.000.000	5.000.000.000	Sedang Berjalan	Dinas PU
1.03.24.06	- Pembangunan jaringan air bersih/air minum											
1.03.24.10	- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi						Panjang irigasi yang direhabilitasi					

1.06.21.11	- Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah												
1.06.21.12	- Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)												
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi			Kab. Bone Bolango	Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang digunakan dalam dokumen perencanaan makro daerah	5 DOK			818.085.000	899.893.500	Sedang Berjalan	Bappeda	
1.06.22.01	- Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah												
1.06.22.04	- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi												
1.06.22.06	- Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan												
1.06.23	Program perencanaan sosial budaya			Kab. Bone Bolango	Program perencanaan sosial budaya	2 DOK			202.242.650	222.466.915	Sedang Berjalan	Bappeda	
1.06.23.01	- Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan												
1.06.23.03	- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya												
1.06.23.04	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan												
	Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah			Kab. Bone Bolango	Prosentase rekomendasi hasil kajian dan penelitian yang digunakan sebagai dasar perumusan	50%			325.000.000	325.000.000	Sedang Berjalan	Bappeda	
	Bidang Urusan Perhubungan	Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan	Tersedianya Layanan Infrastruktur Dasar yang berkualitas						4.287.706.085	3.303.712.859			
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			Kab. Bone Bolango	Rata - rata kendraan angkutan umum yang diperiksa status kelayakan / bulannya	100% (96 angkutan umum/ bulan)			385.745.693	405.032.977	Sedang Berjalan	Dinas Perhubungan	
1.07.17.05	- Kegiatan Pengendalian Disiplin pengoperasional angkutan umum di jalan raya						Jumlah Dokumen monitoring pengoperasian angkutan umum di jalan raya	12 Dokumen					
1.07.17.14	- Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan						Jumlah Peserta Sosialisasi ketertiban lalu lintas	150 Orang					
1.07.17.15	- Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir /Juru Mudik/Awak kendaraan angkutan umum teladan						Jumlah peserta awak kendaraan umum teladan	100 Orang					
1.07.17.16	- Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Angkutan	4 Dokumen					
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Kab. Bone Bolango	Persentase peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di bangun	naik 20% (566 buah)			1.885.745.693	405.032.977	Sedang Berjalan	Dinas Perhubungan	
1.07.18.01	- Pembanguan Gedung Terminal				Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana pelayanan angkutan	40% (5 bus dari 3 bus yang ada)	Jumlah Gedung Terminal dan Pos Retribusi yang dibangun	1 Unit Terminal dan 5 Unit Pos					
	-Pengadaan BUS Angkutan Umum						Jumlah Bus yang diadakan	4 Unit Bus					
1.07.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			Kab. Bone Bolango	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Penurunan 10% dari 151 kejadian			1.516.214.700	1.743.646.905	Sedang Berjalan	Dinas Perhubungan	

1.07.19.01	- Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas						Jumlah Rambu Rambu Lalu Lintas Yang diadaka	5 Jenis					
1.07.19.02	- Pengadaan marka jalan						Jumlah marka jalan yang diadakan	2 Jenis					
1.07.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			Kab. Bone Bolango	Persentase Kenderaan Bermotor yang dilakukan uji Kelayakan	85%				500.000.000	750.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Perhubungan
1.07.20.01	- Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor						Jumlah Gedung Balai Uji yang dibangun	1 Unit					
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengebang	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan							3.913.883.560	5.042.005.803		
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Kab. Bone Bolango	Persentase sampah yang tertangani	7207 m3				1.505.803.425	1.882.254.281	Sedang Berjalan	Dinas Lingkungan Hidup
1.08.15.02	- Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan						Jumlah Prasarana dan Sarana Persampahan Yang disediakan	688 Unit					
1.08.15.04	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasana dan sarana persampahan						Jumlah Prasarana dan Sarana Persampahan Yang dalam keadaan baik	41 Unit					
1.08.15.05	- Pengembangan teknologi pengolahan persampahan						Jumlah hasil pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi	24 Ton					
1.08.15.07	- Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan						Jumlah Tenaga Kebersihan Daerah Yang di Fasilitasi	107 Orang					
1.08.15.09	- Kerjasama Pengelolaan persampahan						Jumlah MOU yang dibuat	5 MOU					
1.08.15.11	- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan						Jumlah kelompok masyarakat mandiri sampah yang terbentuk	10 Kel					
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup			Kab. Bone Bolango	Persentase Penegakan hukum lingkungan	100%				196.237.125	206.048.981	Sedang Berjalan	Dinas Lingkungan Hidup
1.08.16.01	- Koordinasi Penilaian kota sehat adipura/adiwiyata						Jumlah Peserta Sosialisasi adipura & adiwiyata	100 Org					
1.08.16.03	- Pemantauan kualitas lingkungan						Jumlah dokumen SLHD yang tersusun	3 dok					
1.08.16.04	- Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup						Jumlah pengawasan pencemaran yang dilakukan	20 Keg/Usaha					
1.08.16.12	- Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup						Jumlah peraturan perundang-undangan yang di susun	2 Peraturan/1 dokumen					
1.08.16.14	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH						Jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk & di bina	5 Kel					
1.08.17	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				Prosentase Perlindungan dan konservasi SDA	85% dari 100 perusahaan yang wajib amdal (85 Perusahaan)				219.563.610	230.541.791	Sedang Berjalan	Dinas Lingkungan Hidup
1.08.17.09	- Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA						Jumlah pelaku usaha yang ditertibkan	85 Pelaku Usaha					
1.08.17.16	- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan						Jumlah monev yang dilakukan	30 Kali					

1.08.19	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup			Kab. Bone Bolango	Persentase data dan informasi lingkungan hidup yang terakses	100% dari 15 dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan (15 Dokumen)			85.942.500	90.239.625	Sedang Berjalan	Dinas Lingkungan Hidup
1.08.19.01	- Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan						Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Keg				
1.08.19.02	- Pengembangan data dan informasi lingkungan						Jumlah website yang di pelihara	1 paket				
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				Persentase peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.906.336.900	2.632.921.125	Sedang Berjalan	Dinas Lingkungan Hidup
1.08.24.05	- Penataan RTH						Luas RTH	3000 M2				
1.08.24.06	- Pemeliharaan RTH						Jumlah pemeliharaan RTH	1 thn				
	Bidang Urusan Pertanahan	Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan						8.800.000.000	10.500.000.000		
1.09.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			Kab. Bone Bolango	Jumlah persil tanah yang di bebaskan	17			8.500.000.000	10.000.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.09.16.01	- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah											
1.09.16.02	- Penyuluhan hukum pertanahan											
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah			Kab. Bone Bolango	Jumlah dokumen pendaftaran tanah	1 Dokumen			300.000.000	500.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
	Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital Government)						959.458.225	1.439.187.338		
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			Kab. Bone Bolango	% Jumlah penduduk yang terlayani E-KTP dari Total Jumlah Penduduk Wajib KTP	83,87096774			959.458.225	1.439.187.338	Sedang Berjalan	Dinas Dukcapil
					% Jumlah anak yang terlayani KIA dari Total Jumlah anak dibawah 15 tahun	58,06451613						
					% Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	61,12						
1.10.15.01	- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu						Jumlah Dokumen Hasil Pengimputan Data Kependudukan	12 Dokumen				
1.10.15.03	- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)						Jumlah Sistem Kependudukan yang dipelihara/dalam Keadaan Baik	1 sistem				
1.10.15.06	- Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan						Jumlah dokumen kependudukan yang disusun	1 Dokumen				

1.10.15.08	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan						Rata-rata penyelesaian administrasi kependudukan dalam waktu 1 x 8 jam dihitung dari penyertaan kelengkapan berkas s/d dengan ditandatangani	pelayanan /penerbitan 2571 kk, 3929 ktp elektronik dan 5200 akta kelahiran,					
1.10.15.11	- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	150 Orang					
1.10.15.09	- Pengembangan Data Base Kependudukan						Jumlah Dokumen Kependudukan yang diupdate	1 Dokumen					
1.10.15.14	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Jumlah Dokumen Hasil Capaian Program yang disusun	4 Dokumen					
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan	Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal								378.907.200	597.852.613		
01:12:22	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak			Kab. Bone Bolango	Persentase pencatatan dan pelaporan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	30,13% dari 1.198 ibu sasaran anggota Bina Keluarga Balita				24.428.250	25.649.663	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
01:12:22.01	- Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak						Jumlah Dokumen Data Keluarga Yang Disusun	1 dokumen					
01:11:16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Kab. Bone Bolango	Persentase usaha perempuan yang aktif	75% dari 40 usaha perempuan				149.749.950	357.237.500	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
01:11.16.08	- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak						Jumlah Sistem Data Gender dan Anak Yang dibuat	1 dokumen					
01:11.16.02	- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan P2PTP2A						Jumlah Korban Kekerasan Rumah Tangga Yang difasilitasi	100 Orang					
01:11.16.06	- Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak						Jumlah Anak dan kelompok anak yang ditingkatkan kapasitasnya	400 Anak					
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak			Kab. Bone Bolango	Persentase perempuan korban KDRT dan anak yang didampingi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi	44,77% dari 134 kasus yang dilaporkan				102.364.500	107.482.725	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
	- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan						Jumlah perempuan yang difasilitasi terhadap tindak kekerasan	150 Orang					
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan						Jumlah Dokumen hasil capaian program yang disusun	4 Dokumen					
	- Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan						Jumlah Kecamatan yang di jadikan Kecamatan Layak Anak	2 Kecamatan					
01:11:18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan			Kab. Bone Bolango	Prosentase perempuan yang menduduki jabatan publik	40,3 % dari 667 perempuan yang menduduki jabatan				102.364.500	107.482.725	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
01:11.18.01	- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan						Jumlah Organisasi Perempuan Yang Dibina						
01:11.18.02	- Kegiatan Pendidikan dan Peratman peningkatan peran serta dan kesetaraan gender						Jumlah Peserta Sosialisasi PPRG						

01.11.18.03	- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera						Jumlah perempuan yang difasilitasi						
	- Kegiatan Peningkatan Produktifitas ekonomi perempuan						Jumlah perempuan yang di tingkatkan kapasitasnya						
01.11.18.06	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan						Jumlah Dokumen hasil capaian program yang disusun						
	Bidang Urusan keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan							2.529.718.800	2.917.316.745		
01:12:15	Program Keluarga Berencana			Kab. Bone Bolango	Persentase penurunan angka kelahiran	88,9% dari 22.992 PUS				2.329.915.350	2.679.402.653	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
01.12.15.05	- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana						Jumlah PUS yang mendapatkan Informasi Tentang KB	3000 PUS					
01.12.15.06	- Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling (Fisik)						Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan						
01:12:16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			Kab. Bone Bolango	Persentase cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	2, 65% dari 1783 Remaja				23.257.500	34.886.250	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
01.12.16.01	- Kegiatan Advokasi KIE Tentang Reproduksi Remaja						Jumlah Remaja yang diberikan Penyuluhan	400 Remaja					
01:12:18	Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB dan KB Mandiri			Kab. Bone Bolango	Prosentase cakupan anggota Tribina(Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia UPPKS yang Ber KB	15 % dari 207 Kelompok Tribina/UPPKS				176.545.950	203.027.843	Sedang Berjalan	Dinas KB-PP dan Pemberdayaan Perempuan
01.12.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB						Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB Yang difasilitasi	5 Kelompok					
	Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berbasis sumberdaya lokal							1.918.750.000	1.204.822.500		
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Kab. Bone Bolango	Persentase Koperasi Sehat	39,29 % (22 Koperasi sehat dari 56 koperasi aktif)				189.000.000	283.500.000	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1.15.18.04	- Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian						Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Prinsip-prinsip Pemahaman	75 Org					
1.15.18.05	- Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi						Jumlah Koperasi yang Dibina, Diawasi & Diberikan Penghargaan	164 Koperasi					
1.15.18.06	- Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi						Jumlah Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi dan Kerja sama Koperasi	2 Kegiatan					

	Bidang Urusan Perpustakaan	Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar						115.076.500	230.153.000		
1.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Kab. Bone Bolango	Persentase Jumlah pemustaka (Usia 10-59 tahun)				115.076.500	230.153.000	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan
1.01.21.01	- Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar						Jumlah pemustaka yang terlayani oleh perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling (pemustaka)	1000 Pemustaka				
1.01.21.02	- Pengembangan Minat dan Budaya Baca						Jumlah Peserta Festival Membaca Bone Bolango	250 Orang				
1.01.21.08	- Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat						Jumlah Perpustakaan desa dan sekolah yang mendapat pembinaan	100 Perpustakaan				
1.01.21.09	- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca						Jumlah masyarakat yang sadar akan budaya gemar membaca	232 Orang				
1.01.21.09	- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah						Jumlah Koleksi Buku Terbitan Daerah dan Naskah Kuno	10 Jdl/ 1 kamus/ 70 Eks				
	Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga	Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga						5.340.000.000	5.638.735.152		
1.18.15	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda			Kab. Bone Bolango	Persentase ketersediaan kebijakan arah pembangunan kepemudaan	10 Dokumen			20.000.000	25.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.15.01	- Pendataan Potensi Kepemudaan						Jumlah dokumen/data tentang potensi kepemudaan	1 Dokumen				
1.18.16	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan			Kab. Bone Bolango	Persentase kelkutsertaan pemuda dalam kegiatan daerah	26,6%			727.500.000	1.060.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.16.01	-Pembinaan Organisasi Kepemudaan						Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	3 Organisasi				
1.18.16.02	- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan						Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	307 org				
1.18.16.03	- Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan						Jumlah Pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda tingkat Kabupaten	250 org				
1.18.16.09	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Jumlah Dokumen	1 Dokumen				
1.18.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan			Kab. Bone Bolango	Persentase wirausaha pemuda yang dibina	2 Kelompok			125.000.000	150.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.17.02	- Pelatihan Keterampilan bagi pemuda						Jumlah Pemuda yang terlatih dan memiliki keterampilan di bidangnya	50 Org				
1.18.20	Program Pembinaan & Pemasarakatan Olahraga			Kab. Bone Bolango	Peringkat yang diraih pada kejuaraan tingkat Provins	Peringkat 1			1.342.500.000	1.812.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.20.03	- Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat						Jumlah Tim/Club olahraga yang terbina	8 club				

1.18.20.04	- Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah					Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan (HUT BONBOL)	3 cabang					
1.18.20.05	- Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi					Frekuensi pelaksanaan senam aerobis	24 kali					
1.18.20.06	- Penyelenggaraan Kompetisi olahraga					Jumlah cabang olahraga yang diikuti	7 cab					
1.18.20.07	- Pemasaran Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat					Jumlah cabang olahraga yang diperlombakan	4 cab					
1.18.20.11	- Pengembangan Olahraga Rekreasi					Jumlah tim/atlit olahraga festival olahraga	1 tim					
1.18.20.12	- Peningkatan Jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlit dan tenaga keolahragaan					Jumlah atlit berprestasi yang menerima bonus/penghargaan	20 org					
1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga			Kab. Bone Bolango	Persentase lapangan olahraga yang representatif/layak di setiap kecamatan	40%			3.125.000.000	2.591.735.152	Sedang Berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.22.01	- Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga					Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan gelanggang olahraga Kab. Bone Bolango	10 ha / 2 paket					
1.18.23.02	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga					Jumlah sarana/prasarana Olahraga tempat latihan dalam berolahraga	4 lapangan					
	Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN	Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik						2.149.490.175	2.256.964.684		
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Kab. Bone Bolango	Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kabupaten Bone Bolango	163 Kali			171.717.000	180.302.850	Sedang Berjalan	Dinas POLISI PP
1.19.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					Jumlah Aparat Ketentraman dan Ketertiban yang mengikuti pelatihan	100 Orang					
1.19.15.04	Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat					Jumlah kasus kebisingan dan gangguan masyarakat yang ditangani	15 Kasus					
1.19.15.05	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan					Jumlah Kegiatan Penanganan Keamanan Lingkungan Pelanggaran PERDA	8 Kegiatan					
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			Kab. Bone Bolango	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan Keindahan) di	80 % (dari penemuan kasus pelanggaran Perda, Perkada)			951.279.000	998.842.950	Sedang Berjalan	Dinas POLISI PP
1.19.16.01	- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja					Jumlah Aparat Satpol PP yang di Fasilitas	120 Orang					

	- Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati					Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Kerja Bupati Bone Bolango	12 Bulan					
1.19.16.02	- Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					Jumlah Rapat Koordinasi bersama TNI/Polri	4 Kali					
1.19.16.03	- Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaaan					Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja yang dilaksanakan	3 Kerjasama kegiatan					
1.19.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			Kab. Bone Bolango								
1.19.20.01	- Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba					Jumlah peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	200 Orang					
1.19.20.06	- Penyuluhan pencegahan praktek perjudian					Jumlah peserta Penyuluhan pencegahanpraktek perjudian	200 Orang					
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			Kab. Bone Bolango	Prosentase forum masyarakat yang di fasilitasi dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan	100%			94.505.250	99.230.513	Sedang Berjalan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.17.02	- Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat					Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	100 Orang					
1.19.17.03	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa					Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	200 Orang					
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			Kab. Bone Bolango	Prosentase penurunan tindak kriminal	30%			659.807.925	692.798.321	Sedang Berjalan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.19.01	- Pembentukan Satuan Keamanan dilingkungan Masyarakat					Jumlah Kelompok Satuan Keamanan lingkungan yang dibentuk	100 kelompok					
1.19.21	Program pendidikan politik masyarakat			Kab. Bone Bolango	Prosentase masyarakat yang terlayani pada program pendidikan politik masyarakat	100%			152.565.000	160.193.250	Sedang Berjalan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.21.01	- Penyuluhan kepada masyarakat					Jumlah Peserta sosialisasi peraturan uu Politik Kepada Masyarakat	300 Orang					
1.19.21.03	- Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik					Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi budaya dan etika politik\	200 Orang					
1.19.21.05	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					Jumlah dokumen hasil capaian program	4 Dokumen					
	Program peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat			Kab. Bone Bolango	Prosentase Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat	100%			47.370.750	49.739.288	Sedang Berjalan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.20.17.16	- Peningkatan manajemen aset/barang daerah						Jumlah aset daerah terinventarisasi (meningkat)						
							Jumlah aset daerah tercatat sesuai SAP/Pedoman						
1.20.17.18	- Revaluasi/appraisal aset/barang daerah						Jumlah dokumen revaluasi/appraisal aset/barang daerah yang diselesaikan tepat waktu	4 dokumen					
1.20.17.19	- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah						Jumlah peserta rapat/sosialisasi/bimtek dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD	160 orang					
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				Prosentase penurunan jumlah kasus temuan	85%				1.509.502.050	1.584.977.153	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
1.20.20.01	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala						Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	123 LHP Reguler 27 LHP Non Reguler					
1.20.20.02	- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Tujuan Tertentu dan Kasus Pengaduan yang ditangani (Khusus Kasus)	20 LHP Non Reguler					
1.20.20.08	- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan						Jumlah Rekomendasi Temuan yang Diteindaklanjuti	950 Rekomendasi					
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Kab. Bone Bolango		Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	85%				357.194.250	375.053.963	Sedang Berjalan	Inspektorat Daerah
1.20.21.01	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						Jumlah Aparat Pengawasan/Tenaga Pemeriksa Yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor	20 Orang					
1.20.21.02	- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja						Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian Kinerja	3 Laporan					
1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Kab. Bone Bolango		Prosentase Kepuasan SKPD dan Penyedia Barang/Jasa yang menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90%				1.765.087.275	2.029.850.366	Sedang Berjalan	Setda (Bagian Layanan Pengadaan)
	- Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik						Jumlah Sistem Informasi Layanan Publik yang dioptimalkan pemanfaatannya						
1.20.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Kab. Bone Bolango		Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 aduan				92.319.938	96.935.934	Sedang Berjalan	Setda (Bagian Ekbang)
	- Layanan penanganan pengaduan masyarakat												
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Bone Bolango		% Jumlah Rancangan Perda Usulan Eksekutif yang ditindaklanjuti menjadi Perda	55.56 (5 dari 9 usulan)				519.703.800	545.688.990	Sedang Berjalan	Setda (Bagian Hukum)
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Kab. Bone Bolango		Jumlah Dokumen Topimini dan dokumen dasar wilayah	2 dok				80.115.000	84.120.750	Sedang Berjalan	Setda (Bagian Tata Pemerintahan)
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		Kab. Bone Bolango		Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan Secara Terpadu	100%				1.800.000.000	1.890.000.000	Sedang Berjalan	18 Kecamatan

	- Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan					Jumlah Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan (18 Kecamatan)					
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wilayah Kecamatan		Kab. Bone Bolango	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan yang dilaksanakan	100%			3.600.000.000	3.780.000.000	Sedang Berjalan	18 Kecamatan	
	- Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan					Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan (18 Kecamatan)					
	- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya Tkt Kecamatan					Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	4 Kegiatan (18 Kecamatan)					
	- Pengendalian dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan					Jumlah kegiatan pengendalian Keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	2 Kegiatan (18 Kecamatan)					
	- Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan					Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kel	3 Kegiatan (18 Kecamatan)					
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan					Jumlah Kelurahan yang menjalankan administrasi pelayanan	5 Kelurahan					
	Urusan Bidang Pemerintahan Umum (Fungsi Kepegawaian)	Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan					5.252.174.550	5.514.783.278			
01:21:16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Kab. Bone Bolango	Porsentase peserta yang mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan	100%			4.221.507.150	4.432.582.508	Sedang Berjalan	Badan Kepegawaian Pelatihan Daerah	
01.21.16.02	- Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah					Jumlah Pegawai negeri sipil daerah yang mengikuti diklat PIM II, PIM III dan PIM IV	190 Org					
01.21.16.03	- Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNS Daerah					Jumlah Pegawai negeri sipil daerah yang mengikuti diklat teknis, tugas dan fungsi	200 Org					
01:21:17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Kab. Bone Bolango	Porsentase pengembangan karir aparatur yang didukung dengan sistem informasi kepegawaian	100%			1.030.667.400	1.082.200.770	Sedang Berjalan	Badan Kepegawaian Pelatihan Daerah	
01.21.17.01	- Penyusunan rencana pembinaan karir dan PNS					Jumlah rencana pembinaan karir yang disusun (analisa jabatan)	4 Dok/ 156 Org					
01.21.17.02	- Seleksi Penerimaan Calon PNS					Jumlah calon pegawai negeri sipil yang lulus seleksi	100 org/ 1 Lap					
01.21.17.03	- Penempatan PNS					Prosentase Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensinya						
01.21.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan Pangkat otomatis PNS					Jumlah pegawai negeri sipil daerah yang naik pangkat dan pensiun	1025 org					
01.21.17.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah					Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi					

01.21.17.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi						Jumlah pegawai negeri sipil yang diberi	15 Org					
01.21.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS						Prosentase penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	4 Dokumen					
	Urusan Bidang Pemerintah Desa	Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal	Terwujudnya pertumbuhan desa						2.569.710.525	3.762.149.745			
01:22:15	Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan			Kab. Bone Bolango	Prosentase Pembangunan Infrastruktur Desa	75%				765.582.525	1.378.048.545	Sedang Berjalan	Dinas Pemberdayaan dan Pemdes
01.22.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan						Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek LPM	165 Desa/Kel					
01.22.15.02	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat						Pendataan sistem informasi Data profil desa/Kel dan Sistem Informasi Posyandu (SIP)	165 Desa/Kel					
01.22.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat desa						Jumlah Desa/Kel yang mengikuti Lomba Inovasi TTG Tkt Kabupaten dan tingkat Nasional di Provinsi Gorontalo	165 Orang					
	Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK						Jumlah pengurus PKK yang meningkat kapasitasnya						
01:22:16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan			Kab. Bone Bolango	Prosentase jumlah BUMDES yang terbentuk	85% dari 160 BUMDES (128 BUMDES)				166.749.000	216.773.700	Sedang Berjalan	Dinas Pemberdayaan dan Pemdes
01.22.16.02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa						Jumlah BUMDES Yang Terbentuk						
01:22:17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			Kab. Bone Bolango	Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100% dari 160 desa dan 5 kelurahan				915.526.500	1.373.289.750	Sedang Berjalan	Dinas Pemberdayaan dan Pemdes
01.22.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat Pembangunan Desa						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi	165 Desa/Kel					
01.22.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa						Jumlah dokumen hasil Musrenbangdes						
01:22:18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			Kab. Bone Bolango	Prosentase aparatur desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	100% dari 800 aparatur desa				721.852.500	794.037.750	Sedang Berjalan	Dinas Pemberdayaan dan Pemdes
01.22.18.02	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa						-Jumlah Peserta pelatihan aparatur ,Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	160 Desa					
01.22.18.03	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa						-Jumlah Peserta pelatihan aparatur ,Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	160 Desa					
01.22.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						-Jumlah Dokumen hasil Monitoring Program/kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan						
01:22:19	Program : Peningkatan Perempuan Dalam Membangun Desa			Kab. Bone Bolango	prosentase terselenggaranya kegiatan pemerintah Desa/Kelurahan							Sedang Berjalan	Dinas Pemberdayaan dan Pemdes
01.22.19.01	Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif						Jumlah terselenggaranya pemerintahan desa/kelurahan						

	Urusan Bidang Statistik	Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan						16.300.000	18.745.000		
01:23:15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			Kab. Bone Bolango	Porsentase ketersediaan dokumen statistik daerah sebagai dasar perencanaan	100%			16.300.000	18.745.000	Sedang Berjalan	Bappeda
01.23.15.01	- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah											
01.23.15.03	- Penyusunan dan pengumpulan data PDRB											
	Urusan Bidang Kebudayaan	Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar						498.567.850	548.424.635		
01:23:15	Program pengembangan Nilai Budaya			Kab. Bone Bolango	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelestarian Adat Budaya Daerah	10 kegiatan			458.877.100	504.764.810	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah											
01:23:15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Kab. Bone Bolango	Porsentase pembentukan kelembagaan budaya	100%			39.690.750	43.659.825	Sedang Berjalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah											
	Urusan Bidang Kearsipan	Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah						200.575.000	263.880.000		
01:24:15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			Kab. Bone Bolango	Porsentase Peningkatan kualitas Perbaikan sistem administrasi pengelolaan kearsipan daerah				150.000.000	157.500.000	Sedang Berjalan	Dinas Peprustakaan dan Arsip
01.24.15.01	- Pembangunan data base informasi kearsipan						Jumlah Data Base Informasi Kearsipan Yang Diadakan	1 Paket				
01:24:16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			Kab. Bone Bolango	Porsentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD	37			25.575.000	81.380.000	Sedang Berjalan	Dinas Peprustakaan dan Arsip
01.24.16.01	- Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip						Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang diadakan	2 Unit/500 Box				
01.24.16.02	- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah						Jumlah SKPD yang telah menata arsip secara baku	38 SKPD				
01:24:18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			Kab. Bone Bolango					25.000.000	25.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Peprustakaan dan Arsip
01.24.18.03	- Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta						Jumlah peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swast	38 SKPD				
	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital Government)						5.460.069.100	5.741.196.510		

01:25:15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Kab. Bone Bolango	Jumlah frekuensi penyebaran informasi dengan berbagai media elektronik, cetak dan media massa	75 tayang/hari			4.000.000.000	4.200.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Kominfo
01:25:18	Program kerjasama informasi dan media massa			Kab. Bone Bolango	Jumlah Desa yang menerima Tabloid Pemerintah Daerah "Kambum".	165 Desa x 12 Bulan			1.297.590.000	1.362.469.500	Sedang Berjalan	Dinas Kominfo
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			Kab. Bone Bolango	Prosentase ASN Bone Bolango yang mampu menguasai teknologi dan informasi	45%			162.479.100	178.727.010	Sedang Berjalan	Dinas Kominfo
	Urusan Bidang Pangan	Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan						4.617.485.500	4.617.485.500		
02:01:16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			Kab. Bone Bolango	Cakupan ketersediaan dan cadangan pangan	30% dari target jumlah desa mandiri pangan pada tahun 2021 sebanyak 20 Desa			Rp 4.617.485.500	5.079.234.050	Sedang Berjalan	Dinas Pangan
02.01.16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian						Jumlah Sosialisasi Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil	1 KEGIATAN				
02.01.16.17	Pengembangan Pertanian pada lahan kering						Jumlah Komoditas Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	6 Komoditas				
02.01.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian						Jumlah Lahan Pertanian/perkebunan Yang ditingkatkan produktifitasnya (ha)	3 KEGIATAN				
	Urusan Bidang Pertanian	Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu						23.792.958.625	27.688.121.636		
02:01:17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			Kab. Bone Bolango	Persentase Jumlah produk unggulan yang di promosikan	20% (2 dari 10 komoditas unggulan)			Rp 25.200.000	63.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PERTANIAN
02.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah						Jumlah Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Yang Diikuti	5 KEGIATAN				
02.01.17.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan						Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	2 Unit				
02.01.17.12	Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang akan dipasarkan						Jumlah Peserta Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang akan dipasarkan	100 Orang				
02:01:18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			Kab. Bone Bolango	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Menerapkan Teknologi Tepat Guna	28,37% (55 dari 370 poktan			Rp 313.260.150	328.923.158	Sedang Berjalan	DINAS PERTANIAN

02.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna						Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian Perkebunan Yang	1 TAHUN				
02:01:19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			Kab. Bone Bolango	Prosentase Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Padat	2,9% (6,46 ton)			Rp 5.903.068.600	7.969.142.610		DINAS PERTANIAN
02.01.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan						Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian tepat guna	1 TAHUN				
02:01:20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			Kab. Bone Bolango	Persentase Jumlah penyuluh yang di tingkatkan keselahteraannya	22%			Rp 648.844.875	681.287.119	Sedang Berjalan	DINAS PERTANIAN
02:01:21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			Kab. Bone Bolango	Prosentase Ternak Yang Disembuhkan Dari Total Hasil Pelacakan	100%			Rp 599.812.500	629.803.125	Sedang Berjalan	DINAS PERTANIAN
02.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan				Peningkatan Jumlah Populasi Ternak Setiap Tahun	3.000			Rp 15.750.000.000	17.325.000.000	Sedang Berjalan	DINAS PERTANIAN
02:01:23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			Kab. Bone Bolango	Prosentase Kenaikan Konsumsi Daging (Dihitung Dari Rata-rata Konsumsi Daging)	75%			Rp 552.772.500	690.965.625	Sedang Berjalan	DINAS PERTANIAN
	Urusan Bidang Pariwisata	Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berbasis sumberdaya lokal						6.442.904.337	7.827.401.306		
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Kab. Bone Bolango	Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisata di kabupaten bone bolango	naik 30% (29.998 kunjungan)			671.568.000	738.724.800	Sedang Berjalan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.04.15.03	- Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata						Jumlah Kerjasama dengan lembaga lain dalam promosi pariwisata	2 Kerjasama				
2.04.15.05	- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri						Jumlah Kegiatan Promosi pariwisata yang dilaksanakan	15 Kegiatan				
2.04.15.08	- Pelatihan pemandu wisata terpadu						Jumlah Masyarakat yang direkrut menjadi Pemandu Wisata	15 Orang				
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Kab. Bone Bolango	Persentase Lokasi Obyek Wisata yang dikembangkan	25% (3 dari 12 lokasi wisata)			5.600.516.337	6.900.774.506	Sedang Berjalan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.04.16.01	- Pengembangan objek pariwisata unggulan						Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	3 Objek Wisata				
2.04.16.07	- Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi						Jumlah Desa yang Masyarakatnya dikembangkan menjadi masyarakat sadar wisata	4 Desa				
2.04.17	Program Pengembangan Kemitraan			Kab. Bone Bolango	Jumlah kemitraan yang di terjalin	2 keg kemitraan yang terjalin			170.820.000	187.902.000	Sedang Berjalan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.04.17.01	- Pengembangan dan penguatan informasi dan data base						Jumlah Website Pariwisata yang dikembangkan	1 Web				

	Urusan Kelautan dan Perikanan	Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan						4.658.495.500	4.957.996.475		
			Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin									
2.05.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			Kab. Bone Bolango	Prosentase Peningkatan volume Produksi Perikanan budidaya	59% (790 Ton)	Meningkatnya volume Produksi Perikanan budidaya		Rp 2.086.828.750	1.467.218.813	Sedang Berjalan	Dinas Perikanan dan kelautan
2.05.20.01	Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul						Jumlah Komoditas bibit ikan unggul yang dikembangkan	4 Komoditas				
2.05.20.02	Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan						jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat pendampingan	20 kelompok				
2.05.20.03	Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan						Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan	3 Kegiatan				
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			Kab. Bone Bolango	Prosentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	76% (11.500 Ton)	Meningkatnya volume Produksi Perikanan Tangkap		Rp 1.952.217.750	2.635.493.963	Sedang Berjalan	Dinas Perikanan dan kelautan
2.05.21.01	Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap						Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat pendampingan	10 kelompok				
2.05.21.02	Kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan						Jumlah TPI yang dibangun	1 TPI				
2.05.21.05	Kegiatan pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap						Jumlah sarana dan prasarana Perikanan Tangkap yang diadakan	50 UNIT				
	Kegiatan Lembaga perdagangan perikanan tangkap						Jumlah Kegiatan pengembangan lembaga dan retribusi perikanan tangkap	3 Kegiatan				
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			Kab. Bone Bolango	Prosentase Peningkatan volume produksi pengolahan ikan (ton) dan tingkat konsumsi ikan	75% (9 Ton) dan 55 kg/kapita/thn	Meningkatnya Volume produksi pengolahan ikan dan konsumsi ikan (kg/th/perkapita)		Rp 119.449.000	155.283.700	Sedang Berjalan	Dinas Perikanan dan kelautan
2.05.23.01	Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan						Jumlah Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan yang diadakan	5 Dokumen				
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana , Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan						Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan yang diadakan	20 UNIT				
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar			Kab. Bone Bolango	Prosentase Peningkatan Kawasan Budidaya air Tawar	25%	Meningkatnya kawasan budidaya air tawar		Rp 500.000.000	700.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Perikanan dan kelautan
2.05.24.01	Kegiatan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar						Jumlah sarana dan prasarana Perikanan Budidaya yang diadakan	2 Lokasi kawasan				

Urusan Bidang Perdagangan		Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan						6.531.126.000	9.955.932.300		
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Kab. Bone Bolango	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Terciptanya Konsumen Cerdas	65% (dari 1447 pedagang)			126.126.000	132.432.300	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.06.15.02	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen						Prosentse Jumlah kasus yang terselesaikan melalui BPSK Bone Bolango	2 Kegiatan				
2.06.15.03	Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan jasa							1 Kegiatan				
2.06.15.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah						Optimalisasi Pelayanan terhadap tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal dan BDKT	3 Kegiatan				
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Kab. Bone Bolango	Prosentase dokumen laporan pengelolaan pasar yang dilaporkan tepat waktu	50% (dari 5 pasar tidak layak)			125.000.000	137.500.000	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.06.18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk							9 kegiatan				
2.06.18.07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Kegiatan				
2.06.19	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan			Kab. Bone Bolango	Cakupan penyelesaian pembangunan pasar tradisional (%)	9,38% (3 unit dari 32 pasar)			6.250.000.000	9.650.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Kab. Bone Bolango	Meningkatnya pengetahuan pedagang sektor informal	10,3% (150 dari 1447 pedagang)			30.000.000	36.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.06.19.02	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan							1 Kegiatan				
Urusan Bidang Perindustrian		Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berbasis sumberdaya lokal						1.978.918.000	2.077.863.900		
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah			Kab. Bone Bolango	Persentase peningkatan pengetahuan IKM tentang pengelolaan dan teknik usaha	2,48% (50 dari 2015 IKM)			1.653.918.000	1.736.613.900	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.07.16.01	- Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.						Bantuan Modal Usaha Bagi IKM	541 Keg/Klaster/Kelo				
2.07.16.04	- Revitalisasi Ruang Produksi dan mesin						Jumlah IKM yang mendapat penyuluhan	2 Unit/paket				
2.07.16.04	- Pemberian kemudahan Izin usaha industri kecil menengah						Jumlah IKM yang mendapat penyuluhan	36 IKM				
2.07.18	Program Penataan Struktur Industri			Kab. Bone Bolango	Prosentase penguatan Industri lokal	10% (1 produk dari 10 produk)			200.000.000	210.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2.07.18.02	- Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri						Bantuan yang di berikan	2 IKM				
2.07.19	Program Pengembangan Sentra Industri potensial			Kab. Bone Bolango	Prosentase Tumbuhnya sentra IKM	5,88% (1 sentra IKM dari 17 IKM)			125.000.000	131.250.000	Sedang Berjalan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan
2.07.19.01	- Pembangunan akses transportasi sentra industri potensial						tersedianya akses jalan ketempat industri aren	1 Paket				

2.07.19.02	- Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat						1 Paket					
	Urusan Bidang Transmigrasi	Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin					602.334.920	662.568.412			
	Program pengembangan wilayah transmigrasi			Kab. Bone Bolango	Persentase sarana dan prasarana ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan sosialisasi pengembangan ekonomi melalui kelompok transmigran	35,7% 10 Orang (dari 28 penerima)		602.334.920	662.568.412	Sedang Berjalan	Dinas Sosial	
	Urusan Bidang Sosial	Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin					2.248.649.238	4.484.083.649			
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Kab. Bone Bolango	PMKS yang telah diberdayakan	1,46 % 35 PMKS (dari 2400 PMKS)		1.625.466.000	2.488.012.000	Sedang Berjalan	Dinas Sosial	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Kab. Bone Bolango	PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	1,02% 10 PMKS (dari 980 PMKS)		356.144.250	373.951.463	Sedang Berjalan	Dinas Sosial	
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			Kab. Bone Bolango	Persentase para penyandang cacat dan trauma yang di bina	0%		100.000.000	130.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Sosial	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Kab. Bone Bolango	Persentase peningkatan lembaga / Orsos yang menjalankan penyelenggaraan	6,17% 5 KT dan 5 Orsos (dari 162 KT/Orsos)		167.038.988	175.390.937	Sedang Berjalan	Dinas Sosial	
	Urusan Bidang Ketenagakerjaan	Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah	Tersedianya iklim investasi kondusif					427.819.500	716.729.250			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Kab. Bone Bolango	Persentase jumlah pencari kerja yang ditingkatkan kualitas	20%		150.000.000	250.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Kab. Bone Bolango	Persentase peningkatan kesempatan kerja	3% (6 Klompok KUP (dari 200 KUP \		200.000.000	350.000.000	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Kab. Bone Bolango	Persentase penyelesaian kasus HI	52%		77.819.500	116.729.250	Sedang Berjalan	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	

Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Anggaran
Total		301.604.718.568
I	Urusan Pemerintahan Umum	39.121.920.965
	Kepegawaian	5.252.174.550
	Kearsipan	200.575.000
	Inspektorat Daerah	1.866.696.300
	Keuangan Daerah	8.944.143.600
	Perencanaan Pembangunan Daerah	4.333.786.700
	Sekretariat Daerah	18.524.544.815
II	Urusan Konkuren	262.482.797.603
II.1	Urusan Konkuren Wajib	218.476.060.221
II.1.1	Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar	176.191.091.626
	Pendidikan	16.230.637.625
	Kesehatan	50.062.314.588
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000.000
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.500.000.000
	Perlindungan Masyarakat	2.149.490.175
	Sosial	2.248.649.238
II.1.2	Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	42.284.968.595
	Tenaga Kerja	427.819.500
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	378.907.200
	Pangan	4.617.485.500
	Pertanahan	8.800.000.000
	Lingkungan Hidup	3.913.883.560
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	959.458.225
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.569.710.525
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	2.529.718.800
	Perhubungan	4.287.706.085
	Komunikasi dan Informatika	5.460.069.100
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.918.750.000
	Penanaman Modal	451.515.750
	Kepemudaan dan Olahraga	5.340.000.000
	Statistik	16.300.000
	Persandian	-
	Kebudayaan	498.567.850
	Perpustakaan	115.076.500
II.2	Urusan Konkuren Pilihan	44.006.737.382
	Kelautan dan Perikanan	4.658.495.500
	Pariwisata	6.442.904.337
	Pertanian	23.792.958.625
	Perdagangan	6.531.126.000
	Perindustrian	1.978.918.000
	Transmigrasi	602.334.920